

**DAMPAK PEMBANGUNAN SEKTOR
PARIWISATA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL
EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR**

**(Studi Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah
Kota Blitar)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Oleh:

ARDITYAN JULI NUGROHO

NIM. 0610313023



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
MALANG
2010**

Di saat kita bangun pagi hari, kita memiliki
dua pilihan : Kembali tidur dan bermimpi
atau bangun dan mengejar mimpi itu.
Pilihan ada di kita sendiri...
(NN)

*Waktu seperti sungai. Kamu tidak bias menyentuh
dua kali di air yang sama, karena yang telah
berlalu tidak akan pernah datang lagi. Nikmatilah
setiap kejadian dalam kehidupan ini...*
(NN)

*Kegagalan sesungguhnya adalah
ketidakberanian untuk mencoba*
(AA Gym)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Dampak Pembangunan Sektor Pariwisata Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar (Studi Pada Dinas Informasi Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar)

Disusun oleh : Ardityan Juli Nugroho

NIM : 0610313023

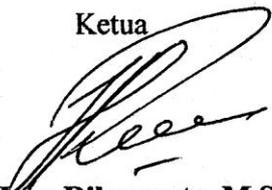
Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pembangunan

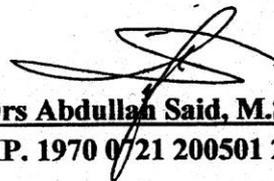
Komisi Pembimbing

Ketua



Drs. Heru Ribawanto, M.S
NIP. 195209111979031002

Anggota



Drs Abdullah Said, M.Si.
NIP. 1970 0721 200501 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 27 JULI 2010

Mahasiswa

METERAI
TEMPEL
PAJAK PENANGANAN BARANG
TGL. 20

693FBAAF223764708

ENAM RIBU RUPIAH
6000

DJP


Nama: Ardityan Juli N

NIM : 0610313023

RINGKASAN

Juli Nugroho, Ardityan 2010, **DAMPAK PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR**". (studi kasus pada Dinas Komunikaasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar), Drs Heru Ribawanto, M.S, Drs. Abdullah Said M. Si,

Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu andalan program pemerintah Indonesia yang memiliki prospek dan peran dalam menunjang berhasilnya pembangunan nasional. Hal ini sangat disadari karena Indonesia yang kaya akan seni budaya, adat-istiadat, peninggalan sejarah dan keindahan alam.. Pembangunan kepariwisataan dapat memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti semakin terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri maupun Negara pada khususnya untuk Pemerintah Daerah Tingkat II.

Konsep pengembangan kepariwisataan hendaknya juga didasarkan atas pembangunan kultural masyarakat, karena pariwisata merupakan aktivitas dengan karakteristik yang unik menyangkut berbagai aspek. Pengembangan sektor kepariwisataan mempunyai hubungan saling ketergantungan dengan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata di Indonesia merupakan kegiatan ekonomi yang dapat mendatangkan keuntungan dan ada kemungkinan menimbulkan dampak negatif.

Kota Blitar terkenal dengan Kota Proklamator, karena terdapat makam Presiden RI pertama dan itu menjadi *icon* kota Blitar. Ada juga tempat pariwisata yang ada di Kota Blitar yaitu Water Park Sumbur Udel, Museum Bung Karno dan perpustakaan Kota Blitar. Ada lagi tempat wisata yang lain di kota Blitar yaitu Wisata Minat Khusus (Pilgrim), Wisata Budaya, Wisata Industri, Wisata Pertanian, Wisata Olahraga, Wisata Cagar Alam.

Penelitian nantinya akan melihat dampak yang ditimbulkan dari pembangunan pariwisata Kota Blitar terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar obyek wisata. Dalam menemukan dan meneliti fenomena tersebut, peneliti memerlukan suatu rumusan masalah, sebagai berikut: (1) Bagaimanakah kondisi potensi pariwisata di daerah Kota Blitar? (2) Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan pariwisata terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar? (3) Hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi pembangunan sektor pariwisata di Kota Blitar?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian digunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan pemanfaatan data sekunder sebagai pendukung informasi.

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pembangunan pada sektor pariwisata di Kota Blitar sebagian besar berdampak positif seperti terdapatnya perubahan persepsi yang mengarah yang lebih maju, terjalinnya interaksi sosial dengan pola kerjasama, yang lebih baik juga berdampak dengan terbukannya lapangan pekerjaan. Dengan terbukannya lapangan pekerjaan tersebut akan mengakibatkan perubahan ekonomi masyarakat.

SUMMARY

Juli Nugroho, Ardityan, 2010. **THE EFFECT OF TOURISM SECTOR DEVELOPMENT ON SOCIAL ECONOMICAL CHANGE IN THE IMMEDIATE COMMUNITY** (A Case Study at Communication, Information and Tourism Official, Blitar). Supervisor: Heru Ribawanto, Co-supervisor: Abdullah said.

Tourism sector development is a reliable program designed by Indonesian government with promising prospect and function to support national development success. It is obvious because Indonesian has been enriched with various cultures, custom, historical artifact and natural beauty. Tourism development will give benefit to the improvement of community welfare through providing more employment and increasing community income. The national revenue, especially in regency level, is also increased.

Tourism development concept must consider community culture development. Tourism represents an activity with unique characteristic and in relation with various aspects. It may have interdependence nature with national development. It is evident because tourism sector is one of economic activities. However, it can give us profit but also negative impact.

Blitar city has known as *Kota Proklamator* because the first president of Indonesian Republic has rested in peace in this city. His grave becomes the icon of Blitar City. Some tourist resort are also available in Blitar City, such as Sumber Udel Water park, Bung Karno Museum, and Blitar City Library. Some specific types of tourism are provided such as Special Interest Tourism (Pilgrim), Culture Tourism, Industrial Tourism, Agriculture Tourism, Sport Tourism, and Natural Preservation Tourism.

Research attempts to examine the effect to tourism development in Blitar City on the immediate community's social economical change. Finding and observing this phenomenon are forced the author to search for problem, such as: (1) How is the condition of tourism potential in Blitar city? (2) How is the effect of tourism development on the immediate community's social economical change? and (3) What factors are effecting tourism sector development in Blitar City.

Descriptive research is used with qualitative approach. Data collection methods are interview and documentation. Secondary data are considered as the supporting information.

Result of research indicates that the tourism sector development in Blitar City gives positive effect on the perception of change in the future, social interaction through cooperation pattern, and the opening of more employment. The widely available employment stimulates economic change in the community.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Dampak Pembangunan Sektor Pariwisata Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar (studi kasus pada Dinas Kominparda Kota Blitar).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Selain itu juga untuk memberikan informasi bagi semua pihak, terutama pada Jurusan Administrasi Publik tentang bagaimana tentang dampak yang diakibatkan dengan adanya pembangunan pariwisata terhadap sosial ekonomi masyarakat yang ada di Kota Blitar dan faktor apa saja yang dapat mendorong dan menghambat dari dampak yang diakibatkan oleh pembangunan pariwisata.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Orang tua saya yaitu Bapak Supardi dan Ibu Sutiani yang telah mendidik dan mencurahkan segenap kasih sayang serta kesabarannya demi memperlancar proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. M.R Khairul Muluk, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya
4. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dengan penuh kesabaran serta selalu memberi masukan agar skripsi lebih sempurna.
5. Bapak Drs. Abdullah Said, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dengan penuh kesabaran serta selalu memberi masukan agar skripsi lebih sempurna.
6. Ibu Dra. Endang Budha Mahadyawati selaku Kepala Sub Bagian Akademik Jurusan Administrasi Publik yang telah bersedia membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini dengan baik.

7. Bapak Drs Kasmiadi selaku Kepala Dinas Kominparda Kota Blitar yang telah bersedia membantu dalam penelitian ini dan memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.
8. Seluruh pegawai Dinas Kominparda Kota Blitar yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberi bekal ilmu selama menempuh masa studi di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
10. Alventina Febe S yang telah memberikan perhatian, dukungan dan curahan kasih sayang sehingga terselesaikan skripsi ini.
11. Para sahabat dan teman-teman S1 Administrasi Publik khususnya angkatan 2006 yang telah bersedia membantu dan atas segala dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Serta semua pihak yang telah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, saya selaku penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik serta masukan dari semua pihak yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan anda. Harapan penulis semoga karya imiah ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2010

Penyusun

DAFTAR ISI

MOTTO
 LEMBAR PENGESAHAN
 PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
 RINGKASAN..... i
 SUMMARY..... ii
 KATA PENGANTAR..... iii
 DAFTAR ISI..... v
 DAFTAR TABEL..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1
 B. Rumusan Masalah..... 6
 C. Tujuan Penelitian..... 6
 D. Kontribusi Penelitian..... 7
 E. Sistematika Penulisan..... 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik..... 9
 1. Pengertian administrasi..... 9
 2. Pengertian Publik..... 10
 3. Pengertian Administrasi Publik..... 10
 4. Peran Administrasi Publik..... 11
 B. Administrasi Pembangunan..... 13
 1. Pengertian Administrasi Pembangunan..... 13
 C. Pembangunan..... 14
 1. Pengertian Pembangunan..... 14
 2. Penyelenggaraan Pemabngunan..... 16
 3. Tipe Pembangunan..... 16
 4. Konsep Pembangunan..... 16
 5. Persyaratan Pemabangunan..... 20
 6. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan..... 21
 7. Perkembangan Paradigma dan Strategi Pembangunan..... 22
 D. Pariwisata..... 24
 1. Pengertian Pariwisata..... 24
 2. Pengertian Kepariwisataaan..... 25
 3. Pengertian Wisatawan..... 26
 4. Pengertian Potensi Wisata..... 27
 5. Jenis-Jenis Pariwisata..... 28
 6. Bentuk-Bentuk Pariwisata..... 29
 7. Pembangunan Pariwisata..... 30
 8. Sarana dan Prasarana..... 32
 a. Sarana Pariwisata..... 32
 b. Prasarana pariwisata..... 32
 9. Promosi Pariwisata..... 34
 E. Dampak Pembangunan Kepariwisataaan..... 35
 F. Perubahan Sosial dan Ekonomi..... 37



1.Perubahan Sosial.....	37
2.Ruang Lingkup perubahan Sosial.....	38
3.Perubahan Ekonomi.....	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	46
B. Fokus penelitian.....	47
C. Lokasi dan situs penelitian.....	47
D. Sumber data.....	48
E. Teknik pengumpulan data.....	49
F. Instrumen penelitian.....	49
G. Analisis data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.....	52
1. Kondisi Umum Wilayah Kota Blitar.....	52
2. Profil Dinas Inkomparda Kota Blitar.....	63
B. Penyajian Data Fokus.....	81
1. Potensi Obyek Wisata Kota Blitar.....	81
2. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan sektor pariwisata terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar.....	90
a.Perubahan Sosial.....	91
b.Perubahan Ekonomi.....	93
3.Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pembangunan Pariwisata Di Kota Blitar.....	97
a.Faktor pendorong.....	97
b.Faktor penghambat.....	99
C. Analisis Data Fokus.....	101
1.Potensi Obyek Wisata Kota Blitar.....	101
2.Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan sektor pariwisata terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar.....	103
a.Perubahan Sosial.....	103
b.Perubahan Ekonomi.....	107
3.Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pembangunan Pariwisata Di Kota Blitar.....	110
a.Faktor pendorong.....	110
b.Faktor penghambat.....	111

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	115



DAFTAR TABEL

1. Rata-Rata Hari Hujan (Hari) 2004-2008.....	54
2. Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan.....	55
3. Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Per Tahun.....	55
4. Luas Wilayah, Kepala Keluarga, Kepadatan, dan Rata-rata penduduk per Kepala Keluarga.....	56
5. Luas Wilayah, Kepala Keluarga, Kepadatan, dan Rata-rata penduduk per Kepala Keluarga.....	56
6. Urutan Kepadatan Penduduk menurut Kelurahan 2008.....	57
7. Kelahiran, Kematian, Datang dan Pindah per Kecamatan 2008.....	58
8. Penduduk menurut Agama 2008 (orang).....	58
9. Perusahaan dan Tenaga Kerja WNI menurut Sektor tahun 2008.....	59
10. Perusahaan dan Tenaga Kerja WNI menurut Sektor Per Tahun.....	59
11. Kebutuhan Hidup Layak Pekerja per Orang per Bulan (Rp.) 2005-2008.....	60
12. Andil / <i>Shift Share</i> masing-masing Sektor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2008.....	61
13. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%) 2006 – 2008.....	63
14. Jenis Usaha 2008.....	93
15. Perusahaan Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur menurut Jenis Per Kecamatan 2008.....	94
16. Perusahaan Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur menurut Jenis Per Tahun.....	94
17. Pendapatan regional per kapita Kota Blitar tahun 2002 – 2008.....	96

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan suatu Negara yang sedang berkembang, Pembangunan adalah kegiatan yang menjadi prioritas utama yang harus dilaksanakan, pelaksanaan pembangunan tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, salah satu pembangunan yang perlu dikembangkan adalah dari sektor pariwisata.

Pembangunan nasional yang dilakukan secara berkelanjutan, mempunyai arah dan tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini mengandung arti bahwa pembangunan tidak mengejar kemajuan yang dicita-citakan saja tetapi pembangunan ini mempunyai arah tujuan terhadap pemenuhan akan kebutuhan hidup masyarakat. Sebagai salah satu bidang pembangunan, kepariwisataan memerlukan pengembangan dan pengelolaan lebih lanjut agar dapat berkembang lebih baik, selaras dan sejajar dengan aspek-aspek pembangunan lainnya, sehingga tujuan dari pembangunan dapat bermanfaat serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.

Pembangunan pada sektor pariwisata merupakan salah satu andalan program pemerintah Indonesia yang memiliki prospek dan peran dalam rangka menunjang berhasilnya pembangunan nasional. Hal ini sangat disadari karena Indonesia yang kaya akan seni budaya, adat-istiadat, peninggalan sejarah dan keindahan panorama alam yang cukup potensial untuk dikembangkan.

Pembangunan kepariwisataan dapat memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti semakin terbukanya lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan baik masyarakat itu sendiri maupun Negara pada khususnya untuk Pemerintah Daerah Tingkat II.

Sesuai dengan tujuan pengembangan potensi kepariwisataan Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan yang berbunyi sebagai berikut :

“memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu dan daya tarik wisata. Memupuk rasa cinta tanah air dan

meningkatkan persahabatan antara bangsa. Memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong pendayagunaan produksi nasional". (Setneg,1990 : 2)

Dari uraian tersebut diatas, tergambar bahwa salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan nasional sehingga dapat mensejahterakan masyarakat adalah dengan mengembangkan sektor pariwisata. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya perluasan kesempatan kerja sekaligus membuka bagi sektor-sektor lain. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang dapat diandalkan sebagai salah satu alternatif sumber pendapatan nasional pada bidang Non-Migas. Menurut Dr. Salah Wahab :

“pariwisata adalah salah satu jenis industri baru mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standart hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Selanjutnya sebagai sektor yang kompleks, ia juga meliputi industri-industri klasik yang sebenarnya seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata. Penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dipandang sebagai industri". (Tourism Management,1975 : 9)

Oleh karena itu pariwisata bukan saja sebagai alat untuk menghasilkan sumber pendapatan bagi negara, tetapi pemerintah bekerjasama dengan swasta atau dunia usaha, hendaknya juga memperhitungkan arti kepariwisataan sebagai alat untuk mengembangkan industri dan pelayanan-pelayanan baru seperti fasilitas, alat-alat pariwisata, investasi, aktivitas promosi, perbaikan-perbaikan, pelayanan, pembangunan gedung-gedung dan alat-alat transportasi didaerah yang istimewa dan tepat untuk perkembangan potensi kepariwisataan.

Berdasarkan pemahaman ini, konsep pengembangan kepariwisataan hendaknya juga didasarkan atas pembangunan dan pengembangan kultural masyarakat setempat, karena pariwisata merupakan aktivitas sosial ekonomi yang memiliki karekteristik yang unik menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh karenanya sangat kental bersentuhan dengan aspek budaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sisi kehidupan manusia. Di Indonesia banyak dijumpai keanekaragaman dan keunikan budaya yang sangat potensial untuk dijadikan andalan bagi pembangunan Otonomi Daerah yang berbasis pada wisata dan budaya daerah.

Pengembangan sektor kepariwisataan mempunyai hubungan saling tergantung dengan pembangunan nasional, dalam arti pembangunan kepariwisataan yang mempercepat lajunya pembangunan nasional, sebaliknya pembangunan nasional akan mempercepat pula perkembangan kepariwisataan. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata di Indonesia merupakan kegiatan ekonomi yang dapat mendatangkan keuntungan. Disamping manfaat yang cukup besar dapat dihasilkan dari sektor pariwisata, kemungkinan yang lain adalah timbulnya dampak negatife yang perlu dihindari. Dengan kata lain, walaupun sektor pariwisata dapat memberikan pemasukkan pendapatan negara, tetapi tidak boleh menilai sektor pariwisata tersebut dari satu aspek semata. Segi kemasyarakatan dan kebudayaan perlu diperhitungkan agar usaha yang bertujuan baik itu tidak mendatangkan kekecewaan. Hal ini karena perkembangan kepariwisataan yang sangat pesat akan mendatangkan pula dampak sosial budaya yang tidak diinginkan.

Maka pariwisata sebagai suatu komoditas industri memerlukan suatu strategi yang terpadu dengan pola pengembangan kepariwisataan yang terencana secara menyeluruh, maka potensi alam dan budaya yang dimiliki ini harus dijaga agar tidak rusak, baik melalui pembuatan aturan-aturan dalam pengembangan kepariwisataan yang berbasis pada lingkungan maupun pelibatan masyarakat dalam turut menjaga aset budaya, alam dan lingkungannya sebagai aset penting bagi berlangsungnya kegiatan pariwisata. Dalam pengembangan dan peningkatan kepariwisataan, pengembangan obyek dan daya tarik perlu ditingkatkan, sehingga akan lebih banyak menarik wisatawan yang berkunjung. Dengan adanya pengembangan kepariwisataan tersebut kemungkinan terjadi dampak yang negative harus dipikirkan juga disamping manfaat yang diperoleh. Sehingga ditekankan pengaruhnya terhadap masyarakat dan lingkungan hidup sekitar.

Karena kompleksnya masalah dari pengaruh yang ditimbulkan oleh sektor pariwisata, pengembangan yang tidak teratur dan terarah dapat merugikan masyarakat serta dapat merusak lingkungan hidup. Di sinilah pentingnya peraturan dan kesadaran untuk melaksanakan pembangunan khususnya sektor pariwisata.

Untuk memperlancar pembangunan nasional, pemerintah sangat memerlukan dana yang besar baik untuk membiayai investasi maupun kebutuhan ekonomi lainnya dan hal ini peran pariwisata dapat memberikan sumbangan pemasukkan yang sangat berarti pada pendapatan negara, adanya kenaikan kunjungan wisatawan lokal maupun wisatawan asing dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan prospek pariwisata tetap cenderung meningkat secara konsisten. Jadi upaya pemerintah dalam menggalakkan sektor pariwisata sangatlah tepat sebagai alternatif pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara.

Dalam rangka untuk mewujudkan keberhasilan dalam upaya pengembangan sektor kepariwisataan secara nasional maka pemerintah merasa perlu mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat memacu keberhasilan program-program pariwisata, tujuh kebijakan yang bermanfaat untuk memacu keberhasilan program pariwisata, yaitu :

- a. Promosi digencarkan
- b. Akseibilitas diperluas
- c. Mutu produk dan pelayanan dimantapkan
- d. Wawasan pariwisata dikembagnkan
- e. Wisata bahari digalakkan
- f. Sumber Daya Manusia ditingkatkan
- g. Sadar Wisata dan Sapta Pesona dibudayakan. (Musaneff, 1995 : 39).

Dengan adanya asas desentralisai yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mempunyai konsekuensi bahwa daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi pariwisata yang ada di dalamnya, serta menetapkan dan mengusahakan sendiri upaya-upaya untuk pengembangan.

Pada daerah yang telah melaksanakan asas desentralisasi dimungkinkan mempunyai kewenangan yang menyangkut penentuan perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan dan serta menyediakan perangkat-perangkat dan alat perlengkapan untuk membangun daerah. Asas tersebut dijalankan karena pemerintah pusat menghendaki agar sebagian urusan

pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah, yang selanjutnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya.

Dengan adanya wewenang tersebut, pemerintah diberi wewenang untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengatur segala bentuk usaha yang akan dilakukan dalam bentuk segala bidang. Dalam hal ini, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan, dituntut lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengkoordinasian kepada seluruh jajaran industri pariwisata di daerah. Dalam pengembangan sektor kepariwisataan di daerah ada empat hal penting yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Usaha pariwisata yang meliputi obyek pariwisata dan sarana prasarana yang lainnya.
2. Promosi dan informasi pariwisata yang meliputi paker-paket wisata, marketing obyek pariwisata, dan nilai-nilai atraktif yang bias dijual.
3. Transportasi yang meliputi fasilitas dan usaha transport yang memudahkan semua wisatawan untuk mencapai obyek wisata tersebut.
4. Keamanan dan kenyamanan.

Salah satu bidang pengembangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota Blitar adalah pengembangan pada sektor pariwisata. Untuk mewujudkan tujuan pengembangan pembangunan sektor pariwisata, pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan potensi pariwisata yang ada di daerah, sehingga dapat dikelola secara maksimal.

Di mana kita tahu bahwa Kota blitar sudah sangat terkenal dengan kota proklamator, di mana di Kota Blitar terdapat makam Presiden pertama Republik Indonesia, biasa disebut makam proklamator dan itu sudah menjadi *icon* kota Blitar. Selain itu ada lagi tempat pariwisata yang ada di Kota Blitar yaitu Water Park Sumbur Udel, yang dulunya merupakan pemandian yang biasa-biasa saja sekarang oleh pemerintah kota Blitar diubah seperti layaknya pemandian yang mewah.dari perubahan pemandian yang dulunya biasa saja hingga berubah layaknya pemandian mewah. Tidak hanya itu saja, didekat makam Presiden Pertama ada museum Bung Karno dan perpustakaan Kota Blitar. Ada lagi tempat wisata yang lain di kota Blitar yaitu Wisata Minat Khusus (Pilgrim), Wisata Budaya, Wisata Industri, Wisata Pertanian, Wisata Olahraga, Wisata Cagar Alam

Dalam uraian tersebut penulis merasa tertarik untuk mengetahui seberapa besar dampak yang akan terjadi terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat sekitar dengan adanya pembangunan pariwisata Kota Blitar dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul **“Dampak Pembangunan Sektor Pariwisata Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar”**. (studi kasus pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar)”

B. Rumusan Masalah

Seperti apa yang telah dipaparkan pada uraian di atas bahwa kota Blitar memiliki banyak potensi pariwisata yang dimilikinya. Hal ini juga dapat menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk mengunjungi. Dengan meningkatnya wisatawan tidak menutup kemungkinan permintaan wisatawan terhadap barang dan jasa juga akan bertambah. Dan dengan adanya pembangunan obyek wisata ini dapat pula mengubah sosial ekonomi masyarakat sekitar obyek wisata ini.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang dikemukakan diatas maka permasalahan dalam penelitian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kondisi potensi pariwisata di daerah Kota Blitar?
2. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan pariwisata terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar?
3. Hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi pembangunan sektor pariwisata di Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis kondisi potensi pariwisata di daerah Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan pariwisata terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar.
3. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis hal-hal yang dapat mempengaruhi pembangunan sektor pariwisata di Kota Blitar.

D. Kontribusi penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan atau sumber informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang pembangunan sector pariwisata.
2. Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan dan gambaran bagi kalangan pemerintah dan pelaku (*stakeholder*) yang terlibat pada pelaksanaan kegiatan pembangunan pada sector pariwisata.
3. Sebagai bahan kajian dan menambah wacana keilmuan bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya pada bagian administrasi pembangunan.
4. Sebagai salah satu alat baki penulis untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pariwisata.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi ke dalam beberapa sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, mengemukakan secara garis besar teoritis yang menjadi dasar bagi penulis dalam memeberikan alternatif solusi atas segala permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut antara lain (pembangunan, administrasi pembangunan, pariwisata, kepariwisataan, wisata, wisatawan, masyarakat, pembangunan masyarakat, sosiokultural)

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini disajikan deskripsi wilayah penelitian yang digunakan dengan mengemukakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, selanjutnya

penyajian data dan tentang gambaran umum lokasi penelitian serta menginterpretasikan data tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang mungkin dapat penulis berikan atas adanya permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi

Herbert A.Simon (1993:3), mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Leonard D.White dalam buku Inu Kencana Syafie dkk (1999), mendefinisikan administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Dwight Waldo (1971), mendefinisikan administrasi adalah suatu daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. Dimock & Dimock (1992:20), mengatakan bahwa suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur manajemen.

Selanjutnya S.P. Siagian (2004:2), mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. The Liang Gie (1993:9), mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa definisi tersebut di atas, maka penulis mencoba merumuskan definisi administrasi untuk ikut berpartisipasi dalam merumuskan definisi administrasi sebagai bahan diskusi selanjutnya. Adapun yang dimaksud administrasi dalam tulisan ini adalah sebagai berikut : “ *Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien,dan rasional*”.

2. Pengertian publik

Publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris "*publik*" yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat. Nampaknya kata "publik" diterjemahkan oleh beberapa kalangan berbeda-beda sebagaimana kepentingan mereka. Misalnya kata "*Publik Administration*" diterjemahkan menjadi "Administrasi Negara".

Syafi'ie dkk. (1999:18), mengatakan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Disisi lain H. George Frederickson (1997:46), menjelaskan konsep "publik" dalam lima perspektif, yaitu :

- a. Publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat.
- b. Publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri.
- c. Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik diwakili melalui "suara".
- d. Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya juga dianggap sebagai publik.
- e. Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting.

Dengan demikian, definisi-definisi tersebut sesungguhnya menjelaskan bahwa publik adalah sekumpulan masyarakat yang memiliki kebersamaan dalam berpikir dan bertindak secara benar yang diwujudkan dalam suatu proses interaksi sosial yang melahirkan kepentingan masyarakat. Selain itu publik juga berperan sebagai warga negara yang ikut serta dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara.

3. Pengertian Administrasi Publik

Chandler & Plano dalam Keban (2004:3), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan,

dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler & Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur "*publik affairs*" dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

Menurut Nigro & Nigro mengemukakan bahwa "administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislative, dan eksekutif, mempunyai peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari proses politik, yang sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta dan berkaitan erat dengan beberapa kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat".

Definisi ini lebih menekankan proses institusional yaitu bagaimana usaha kerja sama kelompok sebagai kegiatan publik yang benar-benar berbeda dengan dari kegiatan swasta.

Kemudian Resenbloom memberikan batasan administrasi publik sebagai pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi mandate pemerintah di bidang legislative, eksekutif dan yudikatif dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. Definisi ini menekankan aspek proses institusional atau kombinasi ketiga jenis kegiatan pemerintah yaitu eksekutif, yudikatif dan legislative. Pendapat lainnya juga telah dikemukakan oleh Nicholas Henry yang memberikan batasan bahwa:

"administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosikan pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan social. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan efektivitas, efisiensi dan pemenuhan secara lebih baik kebutuhan masyarakat".

Dengan demikian, definisi ini melihat bahwa administrasi publik merupakan kombinasi teori dan praktek yang mencampuri proses manajemen dengan pencapaian nilai-nilai normative dalam masyarakat.

4. Peran Administrasi Publik

Peran administrasi publik dapat dilihat dari pernyataan Walter Weyl bahwa pemerintahan dapat menyengsarakan masyarakat kalau menerapkan

administrasi publik dengan gaya shadow democracy. Sebaliknya Frederick A. Cleeland justru menunjukkan peran administrasi publik sangat vital dalam membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya, menerapkan teknik efisiensi dan efektifitas dan lebih menguntungkan lagi manakala pemerintah dapat mencerahkan masyarakat untuk menerima dan menjalankan sebagian dari tanggung jawab administrasi publik tersebut, sehingga berbentuk apa yang disebut *organized democracy*.

Gray (1989: 15-16) menjelaskan peran administrasi publik dalam masyarakat sebagai berikut:

- a. Administrasi publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan.
- b. Administrasi publik melindungi hak-hak masyarakat atas pemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi masyarakat atas pemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk meleksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia.
- c. Administrasi publik berperan melestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi itu dari generasi ke generasi berikutnya, serta memberikan jaminan dan dukungan sumber-sumber sehingga nilai-nilai tersebut mampu tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan perubahan zaman, serta dapat terus hidup bersama secara damai, serasi dan selaras dengan budaya lain di lingkungannya.

Orientasi administrasi publik menurut Thoha (2005:53), sekarang ini diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan pada rakyat. Alasan seperti itu teori administrasi publik lebih manekankan pada program aksi yang berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga eksistensi administrasi publik tidak hanya sekedar lukisan saja melainkan adanya manfaat bagi kepentingan publik. Jadi administrasi publik lebih menekankan pada peranan publik untuk mencapai tujuan.

Oleh karena itu, administrasi publik merupakan medan dimana para aparat pemerintah atau eksekutif melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan sektor publik khususnya penyediaan pelayanan bagi kepentingan publik maka peran administrasi publik sangat menentukan kestabilan, ketahanan, dan kesejahteraan suatu Negara. Selain itu, administrasi publik juga dapat dilihat

sebagai ajang dimana dapat disaksikan atau dibuktikan apakah benar para elit-elit birokrasi dan politisi memenuhi janji-janjinya atau membuktikan komitmennya kepada publik yang telah memilih mereka. Karena itu, administrasi publik juga sangat berperan dalam menjaga *public trust*.

B. Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi pembangunan.

Administrasi pembangunan merupakan salah satu bagian dari administrasi Negara. Administrasi pembangunan ini mempunyai fokus analisis berupa proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu negara dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan menyingkirkan ancaman (Siagian: 2005).

Selanjutnya, Siagian (2005) menyebutkan definisi dari administrasi pembangunan yaitu sebagai suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Selain itu, Tjokroamidjojo dalam Siagian (2005) menyebutkan bahwa administrasi pembangunan adalah proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Dari definisi tersebut dapat diketahui tentang ide pokok dari administrasi pembangunan, yaitu: (1) adanya suatu proses yang terus menerus; (2) usaha yang dilakukan dengan perencanaan; (3) orientasi pada perubahan yang signifikan dari keadaan sebelumnya, (4) memiliki arah yang lebih modern dalam artian luas mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara; dan (5) memiliki tujuan utama untuk membina bangsa. Dalam tulisan lainnya, Kristiadi (2008) menyebutkan tentang administrasi pembangunan yang melihat dari sisi tujuan administrasi pembangunan itu sendiri, yaitu bahwa tujuan administrasi pembangunan adalah untuk mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah untuk melayani masyarakat dengan melakukan kegiatan investasi (mengganti atau menambah aktiva tetap), dari sini administrasi pembangunan tersebut akhirnya

akan dapat membantu pemerintah dalam pelaksanaan peningkatan administrasi pemerintahan.

C. Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Istilah pembangunan sudah tidak asing lagi bagi setiap warga negara, bagi negara berkembang khususnya, pembangunan selalu menjadi fokus utama kegiatan negara dan telah menjadi sesuatu yang dapat memotivasi untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Bryant dan White (2005) yang mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya.

Pada dasarnya pengertian pembangunan ialah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan dan mengadakan perubahan-perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. (Lemhannas 1997:5) Sedangkan Sondang Piagian pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa dalam rangka pembangunan bangsa (*national building*) (Siagian 1999:4). Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

Secara umum hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia dan pembangunan seluruh masyarakat. Hakikat pembangunan ini mengandung makna bahwa pembangunan nasional mengejar keseimbangan, keseraian dan keselarasan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah. Pembangunan nasional yang berkesinambungan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, sehingga senantiasa mampu mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup lahir dan batin. Dalam pembangunan nasional manusia merupakan titik sentral, yang berarti yang berarti bahwa seluruh kegiatan pembangunan nasional harus diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Dimana pembangunan didefinisikan sebagai proses untuk melakukan perubahan. (Tjokrowinoto dalam Suryono 2001:4) menyimpulkan bahwa:

- a. Pembangunan merupakan proses perubahan sosial menuju tataran kehidupan yang lebih baik

- b. Pembangunan merupakan upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga
 - c. Pembangunan merupakan proses sosial yang bebas nilai.
- Bryant dan White menyebutkan terdapat 5 (lima) implikasi yang perlu

diperhatikan dalam definisi pembangunan tersebut, yaitu:

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu atau kelompok (*capacity*);
- b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem nilai dan kesejahteraan (*equity*);
- c. Pembangunan berarti mendorong kepercayaan pada masyarakat untuk membangun dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*);
- d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan dan membangun secara mandiri (*sustainability*); dan
- e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu terhadap negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan (*simbiosis mutualis*) dan saling menghormati (*interdependensi*).

Selanjutnya, menurut Siagian dalam Suryono (2004:21) disebutkan bahwa pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Siagian mengemukakan beberapa ide pokok dalam pembangunan yaitu:

- a. Pembangunan merupakan suatu proses;
- b. Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan;
- c. Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan;
- d. Pembangunan mengarah kepada modernitas;
- e. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; dan
- f. Proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Dari sudut pandang yang berbeda, Kant menganggap bahwa pembangunan adalah perubahan dari suatu kondisi nasional tertentu kepada kondisi nasional yang lain yang dianggap lebih menyejahterakan.

Dengan demikian, definisi-definisi tersebut sesungguhnya menjelaskan bahwa pembangunan adalah suatu proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya, yang dilakukan secara sadar dan terencana yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Selain

itu, dengan pembangunan diharapkan suatu negara tersebut bisa meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya.

2. Penyelenggaraan Pembangunan

Suatu negara khususnya negara berkembang, melakukan berbagai upaya pembangunan. Pembangunan yang dilakukan mencakup berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pembangunan itu Sondang P. Siagian menyatakan bahwa ada lima tataran yang harus diketahui (Sondang 1984:29-30) :

- a. Pembangunan pada dirinya mengandung perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi yang kini ada.
- b. Pengertian pembangunan inheren dengan pertumbuhan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan disini ialah kemampuan suatu negara bangsa untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif
- c. Pembangunan ialah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Artinya keadaan yang lebih baik, yang didambakan suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan.
- d. Jika di terima pendapat bahwa pembangunan merupakan rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar, konotasinya ialah bahwa pembangunan itu didasarkan pada suatu rencana yang tersusun secara rapi dalam kurun waktu tertentu.
- e. Pembangunan bermuara pada titik akhir tertentu.

3. Tipe Pembangunan

Pembangunan terdiri dari beberapa tipe, dalam kaitannya dengan pembangunan secara terencana dan perencanaannya berorientasi terhadap pertumbuhan menurut Edward W dan Tjokrowinoto (1980 : 22) menyebutkan 8 tipe, yaitu : tipe ideal, tipe menghasilkan dalam jangka pendek, tipe menghasilkan dalam jangka panjang, tipe kegagalan, tipe dorongan lingkungan, tipe pragmatis, tipe krisis, tipe masyarakat statis.

4. Konsep Pembangunan

Secara ensiklopedik kata pembangunan telah menjadi konsep dunia, konsep tersebut antara lain dianalogkan dengan konsep: pertumbuhan (*growth*), rekonstruksi, modernisasi, pembebasan, pembaharuan dan masih banyak lagi konsep pembangunan, dari kesemua konsep tersebut menunjuk pada suatu ciri-ciri khas yang melekat pada kata pembangunan.

Konsep pembangunan berkaitan erat dengan sistem nilai, gerakan, metode, strategi, dan indikator yang menjadi dominan pada setiap negara

berkembang. Pembangunan sering didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil per kapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya (Kartasasmita: 2006).

Selain itu, Suryono (2004:26) menyebutkan tentang tinjauan terhadap konsep pembangunan dengan cara mengkaji dari dua aspek penting, yakni secara etimologik dan secara ensiklopedik.

“Secara etimologik, istilah pembangunan berasal dari kata *bangun*. Kata *bangun* setidaknya mengandung 4 arti: (1) bangun dalam arti sadar atau siuman (aspek fisiologis), (2) bangun dalam arti bangkit atau berdiri (aspek perilaku), (3) bangun dalam arti bentuk (aspek anatomi), (4) bangun dalam arti kata kerja membuat, mendirikan, atau membina (gabungan aspek fisiologi, aspek perilaku, dan aspek bentuk). Sedangkan secara ensiklopedik, kata pembangunan telah menjadi bahasa dan konsep dunia. Konsep itu antara lain dianalogkan dengan konsep: pertumbuhan (*growth*), rekonstruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*), westernisasi (*westernization*), perubahan sosial (*social change*), pembebasan (*liberation*), pembaruan (*innovation*), pembangunan bangsa (*nation building*), pembangunan nasional (*national development*), pembangunan (*development*), pengembangan (*progress/developing*), dan pembinaan (*construction*)”.

Dalam pelaksanaannya, konsep pembangunan (*development concept*) dianggap lebih sesuai untuk dijadikan acuan dalam penulisan ini. Konsep pembangunan diartikan sebagai perubahan sikap hidup yang semakin rasional dan penerapan teknologi yang semakin meningkat. Seiring dengan perkembangan zaman, konsep pembangunan akhirnya berkembang dan lebih dipengaruhi pada paham tentang ekonomi politik.

Ekonomi memegang peranan penting dalam laju pertumbuhan. Terdapat dua cara yang bisa dipakai sebagai acuan dalam perkembangan pembangunan ekonomi politik melalui pendekatan industrialisasi, yaitu:

- a. Pemusatan perhatian pada faktor penggunaan teknologi tinggi dan ilmu pengetahuan,
- b. Upaya untuk menggerakkan potensi dalam negeri dan menggunakan teknologi tradisional dan tepat guna.

Menurut konsep pembangunan ini, pembangunan tidak hanya diberlakukan perubahan tentang ekonomi politik saja, tetapi termasuk juga dalam perubahan kelembagaan yang ada dalam struktur sosial masyarakat. Dari munculnya konsep pembangunan tersebut akhirnya dapat dirumuskan tentang

strategi pembangunan yang akan digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam perencanaan pembangunan nasional.

Konsep pertumbuhan adalah suatu konsep yang memandang pembangunan dari sudut pandang ekonomi, suatu Negara dikatakan telah membangun bila dalam Negara tersebut telah terjadi kenaikan pendapatan perkapita penduduk. Konsep ini dipelopori oleh Rostow yang terkenal dengan teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Dalam teori tersebut Rostow menyatakan ada lima tahapan pertumbuhan penduduk dari "Tahap masyarakat tradisional, tahap tradisional, tahap tinggal landas, tahap pemantapan, tahap konsumsi masa tinggi". (Suryono 2004:26).

Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi dari tahap yang satu ketahapan yang lebih tinggi maka diperlukan adanya pendorong pertumbuhan ekonomi yang oleh Todaro disebutkan ada faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- a. Akumulasi modal termasuk investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik, dan sumberdaya manusia.
- b. Pertambahan penduduk dalam arti peningkatan tenaga kerja baik secara kualitas maupun kuantitas.
- c. Kemajuan teknologi, yaitu hasil cara baru yang telah diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. (Michael P. Todaro, 1998:26)

Konsep rekonstruksi adalah konsep untuk menggambarkan upaya suatu bangsa untuk memulihkan kondisi ekonomi negaranya yang rusak akibat adanya krisis dan peperangan. Konsep ini sangat terkenal pada masa pasca perang dunia II, dimana banyak Negara-negara di Eropa yang rusak berat karena peperangan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat yang terkenal dengan Marshal Plann yang juga disebut dengan teori autharki (Suryono 2004:28). Teori autarki tersebut berpendapat "Negara maju mempunyai kewajiban untuk membantu memulihkan perekonomian negara-negara yang porak poranda akibat perang. Untuk itu ada empat macam jenis bantuan yang ditawarkan oleh Negara maju antara lain: bantuan politik, bantuan ekonomi, bantuan militer dan bantuan tenaga ahli.

Konsep modernisasi adalah istilah yang sangat terkenal dalam konsep pembangunan. Modernisasi merupakan upaya merubah cara-cara produksi tradisional ke arah penggunaan teknologi canggih. Modernisasi adalah "penerapan

pengetahuan ilmiah yang ada pada semua aktivitas, semua bidang kehidupan atau semua aspek-aspek dalam masyarakat.”(Suryono 2004:29)

Konsep pembebasan adalah suatu konsep pembangunan tentang bagaimana membebaskan manusia dari belenggu ketidakberdayaan akibat kemiskinan dan ketidakadilan. Jika manusia telah terlepas dari belenggu ketidakberdayaan maka manusia dapat menciptakan keselarasan dan keserasian keluar, sedangkan ke dalam mereka mampu mewujudkan keseimbangan. Agus Suryono mendefinisikan konsep pembebasan ini sebagai “proses penilaian kembali terhadap keadaan setiap kelompok masyarakat dan melakukan perbaikan kualitatif, baik secara kelompok maupun individu”.(Suryono 2004:32)

Konsep pembebasan dipandang lebih cocok dalam mendefinisikan pembangunan karena:

- a. Pembangunan terlalu menekankan pada efisiensi sehingga baik upaya mencapainya maupun hasil-hasilnya banyak dikendalikan oleh kaum elite yang menguasai teknologi, sementara golongan masyarakat bawah yang miskin, bodoh akan terpinggirkan dan tidak akan dapat berperan di dalamnya.
- b. Pembangunan menolak adanya kekerasan sebagai satu hal yang tidak konstruktif dan juga mengutuk kekerasan sebagai suatu pola perubahan yang dianggap sah, legal dan wajar.(Suryono 2004:32)

Konsep pembaharuan adalah konsep pembangunan yang erat kaitannya dengan modernisasi dan perubahan sosial. Pembaharuan ini didorong oleh adanya penemuan-penemuan baru. Menurut Agus Suryono, “istilah pembaharuan bisaanya digunakan untuk menunjukkan penciptaan teknik unggul dan juga penerapan teknik impor dari luar”.(Suryono 2004:33). Dalam melakukan pembaharuan diperlukan adanya orang-orang yang mempunyai pemikiran yang maju, berani mengambil resiko, orang-orang yang demikian itulah yang oleh Piere disebut sebagai orang genius. Orang-orang itu senantiasa berusaha mencari alternatif-alternatif baru dalam memecahkan suatu permasalahan, orang-orang semacam ini oleh Piere dalam (Agus Suryono 2004:33) disebut sebagai inovator.

Dari uraian tersebut di atas maka disimpulkan pembangunan adalah:

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu atau kelompok (*capacity*).
- b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan system nilai dan kesejahteraan (*equity*).
- c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada

padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*)

- d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).

Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu terhadap Negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependensi*). (Bryant dan White dalam Suryono 2004:35)

5. Persyaratan Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik dari kondisi yang ada pada saat ini, mencapai maksud tersebut sudah barang tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Menurut Agus Suryono setidaknya ada lima persyaratan pembangunan yaitu:

- a. Kemampuan
- b. Kebersamaan
- c. Kekuasaan
- d. Ketahanan
- e. Saling ketergantungan (Agus Suryono, 2004, h.37)

Suatu bangsa tidak akan dapat melaksanakan pembangunan bila Negara tersebut tidak mempunyai kemampuan yang handal, sebesar apapun kekayaan yang dimiliki suatu bangsa namun tanpa didukung dengan kemampuan yang memadai maka kekayaan tersebut tidak akan banyak bermanfaat dalam pembangunan Negara tersebut. Kemampuan disini meliputi kemampuan fisik, kemampuan mental dan kemampuan spiritual.

Pembangunan suatu bangsa juga tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kekuasaan. Kekuasaan ini berarti memberi keleluasaan dan kesempatan pada masyarakat untuk secara bebas memilih berbagai alternatif sesuai dengan tingkat kesadaran, kemampuan, dan keinginan masyarakat. Di samping itu kekuasaan juga berarti memberi kesempatan pada masyarakat untuk belajar dari pengalaman yang pernah mereka alami baik itu kegagalan maupun keberhasilan mereka dalam merespon perubahan-perubahan.

Kemandirian adalah syarat yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Kemandirian ini mempunyai dimensi yang sangat luas, hal ini dikarenakan faktor-faktor pendukung pembangunan sangat ketersediaannya sementara kebutuhan akan pembangunan semakin meningkat. Hal ini menuntut

suatu bangsa untuk mampu mengelola sumber-sumber yang sangat terbatas tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan demikian pada suatu saat yang bersangkutan mampu berkembang secara mandiri dan mampu mencapai sukses berikutnya.

6. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan salah satu bagian dari administrasi Negara. Administrasi pembangunan ini mempunyai fokus analisis berupa proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu negara dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan menyingkirkan ancaman (Siagian: 2005).

Selanjutnya, Siagian (2005) menyebutkan definisi dari administrasi pembangunan yaitu sebagai suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Selain itu, Tjokroamidjojo dalam Siagian (2005) menyebutkan bahwa administrasi pembangunan adalah proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Dari definisi tersebut dapat diketahui tentang ide pokok dari administrasi pembangunan, yaitu: (1) adanya suatu proses yang terus menerus; (2) usaha yang dilakukan dengan perencanaan; (3) orientasi pada perubahan yang signifikan dari keadaan sebelumnya, (4) memiliki arah yang lebih modern dalam artian luas mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara; dan (5) memiliki tujuan utama untuk membina bangsa.

Dalam tulisan lainnya, Kristiadi (2008) menyebutkan tentang administrasi pembangunan yang melihat dari sisi tujuan administrasi pembangunan itu sendiri, yaitu bahwa tujuan administrasi pembangunan adalah untuk mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah untuk melayani masyarakat dengan melakukan kegiatan investasi (mengganti atau menambah

aktiva tetap), dari sini administrasi pembangunan tersebut akhirnya akan dapat membantu pemerintah dalam pelaksanaan peningkatan administrasi pemerintahan.

Kovner dalam Anonymous (2006) menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) peran pemerintah dalam pembangunan, yaitu sebagai (1) regulator, (2) pemberi biaya, dan (3) pelaksana kegiatan. Pertama, peran pemerintah sebagai regulator merupakan hal penting, dalam hal ini pengaturan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan tidak bisa begitu saja dibiarkan tanpa adanya campur tangan pemerintah.

Kedua, bukan hanya pemerintah yang bertindak sebagai penyedia biaya dalam pembangunan, tetapi masih ada pihak swasta yang juga memberikan peran yang sangat kuat dalam pembangunan. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah menjadikan peran swasta ini lebih muncul di permukaan. Meskipun demikian, swasta juga tidak akan pernah ada tanpa persetujuan dari pemerintah.

Ketiga, pemerintah sebagai pelaksana kegiatan. Artinya pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan tentang adanya pelaksanaan suatu program perencanaan dalam pembangunan yang sedang dijalankan. Dalam pelaksanaannya pemerintah tidak akan berjalan tanpa ada kekuatan dari masyarakat dan adanya peran dari swasta.

Dalam uraian di atas kota blitar melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Akan tetapi pembangunan sector pariwisata yang menjadi pembangunan yang sangat penting, karena dengan adanya pembangunan sector pariwisata akan mendapatkan devisa bagi Negara dan PAD bsgi daerah masing-masing.

7. Perkembangan Paradigma dan Strategi Pembangunan

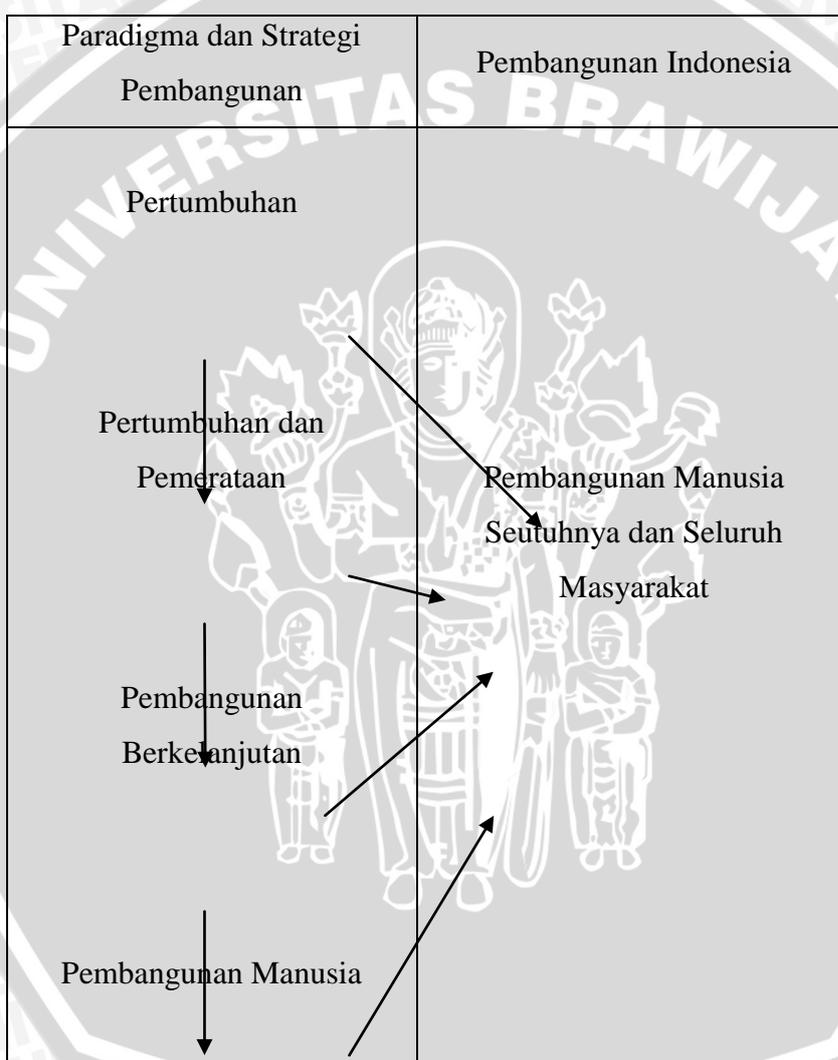
Paradigma dimaksudkan sebagai cara pandang terhadap suatu persoalan yang di dalamnya terdapat sejumlah asumsi, teori, metodologi, model, dan solusi tertentu. Sedangkan strategi dimaksudkan sebagai seni dan ilmu untuk mendistribusikan dan menggunakan sarana-sarana untuk kepentingan tertentu.

Secara konseptual, perkembangan suatu paradigma sangat bergantung pada bagaimana strategi yang dijalankan dalam suatu proses pembangunan. Secara umum, pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara berkembang

merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan modernisasi bangsa guna meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut alur dalam teori pembangunan yang berkaitan dengan paradigma dan strategi pembangunan dalam suatu negara berkembang, seperti di Indonesia (Suryono, 2004:84)

Gambar 1 : Paradigma dan Strategi Pembangunan.



Pada gambar tersebut alur perkembangan pembangunan dijelaskan bahwa untuk mengejar ketinggalan suatu negara diterapkan konsep pembangunan yang disebut dengan paradigma pertumbuhan. Paradigma pertumbuhan ini lebih menekankan kuantitas bukan pada kualitas dari pembangunan itu sendiri, dalam hal ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan

nasional. Pertumbuhan pendapatan ini sesungguhnya bertujuan untuk pemerataan dalam berbagai sektor, seperti pendapatan, kesehatan, keadilan, pendidikan, kewirausahaan, keamanan, kesejahteraan sosial, maupun pelestarian lingkungan yang ditandai oleh perubahan struktur ekonomi dan sosial.

Perkembangan selanjutnya adalah munculnya sebuah konsep baru setelah adanya pembangunan berkelanjutan, yaitu konsep pemberdayaan. Latar belakang munculnya konsep pemberdayaan ini tidak lain dikarenakan adanya paradigma pembangunan yang menempatkan negara yang terlalu dominan dalam melaksanakan pembangunan, posisi sentral negara terlihat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan (Soetrisno, 1995:135).

Selanjutnya berupa pembangunan manusia, dalam hal ini peneliti mengambil paradigma pembangunan manusia, fokus dari paradigma ini yaitu berpusat pada manusia yakni perkembangan manusia, kesejahteraan, keadilan, dan berkelanjutan. Dikarenakan pembangunan pariwisata merupakan pembangunan yang sangat menguntungkan, dimana keuntungan tersebut dapat dirasakan oleh pemerintah daerah itu sendiri dan masyarakat sekitar daerah pariwisata. Hal ini dapat berupa peningkatan kesejahteraan dimana masyarakat sekitar dapat bekerja dan otomatis pendapatan akan naik sehingga kesejahteraan dapat diperoleh. Seperti fokus dari paradigma pembangunan manusia yang mengarah kepada pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat.

D. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Jika ditinjau dari segi Etimologis, kata pariwisata berasal dari bahasa sansakerta, sebagaimana diungkapkan oleh Yoeti (1996 : 112) bahwa :

“pariwisata terdiri dari dua kaya yaitu “pari” dan “wisata”. Pari yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar lengkap, dan wisata berarti perjalanan, bapergian. Atas dasar itulah maka pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputer-puter dari suatu tempat ketempat lainnya”.

Sejalan dengan pendapat diatas, Pendit (1987 : 10) menyatakan bahwa :

“Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok sebagai usaha

untuk mencari keseimbangan atau keserasia dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi social, budaya, alam, dan ilmu”.

Pada dasarnya pariwisata selalu terkait dengan aspek-aspek atau factor-faktor lain, seperti aspek-aspek kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep pariwisata dari dirjen pariwisata (1989 :3) yang dikaitkan dengan kehidupan masyarakat, yaitu :

“Pariwisata merupakan seluruh kegiatan wisatawan dalam perjalanan dan persinggahannya, sementara dengan motivasi yang beraneka ragam yang menimbulkan permintaan akan barang dan jasa dan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat di daerah atau Negara tujuan wisata, yang di dalam proses secara keseluruhan menimbulkan pengaruh terhadap kehidupan ekonomis, sosial, budaya, politik dan hankam nasional untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan bangsa dan Negara”

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang dalam melakukan perjalanan untuk sementara waktu yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk menikmati perjalanan dengan keinginan yang beraneka ragam yang dapat menimbulkan akan permintaan barang dan jasa, sehingga dalam proses tersebut berpengaruh terhadap kehidupan ekonomis, sosial, budaya, politik dan hankam nasional untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan.

2. Pengertian Kepariwisataan

Kepariwisataan lebih menitik beratkan pada tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam memperbaiki potensi wisata disuatu daerah untuk meningkatkan pendapatan atau pemasukkan bagi daerah atau devisa Negara. Oleh karena itu kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan peringgahan pariwisata (Marpaung, (1994 : 59)

Sedangkan K Kraft sebagaimana yang telah dikutip oleh Richard S (2000 : 6) dinyatakan bahwa, “kepariwisataan adalah keseluruhan dan fenomena yang timbul dari perjalanan dan tinggalnya manusia ayng bertujuan tidak untuk membangun atau menciptakan tempat tinggal tetap”. Hal ini juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Herman V, Sculalard dalam Richard S (2000 : 6) yang dinyatakan bahwa, “kepariwisataan adalah sejumlah terutama kegiatan

yang bersifat ekonomis, yang secara langsung berkaitan dengan masuk, tinggal dan Bergeraknya orang-orang asing dalam suatu Negara, kota, ataupun wilayah”.

Dengan melihat dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam menyiapkan segala sesuatu kebutuhan para wisatawan dalam melakukan perjalanannya. Kepariwisataan juga berkaitan langsung dengan masuk dan tinggalnya orang-orang asing pada suatu wilayah atau daerah atau kota tertentu, tetapi tidak untuk menetap.

Secara garis besar ruang lingkup kepariwisataan mencakup transportasi, akomodasi, organisasi, perencanaan dan pengelolaan obyek wisata dan pemasarannya. Pengembangan kepariwisataan merupakan suatu kegiatan multi sektoral sehingga dalam penanganannya bukan merupakan suatu perkara yang mudah. Karena dalam pengembangan kepariwisataan berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi yang terkait dengan sumber penerimaan bagi Negara atau daerah. Tidak hanya itu kegiatan kepariwisataan apat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitardaerah wisata. Oleh karena itu harus ada kerjasama yang baik antara semua pihak baik dari masyarakat dan pemerintah, sehingga kepariwisataan dapat berhasil dengan baik.

3. Pengertian Wisatawan

Wisatawan menurut James Spillane dalam Prajogo (1989 : 21) adalah, “Setiap orang yang berpargian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati kunjungan itu”.

Pada dasarnya wisatawan berkaitan langsung dengan individu atau pelaku wisata. Hal ini sesuai dengan pendapat G. A Scomoll dalam Yoeti (1996 : 139) menyatakan bahwa :

“Wisatawan adalah individu atau kelompok yang mempertimbangkan dan merencanakan tenaga beli yang dimilikinya untuk perjalanan rekreasi dan berlibur, yang tertarik pada perjalanan pada umumnya dengan motivasi perjalanan yang pernah dia lakukan menambah pengetahuan, tertarik oleh pelayanan yang diberikan oleh suatu daerah tujuan wisata yang dapat menarik pengunjung dimasa yang akan datang”.

Sedangkan menurut P. W Ogliye dalam Yoeti (1983 : 129) menyatakan bahwa “Wisatawan adalah semua orang yang memenuhi dua syarat, yaitu pertama, mereka meninggalkan rumah kediamannya untuk jangka waktu

kurang dari satu tahun, yang kedua, bahwa sementara mereka pergi dan mengeluarkan uang ditempat yang mereka kunjungi tanpa mencari nafkah di tempat tersebut.

Sedangkan arti wisatawan menurut International Union Off Official Travel seperti yang dikutip oleh Pendit (1994 : 48) yaitu:

Seseorang atau setiap orang yang mengadakan perjalanan selama 24 jam atau lebih dalam suatu Negara yang lain dari pada yang biasanya ia tinggal dengan tujuan untuk menggunakan waktu senggang untuk rekreasi, berlibur, untuk keperluan kesehatan, untuk menjalankan ibadah, mauppun olah raga. Disamping itu untuk keperluan usaha, kunjungan keluarga, dan menjalankan tugas-tugas konfrensi.”

Sedangkan menurut Dirjen Pariwisata memberi batasan mengenai konsep wisatawan yang hamper sama dengan pendapat International Union Off Official Travel, dimana Dirjen Pariwisata(1995 : 4) menyatakan bahwa : “wisatawan adalah orang-orang yang melakukan kegiatan wisata dengan tujuan berlibur, rekreasi, keperluan kesehatan, dan olah raga, memperluas pengetahuan dan pengalaman, kunjungan keluarga, perjalanan religius, keperluan usaha dan menghadiri konfrensi”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wisatawan merupakan orang-orang yang melakukan perjalanan karena adanya dorongan-dorongan baik dari individu, kelompok atau masyarakat yang dapat berupa kepentingan ekonomi, social, budaya, politik, agama, kesehatan dan kesejahteraan maupun yang bersifat sekedar ingin tahu untuk memperluas ilmu pengetahuan dan pengalaman.

4. Pengertian Potensi Wisata

Potensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994 : 784) adalah “kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan daya.

Sesuai dengan pengertian tersebut. Maka yang dimaksud dengan potensi wisata adalah segala kemampuan atau daya yang dimiliki yang dapat diolah atau dimanfaatkan sebagai obyek wisata yang dapat dinikmati keindahannya. Potensi wisata ini dapat berupa obyek wisata pantai, taman rekreasi dan pemandian, wisata air terjun serta wisata alam (gunung). Pengolahan atau pemanfaatan ini juga harus memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagai tempat terdapatnya obyek wisata. Pemanfaatan potensi ini harus dilakukan

denagan etika dan niat yang baik agar bermanfaat, karena pemanfaatan yang salah akan menjadikan potensi itu tidak berguna dan merugikan pihak lain.

5. Jenis-jenis Pariwisata

Setiap daerah pasti memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan untuk menarik minat para wisatawan untuk pengembangan pariwisata sendiri, perlu dibedakan jenis pariwisata itu sendiri, sehingga pengembangannya dapat terwujud seperti apa yang diharapkan. Menurut Direktorat Jendral Pariwisata (1989 : 9) jenis-jenis atau sumber pariwisata digolongkan menjadi tiga bagian yaitu :

- a. Sumber-sumber yang bersifat alamiah atau obyek wisata alam seperti iklim, pemandangan alam, lingkungan hidup, flora, fauna, kawah, danau, sungai, karang ikan dibawah laut, goa-goa, lembah, tebing, gunung, dan sebagainya.
- b. Sumber-sumber buatan manusia atau obyek wisata buatan manusia seperti sisa-sisa peradaban manusia di masa lampau, monument sejarah dan sebagainya.
- c. Sumber-sumber yang bersifat manusia atau obyek budaya seperti tari-tarian, sandiwara, drama, upacara-upacara, peristiwa penting dan sebagainya.

Tidak hanya itu, jenis pariwisata secara garis besar menurut Spillane (1985 : 29) antara lain :

- a. Pariwisata untuk menikmati perjalanan
- b. Pariwisata untuk menikmati rekreasi
- c. Pariwisata untuk kebudayaan
- d. Pariwisata untuk olah raga
- e. Pariwisata untuk usaha dagang
- f. Pariwisata untuk berkonvensi

Sedangkan jenis-jenis pariwisata menurut Ndrahu (1983 : 7) dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Keindahan nilai budaya, hal ini berupa keindahan kesenian seperti seni ukir kayu, kulit maupun logam, seni batik dan songket, seni tari serta seni serta seni musik tradisional yang keseniannya ini beraneka ragam coraknya antar tiap-tiap daerah juga dapat berwujud peninggalan sejarah baik berupa candi-candi, pura-pura maupun keraton serta warisan adat-istiadat maupun dari kehidupan asli setempat yang berbeda-beda.
- b. Keindahan alam, inipun tidak kalah menariknya seperti deburan ombak, pasir putih, karang laut, tanah laut, perumahan berundak-undak,

gunung berapi, sumber air panas, air terjun dan macam-macam makanan daerah.

6. Bentuk-bentuk Pariwisata

Pariwisata dapat dipelajari misalnya dari bentuk-bentuk perjalanan yang dilakukan, lamanya perjalanan serta pengaruh-pengaruh ekonomi akibat perjalanan wisata tersebut. Bentuk-bentuk pariwisata menurut James Spillance (1989 : 32)

a. Pariwisata individu dan kolektif

Pariwisata dalam negeri dan pariwisata luar negeri dapat dibedakan jadi dua kategori :

1) *Individual Tourism* / pariwisata perorangan

Pariwisata ini meliputi seseorang atau kelompok orang (teman / keluarga) yang mengadakan perjalanan wisata dengan melakukan sendiri daerah tujuan wisata maupun pembuatan programnya sehingga bebas mengadakan perubahan setiap waktu yang dikehendakai. Seseorang atau kelompok orang tersebut melakukan sendiri semua dalam rangka mendapat perlengkapan serta jasa yang diperlukan.

2) *Organized Collective Tourism* / pariwisata kolektif

Pariwisata ini meliputi sebuah biro perjalanan menurut program jadwal waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk keseluruhan anggota kelompok yang dimaksud. Biro perjalanan ini menawarkan kepada siapa saja yang berminat dengan keharusan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan untuk keperluan perjalanan. Peserta organized tour ini dibebaskan dari segala macam pengurusan karena baik perlengkapan maupun jasa-jasa yang diperlukan telah disediakan oleh penyelenggara perjalanan. Kelompok perjalanan dapat juga diorganisasi untuk keperluan anggota-anggotadari asosiasi yang tidak bersifat mencari keuntungan, seperti klub-klub organisasi profesional, serikat dagang atau bagi anggota staff perusahaan.

b. Pariwisata Jangka Panjang, Pariwisata Jangka Pendek dan Pariwisata Ekskursi

Pembagian menurut lamanya perjalanan dibedakan atas :

1) Pariwisata jangka panjang

Suatu perjalanan yang dilakukan selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Ini mempunyai arti penting bagi tempat-tempat yang dikunjungi lebih-lebih bila terjadi pada jenis rekreasi atau cultural tourism.

2) Pariwisata jangka pendek

Suatu perjalanan yang dilakukan selama satu minggu sampai sepuluh hari. Secara sosiologis, hal tersebut adalah suatu perjalanan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang tidak dapat mengambil liburan panjang.

3) Pariwisata eksekursi

Suatu perjalanan wisata yang tidak lebih dari 24 jam dan tidak menggunakan fasilitas akomodasi.

c. Pariwisata Dengan Alat Angkut

Ada berbagai bentuk pariwisata dengan menggunakan alat angkutan yang dipakai misalnya kereta api, kapal laut, pesawat terbang, bus dan kendaraan umum.

7. Pembangunan Pariwisata

Untuk menggalakan pembangunan perekonomian dalam suatu pertumbuhan yang berimbang, pariwisata diharapkan dapat memegang peranan penting untuk mengembangkan sektor lain secara bertahap. Pertumbuhan yang berimbang itu dapat terjadi sebagai majunya pertumbuhan industri pariwisata yang dikembangkan dengan baik.

Pengembangan pariwisata menurut Musenaf (1995 : 1) adalah “segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan sarana prasarana, barang dan jasa sebagai fasilitas yang diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan.”

Sedangkan James Spillane (1987 : 133) menyatakan bahwa :“pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang terencana secara menyeluruh, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi fisik dan social suatu Negara. Di samping itu rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan kepariwisataan”.

Kebijaksanaan dalam pengembangan pariwisata pada dasarnya sejalan dengan rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu dapat dilihat dari sasaran pengembangan pariwisata, Yoeti (1997 : 33) adalah :

- a. Berusaha memelihara kebudayaan serta tata lingkungan karena hal ini merupakan kekayaan Indonesia yang merupakan suatu daya tarik wisatawan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.
- b. Perbaikan-perbaikan terutama diharapkan pada peningkatan dan rehabilitasi berdasarkan skala prioritas yang ditentukan, baik dari obyek-obyek wisata maupun sarana dan prasarana yang menunjang sektor pariwisata.
- c. Menyelenggarakan suatu pemasaran kepariwisataan yang terkoordinasi dan sistematis dan terarah secara terus-menerus.
- d. Mengadakan pembinaan, bimbingan serta pengadaan tenaga kerja yang terdidik dalam sektor pariwisata.
- e. Menyelenggarakan usaha bidang penelitian pengembangan sehingga dapat mewujudkan suatu mekanisme yang menampung, mengelola data-data kepariwisataan yang penting artinya bagi pengembangan selanjutnya.
- f. Mengadakan pembinaan dan pengaturan kelembagaan, baik sector pariwisata maupun sector pemerintah untuk menunjang pengembangan pariwisata nasional.

Berkaitan dengan pengembangan pariwisata, Yoeti (1996 : 23) berpendapat bahwa :

“Pada dasarnya tujuan dari kebanyakan Negara mengembangkan industri pariwisata di negaranya adalah untuk meningkatkan devisa Negara. Disamping itu tujuan yang lebih jauh adalah untuk memperoleh nilai-nilai ekonomi yang positif di mana pariwisata diharapkan dapat berfungsi sebagai katalisator dalam pembangunan pada beberapa sector”.

Dengan demikian, pariwisata sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan pembangunan suatu bangsa. Pariwisata merupakan suatu bentuk ekspor yang dianggap menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Pariwisata sebagai suatu bentuk ekspor mempunyai peranan penting dalam pembangunan seperti apa yang dikemukakan oleh Spillane dalam Hari Hartono (1989 : 54) bahwa :

“Peranan pariwisata dalam pembangunan wisata pada garis besarnya berintikan tiga segi yaitu segi ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak) segi social (penciptaan lapangan pekerjaan) dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan-wisatawan asing). Ketiga segi tersebut tidak berlaku terhadap wisatawan-wisatawan asing, tetapi juga wisatawan-wisatawan domestik yang kian meningkatkan peranannya”.

Pariwisata diharapkan menjadi sektor andalan yang mampu menggalakan berbagai kegiatan pembangunan terutama ekonomi serta sektor-sektor lainnya dengan memperkenakan alam dan kebudayaan daerah, memperluas lapangan kerja dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan asli

daerah serta memperkaya khasanah kebudayaan nasional. Dengan demikian industri pariwisata juga dapat memajukan dan meratakan perekonomian Negara karena kegiatan pariwisata tersebut merupakan sektor yang amat padat karya, artinya mempunyai daya serap terhadap pengangguran, disamping itu juga dapat meningkatkan pendapatan penduduk.

Sedemikian besar peran sektor pariwisata dalam pembangunan, sehingga diperlukan pengelolaan yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak yang terkait mulai pemerintah, swasta dan masyarakat sekitar daerah wisata memiliki peran penting terhadap perkembangan sektor pariwisata selanjutnya.

8. Sarana dan prasarana

a. Sarana pariwisata

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1994 : 880) sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan, alat, media.

Menurut Yoeti (1993 : 184) yang dimaksud dengan pariwisata adalah “perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung dan tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak tergantung dari kedatangan wisatawan”.

Sedangkan menurut Wahab dalam bukunya Yoeti (1993 :129) “sarana pariwisata adalah semua bentuk perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, tetapi hidup dan kehidupannya tidak selamanya tergantung pada wisatawan.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sarana pariwisata adalah perusahaan-perusahaan yang kegiatannya melayani wisatawan dan kehidupannya tidak selamanya tergantung pada kunjungan wisatawan.

b. Prasarana pariwisata

Menurut Yoeti (1996 ; 186) prasarana pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses perskonomian akan berjalan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan.

Sedangkan prasana pariwisata masih menurut Yoeti (1995 : 15) dapat diartikan semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat

hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan tersebut yang beraneka ragam.

Lothar A Kreck dalam Yoeti (1986 : 186) membagi prasarana menjadi dua kelompok yaitu prasarana perekonomian dan social :

1) Prasana Perekonomian

- a) Pengangkutan transportasi yang dapat membawa para wisatawan dari dimana mereka tinggal, ke tempat atau Negara yang merupakan daerah tujuan wisata.
- b) Prasarana komunikasi yang bermanfaat agar mendorong para wisatawan agar mengadakan perjalanan jarak jauh. Dengan tersedianya prasarana komunikasi, wisatawan dapat berkomunikasi dengan keluarga yang ada di Negara asalnya. Yang termasuk prasarana komunikasi adalah telepon. Telegram, televise, radio dan lain-lain
- c) Perbankan, pelayanan bank yang lancar dan baik berarti wisatawan dapat jaminan untuk memudahkan mengirim dan menerima uangnya.
- d) Kelompok prasarana yang tergolong utilitas, yaitu kelompok prasarana yang sifatnya sangat mendasar, yang termasuk dalam kelompok ini adalah listrik dan persediaan air minum.

b) Prasarana Sosial

Prasarana sosial adalah semua faktor yang menunjang kemajuan atau menjamin kelangsungan prasarana perekonomian yang ada yang termasuk prasarana ini adalah :

- a) Pelayanan kesehatan adanya jaminan bahwa didaerah tuuan wisata terdapat pelayanan bagi susatu penyakit yang mungkin diderita oleh suatu wisatawan, misalnya rumah sakit atau rumah sakit pembantu.
- b) Petugas yang langsung melayani wisatawan yang termasuk kelompok ini adalah polisi, pramuwisata dan lain-lain
- c) Faktor keamanan dan kenyamanan yang memberi rasa aman dan nyaman kepada para wisatawan selama tinggal didaerah wisata.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya sarana pelengkap dan penunjang serta sarana perekonomian dan social akan mendukung sarana-sarana pokok kepariwisataan. Ini berarti sarana dan prasarana kepariwisataan tersebut saling berkaitan dan saling mengisi.

9. Promosi Pariwisata

Untuk mencapai sasaran pengembangan kepariwisataan, salah satu strategi yang mendasar yang perlu diertimbangkan oleh pemerintah adalah promosi atau pemasaran wisata. Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka mengantisipasi persaingan antar daerah wisata atau Negara tujuan wisata. Dengan demikian diperlukan kebijaksanaan tentang pengembangan dan pemasaran pariwisata yang berorientasi pada pengunjung atau wisatawan.

Pengertian promosi wisata itu sendiri yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994 : 970) pengenalan atau pengenalan tentang suatu usaha yang dilakukan secara intensif dan terus menerus.

Dengan demikian promosi pariwisata mempunyai arti memperkenalkan obyek daya tarik yang dialkukan secara intensif dan terus menerus agar dikenal wisatawan maupun para calon wisatawan.

Promosi pariwisata erat kaitannya dengan upaya agar sebanyak mungkin orang dapat mengenal atau diyakinkan dengan produk yang sudah ada. Dengan demikian untuk memenuhi tuntutan permintaan wisatawan sebagai konsumen perlu diimbangi dengan kegiatan komunikasi yang baik.

Dengan kata lain, wisatawan sebagai konsumen harus diperkenalkan pada produk-produk wisata yang menarik. Yang dapat menimbulkan keinginan agar para wisatawan dapat mengunjungi daerah wisata tersebut.

Menurut Yoeti (1991 : 135) dalam kaitannya dengan upaya promosi ada beberapa pendekatan yang fungsinya saling mendukung. Pendekatan tersebut antara lain :

a. Pendekatan dengan *Sales Promotion*

Pendekatan yang meliputi berbagai komunikasi yang diarahkan kepada wisatawan, baik melalui media umum seperti surat kabar televisi, radio, biro perjalanan. Sarana-sarana yang biasa difunakan adalah iklan, pameran, radio, televisi, film, dan lain sebagainya.

b. Pendekatan yang bersifat *Image Promotion*

Pendekatan ini merupakan kegiatan yang bersifat membujuk secara tidak langsung. Pendekatan ini dilakukan melalui suasana yang mampu menumbuhkan rasa simpati, dan rasa ingin tahu. Cara yang digunakan adalah pengenalan oleh perusahaan-perusahaan perjalanan, pengenalan lewat radio,televisi, dan surat kabar.

c. Pendekatan melalui jasa perorangan

Yang termasuk pendekatan ini adalah pendirian kantor-kantor penerangan pariwisata, jasa surat menyurat, menjawab surat, dan pertanyaan melalui telepon.

Sedangkan Wahab (1989 : 158) mengatakan ada tiga tujuan yang harus dicakup publisitas dan promosi, yaitu :

- a. Memperkenalkan produk wisata seluas mungkin.
- b. Menyusun produk itu agar sedapat mungkin menarik.
- c. Menyampaikan pesan yang menarik tanpa harus berbohong.

Dalam pembangunan pariwisata promosi merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya kegiapan promosi kepariwisataan akan terdapat rasa ingin tahu para calon wisatawan yang akan melakukan kunjungna pada suatu wisata.

Sejalan dengan kegiatan promosi diatas ada bebrapa tujuan yang ingin dicapai yaitu :

- a. Memperkenalkan jasa dan produk yang dihasilkan dari industri pariwisata seluas mungkin.
- b. Memberikan kesan daya tarik sekuat mungkindengan harapan orang akan banyak berkunjung.
- c. Menyampaikan pesan yang menarik untuk menciptakan harapan yang tinggi.

Media yang dapat digunakan untuk kegiatan promosi pariwisata adalah sebagai berikut : advertaising, publikasi, sales support, public relation. Dengan demikian maka promosi merupakan cara yang terbaik untuk menarik minat wisatawan mengunjungi obyek wisata di daerah tujuan wisata. Jika factor-faktor penunjang akan lebih diperhatikan maka akan menghasilkan pengembangan pariwisata yang maksimal

E. Dampak pembangunan kepariwisataan.

Dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996 : 207) merupakan (1) benturan ;(2) pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (positif/negative) ;(3) benturan yang cukup hebat antar dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti di momentum system yang mengalami benturan itu.

Suatu pembangunan dalam berbagai aspek pastilah di dalamnya terdapat suatu akibat atau dampak yang ditimbulkan, sehingga dalam penelitian

ini pengertian dampak yaitu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (positif / negatif) setelah adanya pembangunan pariwisata.

Dalam pembangunan sektor pariwisata pastilah mempertimbangkan dampak positif untuk kedepannya. Akan tetapi kebijakan antisipasi sejak dini juga harus dijadikan pertimbangan untuk mengendalikan dampak negatif yang akan muncul dari adanya pembangunan pariwisata agar tidak merugikan masyarakat.

Dampak-dampak dan perubahan akibat adanya tempat wisata :

1. Dampak ekonomi dapat bersifat positif maupun negatif dalam setiap pengembangan obyek wisata. Untuk segi positif dampak ekonomi ini ada yang langsung dan ada juga yang tidak langsung. Dampak positif langsungnya adalah : membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk komunitas lokal, baik itu sebagai pegawai bagian kebersihan, keamanan, ataupun yang lainnya yang sesuai dengan kemampuan, skill, atau dengan berjualan, seperti : makanan, minuman atau voucher hp sehingga masyarakat lokal bisa mendapatkan peningkatan taraf hidup yang layak. Selain untuk masyarakat lokal, dampak ekonomi juga akan berpengaruh bagi pemerintah daerah yang akan mendapatkan pendapatan dari pajak. Sedangkan dampak ekonomi yang tidak langsung adalah kemajuan pemikiran akan pengembangan suatu obyek wisata, adanya emansipasi wanita sehingga wanita pun bisa bekerja. Suatu pengembangan obyek wisata apabila diatur, ditata dan dipantau dengan baik tidak akan menghasilkan dampak negative bagi sektor ekonominya, tetapi apabila tidak dilakukan, diatur, ditata dengan baik maka akan menimbulkan kerugian baik bagi pihak pengembang obyek itu sendiri maupun pihak komunitas lokal daerah setempat.
2. Dampak positif sosial :
 - a. *Conservation of Cultural Heritage* : adanya perlindungan untuk benda-benda kuno, bangunan sejarah, seni traditional seperti musik, drama, tarian, pakaian, upacara adat. Adanya bantuan untuk perawatan museum, gedung theater, dan untuk dukungan acara-acara festival budaya.
 - b. *Renewal of Cultural Pride* : dengan adanya pembaharuan kebanggaan budaya maka masyarakat dapat memperbaharui kembali rasa bangga mereka terhadap peninggalan-peninggalan bersejarah ataupun budaya.
 - c. *Cross Cultural Exchange* : pariwisata dapat menciptakan pertukaran budaya dari wisatawan dengan masyarakat setempat, sehingga membuat para wisatawan mengerti tentang budaya setempat dan mengerti akan nilai-nilai dari tradisi masyarakat setempat begitu pula sebaliknya masyarakat lokal pun bisa tahu tentang budaya dari para wisatawan tersebut baik yang domestik maupun internasional.

3. Dampak negatif sosial :
 - a. *Overcrowding and loss of amenities for residents* : setiap pengelola obyek wisata selalu menginginkan tempat wisata untuk menyedot wisatawan baik domestik maupun internasional, tetapi ada hal-hal yang harus diperhitungkan karena apabila suatu obyek wisata terlalu padat, maka bisa menyebabkan hilangnya kenyamanan bagi penduduk setempat dan membuat masyarakat setempat menjadi tidak nyaman dan pada akhirnya akan terbentuk garis batas antara penduduk lokal setempat dengan wisatawan yang terlalu banyak.
 - b. *Cultural impacts* : karena ingin menyuguhkan sesuatu yang diinginkan wisatawan, tanpa di sadari mereka sudah terlalu mengkomersialkan budaya mereka sehingga tanpa sadar mereka telah mengurangi dan mengubah sesuatu yang khas dari adat mereka atau bahkan mengurangi nilai suatu budaya yang seharusnya bernilai religius. Contoh : upacara agama yang seharusnya dilakukan dengan khidmat dan khusyuk, tetapi untuk menyuguhkan apa yang diinginkan oleh wisatawan maka mereka mengkomersialkan upacara tersebut untuk wisatawan sehingga upacara agama yang dulunya khidmat dan khusyuk makin lama makin berkurang. Yang ke 2 adanya kesalahpahaman dalam hal berkomunikasi, budaya, dan nilai agama yang dapat mengakibatkan sebuah konflik.
 - c. *Social Problems* : adanya percampuran budaya negatif antara wisatawan dengan masyarakat setempat.(Inskeep, 1991)

F. Perubahan Sosial dan Ekonomi

1. Pengertian Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah perubahan dalam proses sosial atau dalam struktur masyarakat (Roueck, 1984, h.215). Perubahan sosial merupakan variasi dan cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial juga merupakan segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi system sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Soemardjan dan Soelaiman, 1974, h.486)

Menurut Sumaatmadja (dalam Yuliati dan Poernomo, 2003, h.57), perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat yang meliputi berbagai aspek kehidupan, sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat, dan yang telah di dukung oleh sebagian besar anggota masyarakat dan merupakan

tuntutan kehidupan dalam mencari kestabilan. Perubahan sosial ini di dorong oleh adanya perkembangan kuantitas dan kualitas anggota masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan proses sosial yang terjadi pada masyarakat karena adanya inovasi, difusi dan penemuan baru sehingga menyebabkan perkembangan kualitas dan kuantitas masyarakat dan mempengaruhi system sosial masyarakat.

2. Ruang Lingkup Perubahan Sosial

Ruang lingkup perubahan sosial meliputi perubahan unsur-unsur kebudayaan baik yang bersifat material maupun immaterial. Selain itu perubahan sosial terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat (Soekanto, 1990, h.304). Perubahan sosial meliputi perubahan pada proses sosial. Sehingga dalam penelitian ini membatasi perubahan sosial pada indikator yang meliputi perubahan pada:

a. Persepsi

Persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi yang diolah dalam alam pikiran kemudian akan membentuk suatu penafsiran. persepsi juga merupakan suatu proses dimana seseorang melakukan pemilihan, pengorganisasian dan penginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Persepsi dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1). Persepsi tentang benda, persepsi yang mengandung unsur obyektif. Misalnya persepsi adanya benda baru atau persepsi terhadap adanya pembangunan.
- 2). Persepsi sosial, persepsi yang mengandung unsur yang subyektif. Misalnya konsepsi diri, harga diri, dan kepercayaan diri seseorang (<http://rumahbelajarpsikologi.com>)

Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut:

- 1) Karakteristik yang mempersepsikan
- 2) Karakteristik yang dipersepsikan
- 3) Kontek situasi (<http://fisip.uns.ac.id>)

b. Interaksi Sosial

Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dan individu, individu dan kelompok

dalam bentuk kerjasama, persaingan maupun pertikaian. Selain itu, interaksi sosial juga merupakan hubungan antara individu lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat hubungan yang saling timbal balik. Adapun bentuk interaksi sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Kerjasama, merupakan suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.
- 2) Persaingan, persaingan merupakan bentuk interaksi sosial yang berfungsi menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang bersifat kompetitif.
- 3) Pertentangan, merupakan proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain yang disertai dengan ancaman atau kekerasan.
- 4) Akomodasi, adalah suatu proses yang menuju pada usaha manusia untuk meredakan pertentangan dengan tujuan untuk mencapai kestabilan. (<http://www.geocities.com>)

c. Kelompok Sosial

Kelompok sosial atau *Social Group* adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama, oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal-balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. (<http://digilib.usu.ac.id>)

Adapun syarat-syarat dalam kelompok sosial, sebagai berikut:

- 1) Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
- 2) Ada hubungan timbal balik antara yang satu dengan anggota lainnya.
- 3) Terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tersebut dapat merupakan nasib yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama dan lain-lain.
- 4) Berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku. (Soekanto, 1990, h.115)

Sedangkan kelompok sosial yang terbentuk dibagi ke dalam tipe-tipe kelompok sosial. Tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau dasar berbagai kriteria atau ukuran, sebagai berikut:

- 1) Besar kecilnya jumlah anggota.
- 2) Derajat interaksi sosial.
- 3) Kepentingan dan wilayah.
- 4) Berlangsungnya suatu kepentingan.
- 5) Derajat organisasi.
- 6) Kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial dan tujuan.

d. Berikut merupakan *Tipe-tipe Kelompok Sosial*, antara lain:

- 1) Kelompok Sosial yang teratur
 - a) *In-Group*, kelompok sosial dimana individu mengidentifikasikan dirinya.
 - b) *Out-Group*, kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya.
 - c) *Kelompok Primer atau Face to Face Group*, merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, dimana anggotanya saling mengenal dan ada kerjasama yang erat.
 - d) *Kelompok Sekunder (Secondary Group)*, merupakan kelompok sosial yang terdiri dari banyak orang, antara siapa hubungan tidak perlu didasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya juga tidak begitu langgeng.
 - e) *Paguyuban (Gemeinschaft)*, merupakan bentuk kehidupan bersama, dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan.
 - f) *Patembayan (Gesellschaft)*, merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka pendek. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka.
 - g) *Formal Group*, merupakan kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antara sesamanya.
 - h) *Informal Group*, merupakan kelompok yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali, yang menjadi dasar bertemunya kepentingan-kepentingan dan pengalaman yang sama.
 - i) *Membership Group*, merupakan suatu kelompok dimana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut.
 - j) *Reference Group*, merupakan kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang (bukan anggota kelompok tersebut)

untuk membentuk pribadi dan perilakunya.(Soekanto, 1990, h.118-142)

- 2) Kelompok Sosial yang tidak teratur
 - a) *Kerumunan (Crowd)* adalah individu yang berkumpul secara bersamaan serta kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bers. aman
 - b) *Publik* adalah kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat komunikasi, seperti pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus, surat kabar, televisi dan lain sebagainya. (Soekanto, 1990, h.145)

e. Peraturan

Peraturan adalah tata cara atau aturan yang bersifat mengikat yang bertujuan untuk mengatur masyarakat tertentu dalam jangka waktu tertentu dan untuk hal tertentu pula. Peraturan juga merupakan pembatas manusia dalam berbuat agar dapat menciptakan keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia ataupun manusia dengan alam dan makhluk lainnya. Adapun bentuk peraturan yang tercipta dalam kehidupan masyarakat, antara lain:

- 1) *Peraturan Formal*, yaitu peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang tegas dan mengikat serta sanksi yang diberikan berupa hukuman yang telah ditentukan di dalamnya. Misalnya: Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan suatu organisasi dan lain-lain.
- 2) *Peraturan Informal*, yaitu peraturan yang tercipta karena kesadaran masyarakat akan perlunya peraturan untuk mengatur kepentingan tertentu. Peraturan ini tidak memiliki kekuatan hukum dan sanksi yang tegas. Sehingga sanksi hanya berupa sanksi sosial. Misalnya peraturan dalam kelompok sosial masyarakat dan peraturan dalam kehidupan sosial. (<http://wikipedia.com>)

f. Ciri-ciri Perubahan Sosial

Menurut Soekanto (dalam Yuliati dan Poernomo, 2003,, h.73), proses-proses perubahan sosial dapat diketahui dengan ciri-ciri tertentu, yaitu:

- 1) Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena setiap masyarakat akan mengalami perubahan baik cepat ataupun lambat.
- 2) Perubahan terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu, dan diikuti pada perubahan-perubahan lembaga sosial lainnya. Karena

sifat kelembagaan tersebut yang independent maka sulit untuk mengisolasi perubahan pada lembaga-lembaga sosial tertentu. Proses awal dan selanjutnya merupakan mata rantai.

- 3) Perubahan sosial yang cepat biasanya diikuti dengan disorganisasi yang bersifat sementara karena berada dalam proses penyesuaian diri. Diorganisasi ini akan diikuti oleh reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai baru.
- 4) Perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja, karena bidang itu mempunyai kaitan yang timbal balik.

g. Faktor-faktor Perubahan Sosial

Faktor-faktor penyebab perubahan sosial dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat dan yang berasal dari luar masyarakat. Faktor penyebab perubahan sosial antara lain:

1) Faktor-faktor dari dalam masyarakat

a) Bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk

Bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk karena kelahiran, kematian dan migrasi iakan berpengaruh langsung terhadap struktur kemasyarakatan terutama lembaga kemasyarakatannya. Perpindahan penduduk karena migrasi juga akan menyebabkan perubahan, yaitu kekosongan-kekosongan dalam stratifikasi sosial dan pembagian kerja yang akan berpengaruh pada lembaga kemasyarakatannya.

b) Penemuan-penemuan baru

Penemuan baru lahir bisaanya bersal dari kesadaran individu-individu akan kekurangan dalam kebudayaannya, kualitas sumberdaya manusia yang handal dari system kebudayaan itu, serta adanya perangsang bagi aktifitas-aktifitas penemuan dalam masyarakat.

c) Pertentangan dalam masyarakat (konflik)

Pertentangan bisa terjadi antar individu juga antar kelompok. Pertentangan bisa terjadi karena adanya benturan kepentingan kelompoknya. Selain itu, pertentangan dalam masyarakat dapat terjadi karena adanya pandangan yang berbeda terhadap nilai sosial budaya.

d) Terjadi pemberontakan / revolusi

Revolusi telah terbukti dapat menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat. Pengalaman berbagai Negara dalam melakukan hal itu dapat kita lihat pada Negara Libya, Iran, Rusia dan Vietnam, dimana tatanan masyarakatnya berubah dengan cepat. Berbagai nilai baru muncul sebagai tanggapan terhadap nilai lama yang telah usang yang tidak mampu mewartakan lagi keinginan masyarakatnya..

2) Faktor dari luar masyarakat

Sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia. Gempa bumi, banjir dan berbagai gejala alam lainnya sering kali memaksa manusia untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Tempat baru yang mereka huni kadang membutuhkan penyesuaian terhadap pola hidup mereka. Hal ini tentu akan berpengaruh pada kelembagaan sosial yang ada di sana. Penyebab lain kadang dilakukan oleh masyarakat sendiri terhadap lingkungannya, contohnya : perusahaan lahan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan menyebabkan perubahan pola penanaman tanaman.

a) Pengaruh kebudayaan masyarakat lain

Pengaruh kebudayaan masyarakat lain dalam masyarakat terbuka tidak dapat dihindari. Pertemuan dua kebudayaan itu akan menimbulkan kebudayaan baru yang disebut akulturasi.

b) Peperangan

Negara pemenang perang akan selalu memaksakan kebudayaannya pada Negara yang kalah. Perubahan itu terjadi pada penduduk, tata nilai serta kelembagaan kemasyarakatannya. Negara yang mengalami perang tentu akan melakukan perombakan pada masyarakatnya.(Yulianti dan Poernomo, 2003, h.84)

h. Faktor yang Menghalangi Perubahan Sosial

Selain faktor-faktor penyebab, adapula faktor-faktor yang menghalangi perubahan sosial. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1) Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain.

- 2) Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat.
- 3) Sikap masyarakat yang sangat tradisional.
- 4) Adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat / *vested interest*.
- 5) Prasangka terhadap hal-hal baru / asing atau sikap yang tertutup.
- 6) Nilai bahwa hidup ini pada hakekatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. (Soekanto, 1990, h.329)

3. Perubahan Ekonomi

Dalam pembangunan sektor pariwisata yang dilakukan pada beberapa daerah mengarah kepada ekonomi, dimana dampak yang ditimbulkan pada sektor ekonomi merupakan hal yang berpengaruh terhadap semua kalangan, seperti bagi masyarakat sekitar, bagi pemerintah daerah dan masih banyak lagi.

Dalam hal ini berkaitan dengan pembangunan ekonomi dimana pembangunan ekonomi merupakan kegiatan yang amat penting untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dikemukakan oleh Bitoro Tjokroamidjoyo (1991 : 58) bahwa “keadaan ekonomi yang meningkat diharapkan akan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan di bidang lain”.

Sedangkan menurut Hasibuan (1987 : 17) “pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang terus menerus yang diusahakan dengan jalan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi mempunyai tiga ciri penting, yaitu :

- 1) Suatu proses perubahan yang terus menerus.
- 2) Suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Suatu usaha untuk mengubah masyarakat statis menjadi masyarakat yang dinamis.

Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan atau peningkatan ekonomi masyarakat tergantung pada usaha-usaha mendinamisasikan masyarakat sehingga dapat menunjukkan peranannya dalam melaksanakan pembangunan sektor pariwisata.

Perubahan ekonomi di suatu daerah pada umumnya terjadi karena adanya pembangunan system ekonomi. Pembangunan system ekonomi pada dasarnya merupakan suatu peningkatan system ekonomi yang telah ada sebelumnya menjadi system ekonomi yang dianggap lebih baik guna meningkatkan pendapatan masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan melakukan klarifikasi suatu peristiwa atau suatu pengetahuan dengan memakai metode-metode penelitian sangat menentukan tingkat hasil penelitiannya. Suatu penelitian harus menggunakan metode yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti, agar memperoleh data yang dikehendaki dan relevan dengan permasalahan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fakta dan realita yang terjadi di lapangan yang dikaji berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dan menggambarkan dampak yang dihadapi oleh masyarakat yang secara umum adalah masyarakat sekitar obyek wisata.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2006, h.11) metode penelitian deskriptif bertujuan melukiskan atau menggambarkan suatu fenomena dengan jalan mendeskripsikan secara sistematis sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Lebih lanjut Nazir (2005, h.54) menjelaskan bahwa:

Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas pemikiran pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.”

Sedangkan pendekatan kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor, seperti dikutip dalam Moleong (2006, h.4) menyatakan bahwa

”pendekatan ini menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic, tetapi memandangnya sebagai suatu keutuhan. Dalam penelitian ini obyek yang diteliti juga dipandang sebagai suatu fakta atau kejadian yang diamati secara intensif dan mendetail, baik tentang latar belakang keadaan seseorang maupun interaksi dengan lingkungannya. Penelitian kualitatif bertujuan menyusun atau mengembangkan suatu teori, konsep dan

pemahaman serta mendeskripsikan pernyataan yang sebanyak-banyaknya. (Moleong, 2006, h.31)

Dengan demikian penggunaan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif merupakan metode yang sesuai untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti secara mendalam.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong, penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan, yaitu: pertama, penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat penelitian menjadi layak. Jadi dalam hal ini, fokus akan membatasi bidang kajian. Kedua, penetapan fokus secara efektif menetapkan kriteria untuk menyaring informasi yang mengalir masuk. Jadi sasaran atau fokus yang menjadi titik pangkal dalam penelitian ini adalah membahas tentang Dampak Pembangunan Sektor Pariwisata Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar (studi kasus pada Dinas Komunikaasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar)

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Potensi pariwisata di daerah Kota Blitar
2. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan sektor pariwisata terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar yaitu :
 - a. Perubahan sosial :
 - 1) Persepsi,
 - 2) interaksi,
 - b. Perubahan Ekonomi
 - 1) Terbukannya lapangan pekerjaan,
 - 2) Tingkat pendapatan,
3. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pembangunan pariwisata di Kota Blitar
 - a. faktor penghambat.
 - b. faktor pendukung.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) yaitu di Kota Blitar. Selain itu penelitian juga dilakukan di kantor atau lembaga yang terkait antara lain:

1. Kantor Dinas Komunikaasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar

Dalam hal ini saya memilih Dinas Pariwisata Kota Blitar karena Dinas Pariwisata merupakan suatu instansi yang menaungi berbagai macam potensi pariwisata yang ada di kota Blitar.tidak hanya itu, dinas pariwisata mempunyai misi yaitu meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan sarana dan prasarana informasi, komunikasi pariwisata dan seni budaya, dan meningkatkan PAD.

Situs yang akan diteliti meliputi :

- a. Perpustakaan Proklamator Bung Karno
- b. Pemandian Sumber Udel
- c. Pusat Informasi Pariwisata Dan Perdagangan (PIPP)

D. Sumber Data

Dari pengertian di atas, maka dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut :

1. Data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari informan di lapangan dan pihak-pihak yang terkait secara langsung. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:
 - a. Kepala Dinas Komunikaasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar
 - b. Masyarakat kota Blitar sebagai pihak yang merasakan dampak dari pembangunan.
2. Data sekunder

Walaupun dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang sumbernya diluar kata dan tindakan dan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi dari sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Maleong, 2005:159). Selain itu data sekunder dapat dikatakan sebagai data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar diri peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sebenarnya adalah data yang asli.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari arsip dan dokumen-dokumen resmi di Kantor Dinas Kominparda Kota Blitar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan peneliti dalam mencari dan memperoleh data. Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam menggali data adalah wawancara yang sifatnya terstruktur dan dilakukan secara terarah. Dengan berpedoman pada pedoman interview yang telah dipersiapkan. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai identitas responden, meliputi: nama dan profesi serta pengaruh pembangunan obyek pariwisata terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Peneliti mewawancarai berbagai orang antara lain :

- a) Drs. Kasmiadi selaku Kepala Dinas Kominparda Kota Blitar
- b) Ismoyo sebagai penjual makanan penduduk sekitar Stadion Patria.
- c) Samsul sebagai penjual asongan penduduk sekitar makam Bung Karno.
- d) Sugianto sebagai penjual makanan di kawasan PIPP.
- e) Suminah sebagai penjual bunga di kawasan makam Bung Karno.
- f) Yayuk sebagai penjual bunga di kawasan makam Bung Karno.
- g) Slamet sebagai penarik becak wisata di kawasan makam Bung Karno.
- h) Andri sebagai petugas keamanan di kawasan Perpustakaan makam Bung Karno.
- i) Joko sebagai juru parkir.
- j) Yoyok sebagai juru parker.
- k) Wiyoto sebagai pemilik penginapan.
- l) Wulan sebagai pelajar SLTA 1 Kota Blitar

2. Observasi

Dalam teknik pengumpulan data ini peneliti juga melakukan observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap obyek penelitian guna memperoleh data yang aktual.

Di samping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. Dalam penelitian ini, observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis, dokumen-dokumen, laporan-laporan resmi, peraturan perundang-undangan serta arsip-arsip.

F. Instrumen Penelitian

Yang dimaksud dengan instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini instrumen atau alat yang digunakan adalah :

1. Peneliti, salah satu ciri penelitian kualitatif adalah memasukkan manusia atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama. Hal ini berpengaruh utama dalam proses wawancara dan analisa data.
2. Pedoman-pedoman wawancara, hal ini berguna untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan guna kegiatan penelitian.
3. Perangkat penunjang yang meliputi : buku catatan dan alat tulis menulis yang dapat digunakan selama berada di lapangan untuk memudahkan hal-hal tertentu yang mungkin belum didapat dari dokumen tertulis.

G. Analisis Data

Menurut M. Nazir (2005, h.358) analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkat data sehingga mudah dibaca. Tujuan dari analisa adalah untuk mereduksi data agar dapat dikerjakan, dimanfaatkan dan dipahami sedemikian rupa sehingga berhasil menyimpulkan suatu fenomena yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data deskripsi dan analisa data kualitatif. Peneliti mengadakan analisa data yang berupa catatan lapangan untuk mengidentifikasi kejadian, perasaan dan pola-pola perilaku penting.

Sesuai dengan penelitian ini teknik analisa data yang digunakan ialah metode analisa non-statistik, yang sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, maka setelah data yang terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi yang pada hakekatnya merupakan upaya peneliti untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif, artinya dari data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Data yang ada dianalisa serinci mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai yang bisa digeneralisasikan.

Analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan atau mendiskripsikan data yang diperoleh sesuai dengan latar ilmiah yang disampaikan dalam bentuk apa adanya. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode taksonomis, yaitu suatu metode menganalisa data secara lebih rinci dan mendalam dengan menetapkan batasan-batasan berupa penetapan fokus penelitian dalam upaya mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang menjadi sasaran penelitian

Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses penelitian, hal ini karena analisis data menyangkut kekuatan analisis dan kemampuan dalam mendeskripsikan data situasi, peristiwa dan konsepsi yang merupakan bagian dari obyek penelitian. Dengan analisis, data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah.

Adapun tahapan analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data

Yaitu dengan menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasikan.

2. Penyajian Data

Berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Yaitu dilakukan dengan cara longgar, tetap terbuka, tetapi dirumuskan secara rinci dan mengakar dengan kokoh (Miles, 1992, h.16).

Selanjutnya: "ketiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai suatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis" (Miles, 1992, h.19).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kondisi Umum Wilayah Kota Blitar

Kota Blitar sejak dahulu sering dikaitkan dengan nama besar Bung Karno, karena disinilah Bung Karno dimakamkan dan pernah pula tinggal di sebuah rumah yang sekarang dinamakan dengan Istana Gebang. Dan kota Blitar bisa dikatakan Kota yang terkenal akan nilai historisnya.

Kota Blitar merupakan salah satu kota yang secara geografis berada di Propinsi Jawa Timur bagian barat yang berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lainnya di Propinsi Jawa Timur. Selain daripada itu Kota Blitar merupakan Kota dimana terdapat makam Presiden Pertama Republik Indonesia. Kota ini sering dikunjungi berbagai wisatawan baik mancanegara maupun dalam negeri.

Kota Blitar memiliki luas 32,58 km², dan terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sananwetan dengan luas 12,15 km² kemudian Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 km² dan Kecamatan Sukorejo 9,93 km². Dari 21 kelurahan yang ada, kelurahan terluas adalah Kelurahan Sentul yang terletak di Kecamatan Kepanjenkidul yaitu 2,68 km². Sementara Kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo 0,51 km².

Kota Blitar memiliki Rata-rata ketinggian Kota Blitar dari permukaan air laut sekitar 156 m. Ketinggian di bagian utara sekitar 245 m dengan tingkat kemiringan 2° sampai 15°, bagian tengah 175 m dan bagian Selatan 140 m dari permukaan air laut dengan tingkat kemiringan 0° sampai 2°. Dilihat dari Topografi wilayah Kota Blitar masih termasuk dataran rendah. Dengan keadaan geografis Kota Blitar terletak ± 160 km sebelah Barat Daya Kota Surabaya dan berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar. Kota ini terletak pada koordinat 112°14' - 112°28' Bujur Timur dan 8°2' - 8°8' Lintang Selatan.

Kota Blitar berbatasan dengan batas administratif wilayah – wilayah berikut :

- a. Sebelah Utara : Kec. Nglegok dan Kec. Garum, Kab. Blitar

- b. Sebelah Timur : Kec. Garum dan Kec. Kanigoro, Kab. Blitar
- c. Sebelah Selatan : Kec. Kanigoro dan Kec. Sanankulon, Kab. Blitar
- d. Sebelah Barat : Kec. Sanankulon dan Kec. Nglegok, Kab. Blitar

Posisi Kota Blitar yang terletak tidak jauh dari Gunung Kelud, serta ketinggian 156 di atas permukaan laut berpengaruh terhadap curah hujan dan hari hujan. Pada 4 stasiun pengukuran milik Perwakilan Badan Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Bango Gebangan, tercatat puncak musim hujan pada tahun 2008 terjadi pada bulan November dengan jumlah hari hujan mencapai 17 hari dan curah hujan mencapai 20,66 mm per hari. Sementara bulan April sampai dengan Oktober, sudah memasuki musim kemarau, yang ditandai dengan hari hujan yang mulai berkurang. Puncak musim kemarau terjadi di bulan Juli dan Agustus dengan hari hujan nol, atau tidak turun hujan sama sekali di bulan-bulan tersebut, dapat ditunjukkan seperti table di bawah ini.

Tabel 1
Rata-Rata Hari Hujan (Hari) 2004-2008

Bulan	2004	2005	2006	2007	2008
Januari	11.50	10.25	16.00	6.75	12.25
Februari	14.75	8.75	15.75	18.25	15.25
Maret	7.50	13.75	15.25	12.75	17.25
April	5.00	9.25	13.00	15.25	5.75
Mei	5.50	-	10.50	6.50	4.35
Juni	1.50	4.00	1.25	4.00	2.00
Juli	0.25	3.75	-	2.00	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	0.75	-	-	-	1.25
Oktober	1.25	3.50	-	3.50	7.75
November	12.00	8.75	1.00	11.50	17.50
Desember	17.75	20.00	12.75	20.00	10.50

*Sumber: Perwakilan Badan Pengelolaan SDA
Wilayah Sungai Bango Gebangan*

a) **Aspek Sosial Budaya**

1. **Kependudukan**

Registrasi Penduduk adalah suatu kegiatan pencatatan rutin setiap kejadian yang terjadi pada penduduk seperti kelahiran, kematian, serta migrasi masuk maupun keluar. Jumlah penduduk Kota Blitar hasil registrasi tahun 2008 adalah 133.306 jiwa meningkat sebesar 1.199 jiwa atau 0,91 persen dari tahun 2007. Jumlah penduduk laki-laki 66.029 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 67.277 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,14. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Sananwetan dengan jumlah penduduk sebesar 51.391 jiwa, diikuti Kecamatan Sukorejo sebesar 44.605 jiwa, dan yang terkecil adalah penduduk kecamatan Kepanjenkidul 37.310 jiwa. Seperti dijelaskan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2
Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan

Kecamatan	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin (%)
	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	L + P (jiwa)	
Sukorejo	22,107	22,498	44,605	98,26
Kepanjenkidul	18,347	18,963	37,310	96,75
Sananwetan	25,575	25,816	51,391	99,07

Sumber/Source : Hasil Pengolahan Registrasi Penduduk / BAPPEDA Kota Blitar

Tabel 3
Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Per Tahun

Kota Blitar	2008	66,029	67,277	133,306	98,14
	2007	65,411	66,696	132,107	98,07
	2006	63,727	65,263	128,990	97,65
	2005	63,369	64,886	128,255	97,66
	2004	62,244	64,144	126,388	97,04

Sumber : Hasil Pengolahan Registrasi Penduduk / BAPPEDA Kota Blitar

Kepadatan Penduduk Kota Blitar pada tahun 2008 sebesar 4.093 jiwa / Km². Pengertiannya adalah rata-rata satu kilometer persegi ditempati 4.496 penduduk. Kecamatan Sukorejo adalah kecamatan yang paling padat penduduknya yaitu 4.442 jiwa/km². Selanjutnya adalah Kecamatan Sananwetan

yaitu 4.130 jiwa/km² dan yang terakhir adalah kecamatan Kepanjenkidul yaitu 3.553 jiwa/km².

Seperti dijelaskan dalam tabel di bawah ini Luas Wilayah, Kepala Keluarga, Kepadatan, dan Rata-rata penduduk per Kepala Keluarga.

Tabel 4
Luas Wilayah, Kepala Keluarga, Kepadatan, dan Rata-rata penduduk per Kepala Keluarga

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Kepala Keluarga (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Rata-rata Penduduk (%)
Sukorejo	9.92	14,547	4,496.47	3.07
Kepanjenkidul	10.50	10,597	3,553.33	3.52
Sananwetan	12.15	17,703	4,229.71	2.90

Sumber/Source : Hasil Pengolahan Registrasi Penduduk / BAPPEDA Kota Blitar

Tabel 5
Luas Wilayah, Kepala Keluarga, Kepadatan, dan Rata-rata penduduk per Kepala Keluarga

Kota Per tahun		Luas Wilayah (km ²)	Kepala Keluarga (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Rata-rata Penduduk (%)
Kota Blitar	2008	32.57	67,277	4,092.91	3.11
	2007	32.57	38,897	4,056.09	3.40
	2006	32.57	35,543	3,960.39	3.88
	2005	32.57	33,089	3,937.83	4.15
	2004	32.57	30,456	3,880.50	4.10

Sumber/Source : Hasil Pengolahan Registrasi Penduduk / BAPPEDA Kota Blitar

Kelurahan terpadat penduduknya adalah Kepanjenkidul 8.659 jiwa/km², Kepanjenlor 8.650 jiwa/km², dan Sukorejo 8.542 jiwa/km². Kelurahan tersebut berada di pusat kota yang memang secara fisik padat pemukiman penduduk, pertokoan, dan pasar. Seperti dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6
Urutan Kepadatan Penduduk menurut Kelurahan 2008

Kelurahan	Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
Kepanjenkidul	7,508	0.8670	8,659.45
Kepanjenlor	5,305	0.6133	8,650.21
Sukorejo	12,524	1.4662	8,541.81
Kauman	5,284	0.6803	7,766.82
T u r i	3,318	0.5086	6,523.79
Bendogerit	10,722	1.9552	5,483.84
Sananwetan	11,658	2.1279	5,478.64
Karangsari	4,810	0.8824	0.8824
Karangtengah	7,841	1.7954	4,367.27
Pakunden	8,881	2.2620	3,926.17
Gedog	10,216	2.6500	3,855.09
Plosokerep	4,435	1.2481	3,553.40
Tlumpu	3,380	1.0153	3,329.07
Rembang	2,702	0.8443	3,200.47
Tanjungsari	7,720	2.4581	3,140.70
Bendo	4,745	1.5185	3,124.79
B l i t a r	3,972	1.3321	2,981.87
Sentul	7,110	2.6830	2,650.02
Klampok	3,817	1.5307	2,493.63
Tanggung	4,277	2.2300	1,917.94
Ngadirejo	3,081	1.9102	1,612.92

Sumber/Source : Hasil Pengolahan Registrasi Penduduk / BAPPEDA Kota Blitar

Jumlah kelahiran selama tahun 2008 sebesar 1.617 dengan jenis kelamin laki-laki 846 jiwa dan perempuan 771 jiwa. Jumlah ini lebih besar bila dibandingkan kelahiran tahun 2007 dengan peningkatan 120 kelahiran. Kejadian kematian selama tahun 2008 sebanyak 1.119 dengan rincian laki-laki 574 jiwa dan perempuan 545 jiwa. Dapat dijelaskan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 7
Kelahiran, Kematian, Datang dan Pindah per Kecamatan 2008

	Tahun	Kelahiran (jiwa)	Kematian (jiwa)	Penduduk Datang (jiwa)	Penduduk Pindah (jiwa)
Kota Blitar	2008	1,617	1,119	3,318	2,617
	2007	1,497	1,168	4,986	2,198
	2006	1,214	1,152	2,908	2,235
	2005	1,259	1,156	5,006	3,242
	2004	2,211	1,672	8,255	5,940

Sumber/Source : Hasil Pengolahan Registrasi Penduduk / BAPPEDA Kota Blitar

Penduduk Kota Blitar pada tahun 2008 mayoritas beragama Islam jumlah pemeluknya 120.468 orang dan sisanya (9,63 persen) memeluk agama Katolik 5.601 orang, Kristen 5.748 orang, Hindu 569 orang, Budha 815 orang, dan Konghuchu 105 orang . dapat dijelaskan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 8
Penduduk menurut Agama 2008 (orang)

	Tahun	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	konghuchu
Kota Blitar	2008	120,468	5,601	5,748	569	815	105
	2007	119,674	5,509	5,467	624	833	*)
	2006	116,847	5,392	5,341	599	811	*)
	2005	117,513	4,594	4,737	591	820	*)
	2004	116,128	5217	5599	551	844	*)

Sumber : Departemen Agama Kota Blitar

*) Tidak tersedia datanya.

2. Tenaga Kerja

Jumlah perusahaan yang tercatat pada Dinas Kesos dan Naker Kota Blitar pada tahun 2008 sebanyak 257 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 7.659 orang. Tenaga kerja terbanyak berada di sektor perindustrian yang mencapai 3.815 orang atau 49,81 persen. Dapat dijelaskan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 9
Perusahaan dan Tenaga Kerja WNI menurut Sektor tahun 2008

Sektor	Perusahaan	Tenaga Kerja WNI
Pertanian/kehutanan, peternakan	1	81
Pertambangan	-	-
Perindustrian	75	3,815
Listrik	3	118
Bangunan	-	-
Perdagangan	113	1,621
Angkutan	6	2 07
Kuangan	21	838
Jasa-jasa	38	979

Sumber/Source : Hasil Pengolahan Registrasi Penduduk / BAPPEDA Kota Blitar

Tabel 10
Perusahaan dan Tenaga Kerja WNI menurut Sektor Per Tahun

Kota Per Tahun	Perusahaan	Tenaga Kerja WNI
Kota Blitar	2008	257
	2007	218
	2006	211
	2005	202
	2004	202

Sumber/Source : Hasil Pengolahan Registrasi Penduduk / BAPPEDA Kota Blitar

Pencari kerja pada tahun 2008 sebanyak 269 orang dan didominasi oleh pencari kerja dengan tingkat pendidikan SMTA kejuruan sebanyak 84 orang atau 31,23 persen dari seluruh pencari kerja. Dari pencari kerja tersebut yang ditempatkan sejumlah 227 orang atau 84,39 persen dari keseluruhan pencari kerja.

Kebutuhan hidup layak per orang per bulan terus mengalami kenaikan. Pada Januari 2008 sebesar Rp. 625.432 naik menjadi Rp. 669.240 pada Desember 2008. Sementara Upah Minimum Kota Blitar Januari 2009 hanya sebesar Rp. 572.500, jumlah yang masih dibawah kebutuhan hidup layak. Walaupun demikian, UMK tersebut terus mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Apabila di tahun 2008 UMK hanya sebesar Rp. 506.500, maka UMK tahun 2009 naik sebesar Rp. 66.000 atau sebesar 13,03 persen. Karena bagaimanapun juga, tingkat pemenuhan kebutuhan hidup pekerja berpengaruh pada produktifitas tenaga kerja yang pada akhirnya mempengaruhi terhadap stabilitas kinerja perusahaan. Seperti daftar tabel dibawah ini.

Tabel 11
Kebutuhan Hidup Layak Pekerja per Orang per Bulan (Rp.) 2005-2008

Bulan	2005	2006	2007	2008
Januari	405,737.50	431,613.00	576,016.10	625,432.97
Februari	408,446.25	433,108.00	584,930.90	626,277.19
Maret	404,300.00	434,780.00	578,029.32	626,759.57
April	406,600.00	433,375.00	578,807.60	634,946.77
Mei	408,555.00	437,234.00	575,695.73	644,126.09
Juni	408,125.50	438,299.00	588,332.26	648,404.06
Juli	409,503.75	453,535.00	596,141.13	661,110.28
Agustus	412,292.50	454,890.00	616,683.52	662,908.03
September	416,145.00	455,998.00	624,383.31	664,967.23
Oktober	568,463.00	463,212.00	630,469.73	668,067.70
November	575,654.00	462,508.00	631,099.68	668,067.70
Desember	577,143.20	463,916.00	633,275.59	669,240.76
Rata-rata	450,080.48	446,872.33	601,155.41	650,025.70

Sumber : Dinas Kesos dan Naker Daerah Kota Blitar

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebanyak 3.972 orang meningkat 142orang dari tahun 2007. PNS pria sebanyak 1.983 orang, dan wanita sebanyak 1.989 orang. Unit kerja dengan jumlah PNS terbanyak adalah Dinas Pendidikan Daerah, sebesar 2.187, kemudian BPK RSUD MardiWaluyo sebanyak 384 orang. PNS Golongan I sebanyak 164 orang (4,13 persen), golongan II sebanyak 1.062 orang (26,74 persen), golongan III sebanyak 1.599 orang (40,26 persen) dan golongan IV sebanyak 1.147 orang (28,88 persen) PNS dengan tingkat pendidikan tertinggi SD, SLTP, SLTA sebesar 1.320 orang (33,23 persen). Lulusan D1, D2, D3, D4 sebanyak 827 orang (20,82 persen). Lulusan S1 sebanyak 1.721 orang (43,33 persen) dan S2 sebanyak 104 orang (2,62 persen).

b) Aspek Ekonomi Wilayah

1. Pertumbuhan ekonomi wilayah

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu daerah, seperti penambahan

jumlah industri, penambahan produksi sektor-sektor ekonomi, penambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas umum), penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain, gejolak sekecil apapun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sektor apa yang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 12
Andil / Shift Share masing-masing Sektor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2008

Lapangan Usaha	Kontribusi PDRB adhk (%)		Pertumbuhan Ekonomi (%)		Andil / Shift Share (%)	
	2006	2007	2007	2008	2007	2008
Pertanian	8,55	8,15	1,23	0,91	0,11	0,07
Pertambangan dan Penggalian	0,05	0,04	-8,38	-5,24	0,00	0,00
Industri Pengolahan	13,55	13,40	5,01	2,10	0,68	0,28
Listrik, Gas dan Air	3,05	3,09	7,58	8,16	0,23	0,25
Bangunan	5,61	5,60	5,83	12,42	0,33	0,69
Perdagangan, Hotel & Restoran	23,38	23,53	6,86	9,08	1,60	2,14
Angkutan dan Komunikasi	13,43	14,08	11,33	7,50	1,52	1,06
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	13,00	12,87	5,17	6,89	0,67	0,89
Jasa- Jasa	19,38	19,24	5,43	4,72	1,05	0,91
	100,00	100,00	6,19	6,29	6,19	6,29

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Blitar 2008/BAPPEDA Kota Blitar

Sektor perdagangan, hotel dan restoran tetap memegang peranan terbesar dalam menarik pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar. Bahkan donasinya semakin kuat. Jika tahun 2007 andil sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam menarik pertumbuhan ekonomi mencapai 1,60 persen, maka pada tahun ini meningkat menjadi 2,14 persen dari total pertumbuhan ekonomi 6,29 persen. Fakta ini sejalan dengan salah satu arah kebijakan Pemerintah Kota Blitar dalam RPJMD Tahun 2006-2010 yaitu memantapkan sistem perdagangan dan jasa unggulan yang mampu memberi sumbangan pada PDRB sampai dengan 70 persen. Karena lokomotif pertumbuhan ekonomi ada pada sektor perdagangan, hotel dan restoran maka wajib bagi pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan kestabilan sistem perdagangan di Kota Blitar jika menginginkan pertumbuhan ekonomi tetap tinggi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil bisa menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunannya, namun perlu dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya tentang perekonomian suatu daerah. Ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tinggi, tetapi masyarakat daerah tersebut tidak ikut menikmati pembangunan karena sebagian pendapatan dinikmati penduduk daerah lain. Idealnya adalah ketika kenaikan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat, antara lain ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran. Pertumbuhan ekonomi seperti ini disebut dengan pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Pada tahun 2008, perekonomian Kota Blitar tumbuh 6,29 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2007 yang mencapai 6,19 persen. Artinya, pembangunan ekonomi di Kota Blitar tetap tumbuh dan berkembang dengan kecepatan yang sedikit lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini juga didukung pada tumbuh berkembangnya angkutan dan jasa pada tahun 2007 sebesar 1,52% dan keuangan, persewaan dan Jasa jasa pada tahun 2008 sekitar 0,89%. Di mana dalam hal ini meskipun tidak menempati posisi atas akantetapi lapangan usaha ini juga mendukung berkembangnya tingkat pariwisata di Kota Blitar.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan cerminan potensi perekonomian suatu wilayah. Nilai PDRB merupakan agregat nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut. PDRB juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk dimana besaran PDRB menunjukkan pendapatan yang diterima oleh factor produksi yang dimiliki oleh penduduknya. PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) menggambarkan produksi riil yang dipengaruhi oleh perubahan harga. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (adhk) menggambarkan pertumbuhan riil dari tahun ke tahun tanpa dipengaruhi perubahan harga / inflasi.

PDRB Kota Blitar tahun 2008 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 1.265.357.176.000,00 Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 686.549.150.000. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran adalah sektor yang paling besar kontribusinya dalam pembentukan PDRB yaitu sebesar 23,76 persen. Urutan berikutnya adalah sektor Jasa-jasa (19,47 persen), Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan (13,99 persen), Industri Pengolahan (12,72 persen) dan Sektor Angkutan dan Komunikasi (12,52 persen) (Tabel 10.1.3). Laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2008 sebesar 6,29 persen. lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%) 2006 - 2008

Lapangan Usaha / Sub Lapangan Usaha	2006	2007*)	2008**)
Pertanian	9.15	8.86	8.35
Pertambanga dan penggalian	0.07	0.06	0.05
Industri pengolahan	13.37	13.06	12.72
Listrik , gas dan air	2.90	2.84	2.75
Bangunan	5.91	5.94	6.39
Perdagangan, hotel dan restoran	22.47	22.80	23.76
Angkutan dan komunikasi	12.45	12.74	12.52
Keuangan, persewaan & jasa perush.	14.15	13.89	13.99
Jasa - jasa	19.53	19.81	19.47
Produk domestik regional bruto	100.00	100.00	100.00

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Blitar 2008/BAPPEDA Kota Blitar

Keterangan : *) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara

2. Profil Dinas Komunikaasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar

Sesuai dengan peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 14 Tahun 2003 tentang Susunan Dinas-dinas dan Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 34 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Komunikaasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar, di mana Dinas Kominparda Daerah Kota Blitar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Informasi dan pariwisata. Di mana Dinas Komunikaasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar mempunyai kedudukan yaitu Dinas Komunikaasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Informasi, komunikasi, dan pariwisata dan kebudayaan; dan Dinas Komunikaasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Blitar melalui sekretaris daerah. Dalam hal ini Dinas Komunikaasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar mempunyai tugas membantu Walikota dalam merencanakan dan menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Informasi, Komunikasi, Pariwisata dan Kebudayaan dengan mempunyai fungsi antara lain Perumusan Kebijakan Teknis, penyusunan program pengndalian, pembinaan di bidang Informasi, Komunikasi, Pariwisata dan Kebudayaan; penyusunan pelaporan evaluasi; pelaksanaan pengkajian budaya; penyelenggaraan pengelolaan usaha pariwisata, kegiatan kebudayaan, informasi dan komunikasi; dan Peningkatan asli daerah PAD

a. Visi dan misi

1) Visi

Sesuai dengan maksud dibentuknya DINAS KOMINPARDA Kota Blitar, yaitu : menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan pemerintah daerah di bidang Informasi, Komunikasi dan Pariwisata (termasuk didalamnya seni budaya daerah yang mendukung kepariwisataan) maka diperlukan komitmen bersama dlam mengaktualisasi keselarasan pandang fungsi dan tugas pokok tersebut dalam visi misi organisasi. Dengan visi misi yang tepat mampu menjadi akselerator kegiatan di lingkungan organisasi dalam menyatukan

berbagai gagasan strategi yang selanjutnya dituangkan menjadi kebijakan maupun program.

Penetapan visi organisasi menjadi hal penting sebagai sumber inspirasi dan motivator bagi pihak-pihak terlibat dan berkompeten untuk memastikan arah, membangkitkan semangat, dan harapan serta manumbuhkan kreatifitas bagi setiap aparat supaya mempunyai kinerja yang lebih baik untuk mewujudkan yahapan kondisi masa depan yang ingin dicapai. Dengan memperhatikan potensi dan sumberdaya yang dimiliki, maka visi DINAS KOMINPARDA Kota Blitar sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA KOTA BLITAR SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA YANG DITOPANG SENI BUDAYA DAN SISTEM INFORMASI KOMUNIKAASI DAERAH YANG MAMPU MEMBERIKAN KONTRIBUTSI POSITIF TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT ”

Adapun penjelasan visi sebagai berikut :

Dinas Kominparda sebagai Intitusi Pemerintah Kota Blitar harus aktif dan akomodatif menjalankan fungsinya mengembangkan informasi, komunikasi serta kepariwisataan dan seni budaya daerah. Dengan demikian seluruh jajaran aparat Dinas Kominparda harus bersemangat mengaktualisasikan perannya masing-masing yang berorientasi kepada kualitas kinerja prima sehingga bermanfaat dan dan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat yang berdampak dukungan dan kepercayaan pada pemerintah semakin besar.

2) Misi

Untuk menjawab bagaiman visi tersebut dapat dicapai maka ditetapkan misi DINAS KOMINPARDA Kota Blitar yang merupakan unsur paling fundamental dari visi yang telah ditetapkan untuk menjembatani kondisi saat ini menuju kondisi masa dan yang harus dicapai melalui suatu tindakan. Misi merupakan tuntutan dalam pengambilan keputusan sehingga harus diketahui dan dipahami semua pihak yang berkepentingan untuk lebih mempercepat dan mempermudah proses pencapaiannya.

Organisasi yang digerakkan oleh misi akan berjalan lebih efisien, efektif, inovatif, fleksibel, dan menumbuhkan semangat yang lebih tinggi dari pada ahnya digerakkan oleh peraturan yang bersifat normative dan mengikat.

Dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak maka misi DINAS KOMINPARDA Kota Blitar sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas kepariwisataan dengan optimalisasi sarana prasarana yang ada dan pengembangan obyek baru.
- b. Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat wisata dalam pelestarian sejarah dan nilai-nilai tradisional, pengembangan nilai-nilai luhur budaya daerah dan semangat patriotisme sebagai dasar pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan informasi dan komunikasi daerah yang mampu menjembatani arus informasi timbal balik dan sebagai bahan perumusan serta evaluasi kebijakan pemerintah kota blitar.

b. Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Dinas Komunikaasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Tujuan organisasi merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi, yaitu :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.
2. Menggambarkan arah strategis Dinas Kominparda dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kominparda.
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi Dinas Kominparda

Sehingga tujuan Dinas Kominparda sebagai berikut :

1. Misi Pertama

Meningkatkan kualitas kepariwisataan dengan optimalisasi sarana prasarana yang ada dan pengembangan obyek baru.

Tujuannya adalah :

Mantapnya pengembangan system perdagangan barang dan jasa unggulan melalui pengembangan pariwisata daerah yang didukung sarana prasarana yang memadai

2. Misi Kedua

Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat wisata dalam pelestarian sejarah dan nilai-nilai tradisional, pengembangan nilai-nilai luhur budaya daerah dan semangat patriotisme sebagai dasar pembangunan daerah.

Tujuannya adalah

Meningkatkan semangat kejuangan dan cinta tanah air yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME sebagai prasarat perwujudan Blitar sebagai Kota PATRIA yang ditandai dengan semangat membangun daerah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya daerah dan semangat patriotisme.

3. Misi Ketiga

Meningkatakan dan mengembangkan pelayanan informasi dan komunikasi daerah yang mampu menjembatani arus informasi timbal balik dan sebagai bahan perumusan serta evaluasi kebijakan pemerintah kota blitar.

Tujuannya adalah

Meningkatkan kualitas pelayanan prima pemerintah daerah kepada masyarakat melalui media informasi komunikasi untuk serta mampu menjembatani komunikasi dua arah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Adapun sasaran Dinas Komunikaasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar yaitu sasarannya menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, sasaran merupakan penjabaran lebih rinci dari tujuan organisasi dan dapat dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. Oleh karenan

itu sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur dan dicapai.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran yang dimaksud serta mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan maka sasaran yang akan dicapai DINAS KOMINPARDA Kota Blitar sebagai berikut :

1. Tujuan

Mantapnya pengembangan system perdagangan barang dan jasa unggulan melalui pengembangan pariwisata daerah yang didukung sarana prasarana yang memadai.

Sasarannya adalah :

- a) Meningkatkan wisatawan yang didahului peningkatan sarana prasarana obyek wisata yang sudah ada dan pembangunan obyek wisata yang baru.
- b) Peningkatan jaringan kerjasama wisata regional, nasional dengan menggunakan teknologi informasi.
- c) Pemberdayaan insane atau pelaku misata.

2. Tujuan

Meningkatkan semangat kejuangan dan cinta tanah air yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME sebagai prasarat perwujudan Blitar sebagai Kota PATRIA yang ditandai dengan semangat membangun daerah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya daerah dan semangat.

Sasarannya adalah

- a) Meningkatkan pengembangan nilai-nilai budaya dan semangat patriotisme sebagai nilai dasar pembangunan daerah.
- b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengembangan kesadaran pemuda terhadap wawasan kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme patriotisme serta kecintaan pada daerah.

3. Tujuan

Meningkatkan kualitas pelayanan prima pemerintah daerah kepada masyarakat melalui media informasi komunikasi untuk serta mampu

menjembatani komunikasi dua arah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Sasarannya adalah

Meningkatkan dan mengembangkan informasi dan komunikasi daerah melalui media informasi komunikasi yang mampu menjembatani komunikasi dua arah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

c. Struktur Dinas Komunikaasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar

Sesuai dengan surat keputusan walikota blitar nomor 34 tahun 2004 tata kerja Dinas Komunikaasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar, adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Informasi, Komunikasi, dan Pariwisata Daerah, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah ditetapkan susunan organisasi Dinas Komunikaasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Bagian Tata Usaha membawahi :
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. Sub bagian keuangan dan Program
- 3) Bidang Pengembangan Komunikasi Daerah (Bangkomda),membawahi :
 - a. Seksi pelayanan informasi dan komunikasi massa
 - b. Seksi pengembangan komunikasi dan dokumentasi
- 4) Bidang Pariwisata membawahi :
 - a. seksi pengembangan potensi pariwisata
 - b. seksi pemasaran, pajak, dan retribusi
- 5) Bidang Seni Dan Budaya membawahi :
 - a. seksi pengembangan potensi budaya
 - b. seksi sejarah dan nilai-nilai tradisional
- 6) UPTD Pusat Informasi Pariwisata (PIPP)
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikaasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

- a. memimpin dan mengkoordinasikan segala kegiatan Dinas Komunikaasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar
- b. mengadakan hubungna dan kerjasama dengan instansi lain untuk memperlancar pelaksanaan tugas.

2) Bagian Tata Usaha

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dipimpin oleh kepala bagian tata usaha. Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan program serta koordinasi penyelenggaraan organisasi dan tata laksana dinas. Untuk menjalankan tugas dimaksud, bagian tata usaha mempunyai fungsi : penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, penyelenggaraan tata usaha kepegawaian dan urusan umum, dan penyelenggaraan tata usaha

Kepala bagian tata usaha dalam pelaksanaan tugasnya membawahi :

a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, tugas :

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan serta urusan kepegaaewaiian, disiplin, dan kesejahteraan pegawai. Fungsinya yaitu Pelaksanaan surat menyurat, Pelaksanaan tugas-tugas kearsipan, Pelaksanaan urusan protokoler, Pelaksanaan urusan rumah tangga, Penyusunan formasi kepegawaian, Penyusunan pengemabangan karier pegawai, Penyusunan dan pengelolaan disiplin pegawai, Penyusunan pengolahan data informasi pegawai, dan Peningkatan kesejahteraan pegawai.

b. Sub Bagian Keuangan Dan Program, tugasnya yaitu :

Sub bagian keuangan dan program mempunyai tugas menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, penatausahaan keuangan menyusun rencana program dam kegiatan. Fungsinya yaitu : Penyusunan rencana belanja aparatur, Penyusunan rencana anggaran belanja public, Penyusunan pendapatan asli daerah, Pelaksanaan urusan gaji, Penyiapan usulan pengangkatan

pemegang kas, pembantu pembukuan, pembantu pengeluaran administrasi umum, pembantu pengeluaran belanja modal, bendaharawan gaji, dan pembuat daftar gaji, Penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan, Pengumpulan dan pengsistematisasian data bahan penyusunan program dan kegiatan, Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan, Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, Pengelolaan, pengkajian, dan pendokumentasian data dasar dan data hasil pembangunan, dan Penyusunan laporan pelaksanaan program dari kegiatan pembangunan.

3) Bidang Pengembangan Komunikasi Daerah (Bangkomda)

Dalam melaksanakan tugas-tugas bidang pengembangan komunikasi daerah (Bangkomda) dipimpin oleh kepala bidang pengembangan komunikasi daerah (Bangkomda) yang mempunyai fungsi:

- a) pengumpulan, pengolahan bahan perumusan pembinaan dan bimbingan teknis, pengelolaan, pengembangan, penataan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan informasi, komunikasi dan dokumentasi daerah.
- b) Pelaksanaan penataan dan pengendalian pelayanan informasi daerah.
- c) Pelaksanaan penataan, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian informasi massa.
- d) Pelaksanaan, pengolahan, penyiapan, distribusi dokumentasi daerah,
- e) Pengelolaan radio daerah.

Kepala bidang pengembangan komunikasi daerah (Bangkomda) dalam melaksanakan tugasnya membawahi :

- a. Seksi Pelayanan Informasi Dan Komunikasi Massa, Mempunyai fungsi yaitu Pengumpulan, pengelolaan dan perumusan bahan pembinaan dan pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan, pengembangan, pengawasan dan

pengendalian pelayanan informasi, hubungan komunikasi dan radio pemerintah daerah, Pengumpulan data kondisi daerah, bahan-bahan informasi tentang prosedur pelayanan dan seluruh perangkat daerah, Pelayanan informasi kondisi daerah dan prosedur pelayanan dari seluruh perangkat daerah, Pengembangan dan pemberdayaan organisasi serta kolompok-kelompok komunikasi masyarakat, Pengembangan sistem komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat melalui media cetak dan elektronik dan tatap muka, Inventarisasi, klarifikasi, dan distribusi aspirasi masyarakat, Pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pos telekomunikasi dan Pengelolaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian radio pemerintah daerah.

- b. Seksi Pengembangan Komunikasi Dan Dokumentasi Mempunyai fungsi yaitu Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan pembinaan, pelaksanaan bimbingan teknis, inventaris, pengumpulan dan penyimpanan dokumen penyelenggaraan program daerah, Pelaksanaan inventarisasi pengembangan komunikasi dan program daerah, Perekaman pelaksanaan kegiatan daerah, Penyimpanan dokumentasi kegiatan daerah, Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan komunikasi kegiatan daerah, Identifikasi, perencanaan, dan pengadaan kebutuhan sarana informasi, komunikasi dan dokumentasi, dan Penyiapan, pengelolaan, pemberdayaan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana informasi, komunikasi dan dokumentasi.

4) Bidang Pariwisata

Dalam melaksanakan tugas-tugas pariwisata, dipimpin oleh kepala bidang pariwisata yang mempunyai tugas :

- a) Pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan pembinaan, pelaksanaan bimbingan teknis, identifikasi, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian fasilitas pariwisata,

obyek wisata, dan tugas-tugas pendukung pengembangan wisata daerah.

- b) Peningkatan, pengembangan, penertiban pengawasan dan pengendalian pemberdayaan insan wisata
- c) Pengelolaan obyek wisata.
- d) Penyelenggaraan promoso wisata daerah.
- e) Penyelenggaraan pemasaran, pemungutan dan pelaporan retribusi.

Kepala bidang pariwisata dalam pelaksanaan tugasnya membawahi:

- a. Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata, mempunyai tugas yaitu Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan pembinaan, pelaksanaan bimbingan teknis pengawasan dan pengendalian pengelolaan, pengembangan obyek wisata dan fasilitas penunjang pariwisata; Identifikasi dan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan pengembangan obyek wisata dan fasilitas wisata; Penataan dan pengelolaan obyek wisata dan fasilitas penunjang wisata; Pemberdayaan insan wisata, usaha jasa pariwisata, dan kelompok-kelompok wisata; Pengaturan tenaga/petugas operasional obyek wisata ; dan Pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan obyek wisata.
- b. Seksi Pesaran Pajak Dan Retribusi Mempunyai fungsi yaitu Pengumpulan, pengelolaan, dan perumusan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, pemasaran bidang pariwisata; Pendataan dan pengumpulan retribusi dari seksi-seksi pelaksana; Penyelenggaraan pemasaran dan pelayanan permohonan perijinan jasa-jasa usaha; Pelaksanaan koordinasi dengan seksi-seksi yang menangani secara teknis jenis-jenis perijinan; Penyelesaian administrasi perijinan; Penyelenggaraan promosi wisata; Penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran; dan Penetapan dan pengelolaan arena promosi wisata.

5) Bidang Seni Budaya

Dalam melaksanakan tugas-tugas seni budaya dipimpin oleh kepala bidang seni budaya yang mempunyai fungsi :

- a) Pengumpulan, pengelolaan, dan perumusan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, penggalian, pengembangan, pelestarian, pengawasan dan pengendalian, pemasaran dan perijinan, seni budaya dan nilai-nilai tradisional.
- b) Pelaksanaan inventarisasi, penggalian, penetapan, pengembangan, seni tradisional dan modern.
- c) Pengadaan, pengawasan, dan pengendalian pertunjukkan seni budaya daerah.
- d) Pemberdayaan kelompok-kelompok seni-seni dan budaya.
- e) Penggalian, pengembangan dan fasilitas kegiatan seni budaya serta penyebarluasan sekarang dan nilai-nilai tradisional.
- f) Penyelenggaraan, pemasaran dan permohonan perijinan seni budaya daerah dan fasilitas penulisan serta penanaman nilai-nilai daerah.
- g) Identifikasi, perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana seni budaya, sejarah dan nilai-nilai tradisional.

Kepala bidang seni dan budaya dalam melaksanakan tugasnya membawahi:

- a. Seksi Pengembangan Potensi Seni Dan Budaya mempunyai fungsi yaitu Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan, pelaksanaan bimbingan teknis, eksplorasi, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, pemasaran dan perijinan kesenian dan kebudayaan daerah; Pelaksanaan inventarisasi, eksplorasi, penetapan pengembangan seni tradisional dan modern; Pengadaan, pengawasan dan pengendalian pertunjukan seni budaya daerah; Pemberdayaan kelompok-kelompok seni dan budaya; Penggalian, pengembangan dan fasilitas kegiatan seni budaya; Identifikasi,

perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana seni budaya tradisional dan modern; dan Penyiapan, pengelolaan, pemberdayaan sarana prasarana seni budaya tradisional.

- b. Seksi Sejarah Dan Nilai-Nilai Sejarah Tradisional (Jarahnitra) mempunyai fungsi yaitu Pengumpulan, pengelolaan, dan perumusan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, penggalian, pengembangan, pelestarian sejarah serta nilai-nilai tradisional; Pelaksanaan inventarisasi, penulisan, pelestarian, dan penyebarluasan sejarah dan nilai-nilai tradisional termasuk penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Pelaksanaan fasilitas penulisan dan penanaman nilai-nilai daerah; Penyelenggaraan kegiatan apresiasi dan pengembangan nilai-nilai daerah; Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian, pemberdayaan sejarah dan nilai-nilai tradisional sebagai asset daerah; Identifikasi, perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana pelestarian sejarah dan nilai-nilai tradisional; dan Penyiapan, pengelolaan, pemberdayaan sarana prasarana pelestarian sejarah dan nilai-nilai tradisional.

6) UPTD - Pusat Informasi Pariwisata

Dalam melaksanakan tugas-tugas UPTD – pusat informasi dipimpin oleh kepala UPTD – pusat informasi yang mempunyai tugas yaitu Penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, tata usaha kepegawaian, keuangan dan urusan umum operasional pengelolaan pusat informasi pariwisata; Perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan Pusat Informasi Pariwisata; Pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program tersebut; Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Publik serta Pendapatan Asli Daerah khusus Pusat Informasi Pariwisata; Inventarisasi, pengadaan, penataan, pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan dan pemberdayaan sarana prasarana Pusat

Informasi Pariwisata; Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional Pusat Informasi Pariwisata dan pengaturan petugas lapangan; Melaksanakan pendapatan, pengumpulan, penyetoran dan pelaporan retribusi tanda masuk wisatawan, parkir kendaraan, kios dan pedagang kaki lima di Pusat Informasi Pariwisata; Menyambut dan mengarahkan kedatangan wisatawan. Pusat Informasi Pariwisata dan melayani informasi yang dibutuhkan; Memberikan bantuan darurat kepada wisatawan yang membutuhkan pelayanan medis; dan Pemeliharaan kenyamanan, ketertiban dan kebersihan Pusat Informasi Pariwisata.

5) Sumber Daya Organisasi

a. Personalia

Jumlah personalia Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar per 31 Desember 2006 sebanyak 110 orang dengan jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 40 orang PNS, 7 orang CPNS, Pegawai Negeri Honorer (PTT) 57 orang dan sukarelawan sebanyak 6 orang.

b. Sarana dan Prasarana

Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar yang berlokasi di jalan Ir Soekarno 11C Kota Blitar, dengan luas tanah \pm 1500m dan luas bangunan \pm 566m bangunan.

d. Isu Strategis

Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar berkaitan dengan usaha untuk pencapaian misinya terdapat isu-isu yang strategis, isu-isu tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pariwisata

a. Pengembangan destinasi kepariwisataan bisa diwujudkan berupa :

Pengembangan obyek pariwisata unggulan.

- Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan.
- Peningkatan operasionalisasi Pusat Informasi Pariwisata dan perdagangan.
- Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi.

- Pengembangan tujuan wisata.
 - b. Pengembangan pemasaran pariwisata
 - Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata.
 - Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri.
 - Promosi wisata melalui media luar ruang.
 - c. Pengembangan sumber daya manusia
 - Terwujudnya pedoman, criteria standart, dan prosedur untuk mendukung pengembangan pariwisata.
 - Meningkatkan kegiatan bimbingan, supervise dalam pembangunan wisata.
- 2) Seni Budaya
- a. Pelestarian, pengelolaan dan pengembangan keragaman seni budaya yang bisa diwujudkan berupa :
 - Pengelolaan karya cetak dan karya rekam.
 - Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.
 - Penyelenggaraan dialog atau seminar kebudayaan.
 - Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah.
 - Fasilitasi penyelenggaraan festival kesenian dan kebudayaan daerah.
 - Revitalisasi dan reaktualisasi, resitalisasi budaya local.
 - Pelestarian petilasan adat.
 - Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.
 - b. Peningkatan pemberian peluang dan bantuan kemudahan dan bantuan dalam mendorong pembangunan seni budaya yang bias diwujudkan berupa :
 - Fasilitas pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan daerah.
 - Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama dibidang budaya.
- 3) Informasi dan Komunikasi
- a. Pengembangan media-media informasi berupa:
 - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

- Pembentukan sarana pembelajaran komunikasi informatika.
 - Operasional radio mahardika.
 - Fasilitas penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP
 - Pembinaan dan pengembangan jaringan informasi komunikasi.
- b. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terhadap informasi :
- Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.
 - Pembentukan pusat pengaduan layanan public.

Perumusan isu-isu strategis yang berupa pengembangan sumber daya manusia, pengembangan pasar, peningkatan kerjasama local regional dan nasional dibidang pariwisata, hubungan kelmbagaan Negara-masyarakat, akan digunakan sebagai landasan kritis untuk menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Adapun strategi yang akan dipilih dikelompokkan menjadi 4 kelompok sebagai berikut :

- a. Startegi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang seluas-luasnya.

Mendayagunakan seluruh kekuatan berupa dukungan peraturan perundangan, tersedianya SDM aparatur sarana prasarana dan dana dengan memanfaatkan rencana pemerintah Kota Blitar dalam bidang informasi, komunikasi, pariwisata dan seni budaya seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2006-2010.

- b. Strategi menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mencegah dan mengayasi ancaman.

Mengakomodasi tuntutan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan informasi, komunikasi, pariwisata dan seni budaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang.

Meningkatkan kualitas sumberdaya aparat dan masyarakat yang professional dan berwawasan kedepan dalam pembangunan informasi, komunikasi pariwisata dan seni budaya.

- d. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Meningkatkan peran serta masyarakat serta koordinasi antar lembaga perangkat daerah yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan dukungan stake holder yang ada.

e. Kebijakan

Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang secara teliti menggambarkan bagaimana strategi akan dilaksanakan, kebijakan juga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan yang berfungsi mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian pada kondisi dimana setiap pejabat dan pelaksana di organisasi mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi dalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, maka kebijakan Dinas Kominparda Kota Blitar diarahkan kepada tiga hal, yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas pariwisata yang mengarah pada optimalisasi kinerja obyek wisata terbangun dan menciptakan obyek wisata yang baru.
- 2) Peningkatan dan pengembangan nilai seni dan semangat kepahlawanan yang mengarah pada pengembangan nilai-nilai budaya dasar masyarakat dan peningkatan internalisasi nilai-nilai kejuangan dan patriotisme yang bersumber dari semangat kepahlawanan Ir Soekarno, Sodancho supriadi, dan Aryo Blitar.
- 3) Peningkatan dan pengembangan pelayanan informasi dan komunikasi daerah serta menjembatani arus informasi timbale balik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

f. Program

Sebagai upaya untuk mengimplementasikan kebijakan organisasi dapat dicapai melalui penyusunan program kerja operasional yang merupakan tahapan proses dari langkah-langkah yang akan diambil serta penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Kota Blitar 2006-2010 maka program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kominparda adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan menumbuhkembangkan daya saing destinasi, produk dan usaha pariwisata.
- 2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata melalui berbagai upaya pemasaran dan promosi terpadu baik tingkat local, regional, dan nasional maupun internasional untuk memantabkan citra pariwisata Kota Blitar, peningkatan kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.
- 3) Program Pengembangan Kemitraan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya kerjasama antar lembaga antar lembaga guna mendukung pembangunan pariwisata
- 4) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan apresiasi masyarakat di bidang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya serta meningkatkan upaya-upaya penanaman nilai seni dan budaya.
- 5) Program pengembangan nilai budaya.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat atas nilai-nilai budaya yang tumbuh sebagai dasar dalam pengembangan yang berwawasan kebudayaan.
- 6) Program Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya penanaman nilai-nilai-seni dan budaya.
- 7) Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya menciptakan komunikasi timbale balik antara pemerintah dan masyarakat.
- 8) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat di bidang informasi dan komunikasi serta mampu memperdayakan dirinya sendiri di bidang informasi dan komunikasi.

B. Penyjian Data Fokus

1. Potensi Obyek Wisata Kota Blitar

Berdasarkan buku pedoman RIPPDA (Risalah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kota Blitar, kebijaksanaan pembangunan kepariwisataan Jawa Timur didasarkan pada kawasan pengembangan kepariwisataan (KPP), dalam pembagian tersebut Kota Blitar termasuk dalam KPP 4 yaitu pada koordinator wilayah Madiun. Kebijaksanaan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan harmonisasi program pariwisata anatr daerah di propinsi Jawa Timur. Kondisi yang kondusif untuk pengembangan pariwisata antar daerah diharapkan dapat mengembangkan daerah tertentu yang kurang mempunyai potensi wisata.

Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Propinsi Jawa Timur lebih ditekankan pada pembagian berdasarkan koordinasi wilayah yaitu :

1. KPP 1 : Pada Koordinator Wilayah Surabaya
2. KPP 2 : Pada Koordinator Wilayah Bojonegoro
3. KPP 3 : Pada Koordinator Wilayah Malang
4. KPP 4 : Pada Koordinator Wilayah Madiun
5. KPP 5 : Pada Koordinator Wilayah Jember

Pembagian tersebut didasarkan atas pengelompokkan beberapa jenis wisata yang mempunyai kesamaan sifat. Langkah optimasi pelayanan bagi konsumen direncanakan dapat dicapai melalui pengembangan fisik yaitu dengan mendistribusikan kegiatan yang ada ke arah pusat daerah wisata. Berdasarkan hal tersebut maka kebijaksanaan pengembangan pariwisata Jawa Timur di bagi menjadi 3 kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan wisata alam, meliputi wisata pantai dan wisata agro.
- b. Kegiatan wisata Budaya, meliputi wisata keurbakalaan dan wisata budaya.
- c. Kegiatan wisata Buatan.

Sasaran kebijaksanaan pengembangan pariwisata pada KPP 4 adalah diversifikasi produk wisata (alam, agro, budaya, purbakala, ziarah dan konvensi) yang menggunakan strategi dengan implikasi :

- a. Pemeliharaan lingkungan alam dan mempertahankan daya tariknya
- b. Penyiapan/pengarahannya masyarakat.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang ke obyek-obyek wisata di Blitar
- d. Meningkatkan wisata agro yang menarik dan unik.

a. Potensi wisata Kota Blitar dapat dikelompokkan berdasarkan jenis wisata sebagai berikut :

Pembangunan pada sektor pariwisata merupakan suatu program andalan pemerintah Indonesia dan pada pelaksanaannya sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing. Pada Kota Blitar pariwisata dikelola oleh Dinas Kominparda dan menurut data potensi pariwisata Kota Blitar dan pengamatan tentang potensi pariwisata Kota Blitar yang diperoleh peneliti sebagai berikut :

1. Wisata Minat Khusus (Pilgrim)

Wisata Pilgrim adalah jenis wisata yang dikaitkan dengan agama kepercayaan ataupun adat istiadat dalam masyarakat. Obyek yang dikunjungi adalah tempat-tempat suci atau orang-orang terkenal dan pemimpin yang diagungkan, jenis wisata ini antara lain :

- 1) Makam Bung Karno
- 2) Makam Aryo Blitar
- 3) Makam Pangeranan
- 4) Makam Djojo Digdan
- 5) Makam Syekh Imam Hambali
- 6) Makam Syekh Abdul Mongid
- 7) Masjid Agung
- 8) Wihara
- 9) Klentheng
- 10) Goa Maria

11) Peringatan Haul Bung Karno,(RIPPDA (Risalah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kota Blitar)

2. Wisata Budaya

Wisata budaya adalah wisata yang dikaitkan dengan tata cara, adat istiadat, kebiasaan dan budaya suatu masyarakat Kota Blitar, antar lain :

- a. Museum dan perpustakaan Bung Karno
- b. Istana Gebang
- c. Monumen PETA
- d. Kawasan bangunan bersejarah
- e. Peringatan hari jadi Kota Blitar
- f. Hari lahirnya Pancasila/Grebeg Pancasila,(RIPPDA (Risalah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kota Blitar)

3. Wisata Industri

Adalah wisata yang dikaitkan dengan sentra industri, antara lain :

- a. Kerajinan bubut
- b. Kerajinan onyx
- c. Kerajinan ukir kayu dan gembol
- d. Kerajinan monel, Kalung dan manik-manik
- e. Sambel pecel
- f. Kawasan belanja sovenir
- g. Wajik kletik ,(RIPPDA (Risalah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kota Blitar)

4. Wisata Pertanian

Adalah jenis wisata yang berkaitan dengan obyek-obyek pertanian dalam arti luas, antara lain :

- a. Agro wisata BBI Rembang
- b. Agro Wisata Blimbing di kelurahan Karang Sari
- c. Pasar ikan hias di kelurahan Kepanjen Lor
- d. Kebun binatang Mini di kelurahan Sentul ,(RIPPDA (Risalah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kota Blitar)

5. Wisata Olahraga

Adalah jenis Wisata yang dikaitkan dengan kegiatan olah raga atau lokasi sarana olah raga, antara lain :

- a. Stadion Patria
- b. Kawasan Olah Raga Otomotif
- c. Sumber Udel Water Park
- d. Taman Rekreasi Herlingga Jaya
- e. GOR Soekarno Hatta ,(RIPPDA (Risalah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kota Blitar)

6. Wisata Cagar Alam

Adalah jenis wisata yang dikaitkan dengan obyek-obyek cagar alam taman lindung dan sebagainya yang dilindungi Undang-Undang, antara lain :

- a. Kebon Rojo
- b. Alon-Alon
- c. Goa Jaran,(RIPPDA (Risalah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kota Blitar)

b. Lokasi obyek wisata

1. Makam Bung Karno

Kawasan Makam Bung Karno perlu dikembangkan lebih lanjut, meski sekarang sudah kelihatan tertata dan rapi. Adapun pegembangannya meliputi pembangunan gedung perpustakaan, museum Bung Karno, gedung pertemuan dan Art Galery, yang berlokasi di kawasan makam.

Untuk mempercantik kawasan makam perlu dibangun gerbang masuk kawasan makam yang ditempatkan di perempatan jalan Mayjen Sungkono serta diperlukannya penyeragaman alat transportasi becak guna menarik para wisatawan, tidak hanya itu, para juru foto di kawasan Makam.

Kepala Dinas Kominparda Kota Blitar juga menegaskan bahwa :

“Selain menjadi Icon pariwisata Kota Blitar, Makam Bung Karno juga dapat menarik wisatawan sejarah, dimana Beliau seorang Presiden Pertama RI yang sangat disegani. Hal ini sangat berpotensi dalam pembangunan pariwisata”(wawancara, Rabu 9 Juni 2010, pkl 09.45 di Dinas Kominparda Kota Blitar)

2. Makam adipati Aryo Blitar

Makam Adipati Aryo Blitar terletak di jalan Rayung Wulan Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukerejo Kota Blitar yaitu sekitar 2 kilo meter dari arah Pusat Kota Blitar. Bangunan tersebut sudah dikelilingi pagar dan gapura pintu masuk.

Sama halnya dengan makam bung Karno, makam Adipati Aryo Blitar merupakan wisata ziarah. Rencana pembagnunan tempat wisata tersebut yaitu mengadakan rehabilitasi ringan dan perbaikan jalan masuk menuju tempat wisata.

3. Makam Pangeranan

Lokasi makam Pangeranan yaitu di jalan Sultan Agung tepatnya di sebelah timur Istana Gebang. Komplek Makam Pangeanan memiliki nuansa jawa asli dan disekitar komplek makam terdapat masjid dan makam keluarga.

4. Makam Dojo Digdan , Makam Syekh Imam Hambali dan Makam Syekh Abdul Mongid.

Makam Djojo Digdan terletak di jalan Melati. Akses jalan sudah memadai karena tempat wisata terletak di jalan utama yang dilewati angkutan umum. Makam Syekh Imam Hambali dan Makam Syekh Abdul Mongid terletak di Kelurahan Pakunden kecamatan Sukorejo.

5. Masjid Agung Kota Bitar

Masjid Agung merupakan masjid terbesar di kota Blitar. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga sebagai tempat istirahat sejenak (mabid).

6. Wihara, Klenteng, dan Goa Maria

Wihara terletak di jalan Slamet Riyadi, Klentheng terletak di jalan Merdeka sedangkan Goa maria terletak di kelurahan Ngadirejo Kecamatan KepanjenKidul.

7. Peringatan Haul Bung Karno

Peringatan Haul Bung Karno dilaksanakan setiap tanggal 20 Juni bertempat di Istana Gebang. Dari segi pariwisata, acara ini masih memerlukan peningkatan promosi dan laon sebagainya.

8. Museum dan Perpustakaan Bung Bung Karno

Museum dan Perpustakaan Bung Karno terletak di Kelurahan Bendogerit bersebelahan dengan Makam Bung Karno. Di dalam Museum terdapat

berbagai macam dokumen dan referensi buku-buku, barang-barang bersejarah yang berkaitan dengan Bung Karno.

9. Istana Gebang

Istana Gebang berada di jalan Sultan Agung, Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Istana Gebang ini merupakan tempat tinggal keluarga Bung Karno. Tempat ini dijadikan tempat wisata yang menyimpan berbagai barang-barang kenangan masa hidup Bung Karno dan keluarganya.

10. Monumen Peta

Monumen PETA terletak di jalan Sodanco Supriyadi. Di depan monumen terdapat Taman Makam Pahlawan (TMP) di TMP tersebut terdapat prasasti, dimana merupakan situs sejarah pemancangan bendera merah putih pertama kali oleh tentara PETA.

11. Peringatan Hari Jadi Kota Blitar

Hari jadi kota blitar diperingati setiap tanggal 1 April. Dilihat dari segi pariwisata, mempunyai potensi pariwisata yang cukup besar yaitu dengan mengadakan perlombaan.

12. Hari lahirnya Pancasila/Grebeg Pancasila

Peringatan Hari lahirnya Pancasila dilaksanakan pada tanggal 1 Juni. Hal ini di kota Blitar pelaksanaan peringatan hari lahirnya Pancasila diperingati masyarakat Kota Blitar dengan nama Grebeg Pancasila dengan mengadakan upacara adat.

Hal ini ditegaskan dari pernyataan Kepala Dinas Kominparda Kota Blitar bahwa :

“Di Kota Blitar dalam peringatan Hari Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni diperingati dengan upacara adat masyarakat Kota Blitar dengan nama Grebeg Pancasila. Upacara yang dilaksanakan bertujuan memupuk jiwa nasionalisme yang dalam upacaranya dikemas dalam bentuk budaya jawa. Upacara adatnya meliputi Bedol Grebeg, Ritus Grebeg Pancasila, Ritus Kirab Gunung Limo, dan Ritus Kenduri Pancasila. Dan menurut kepala Dinas Inkomparda hal ini memiliki potensi yang sangat bagus untuk obyek daya tarik wisata.” (wawancara, Rabu 9 Juni 2010, pkl 09.45 di Dinas Kominparda Kota Blitar)

13. Kawasan kerajinan ukir dan gembol, bubutan kayu, batu onyx, monel, kalung dan manik-manik

Kerajinan bubutan kayu merupakan suatu kerajinan yang mengubah kayu menjadi bentuk yang lebih menarik seperti, vas bunga, guci, asbak dan lain-lain. Sentra industri ini terletak di kelurahan Tanggung Kecamatan KepanjenKidul Kota Blitar.

Kerajinan batu onyx sama seperti kerajinan bubut, tetapi bahannya yang berbeda. Kerajinan ini terletak di jalan wilis dan jalan sedap malam Kota Blitar. Kawasan wisata belanja souvenir monel, kalung dan manik-manik dapat ditemui di kelurahan Kelampok kecamatan Sananwetan.

14. Kawasan Wisata Belanja Souvenir

Kawasan wisata belanja souvenir dapat ditemui di jalan Slemet Riadi dan jalan Dr Cipto. Di kawasan ini terdapat berbagai makanan khas seperti sambel pecel dan wajik kletik.

15. Wajik Kletik dan Sambel Pecel

Makanan khas Kota Blitar yang terkenal seluruh Indonesia adalah Wajik Kletik. Sentra Industri makanan ini terletak di jalan Sultan Agung Kecamatan Sananwetan dekat lokasi Istana Gebang. Sedangkan Sambel Pecel terletak di kelurahan Karanag sari Kecamatan Sukorejo.

16. Agro wisata BBI Rembang, Agro Wisata Blimbing, Pasar Ikan, Kebun Binatang Mini

Kawasan wisata agro terletak di Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan yang dulu digunakan sebagai Balai Benih Ikan (BBI). Agro wisata blimbing terletak di Kelurahan Karang sari. Di mana blimbing sebagai komoditi yang sangat bagus dan sebagi andalan kota Blitar. Pasar ikan terletak di jalan Dr Wahidin, di mana penjual ikan berkumpul dan melakukan transaksi ikan. Kawasan wisata Kebun Binatang Mini terletak dekat dengan makam Bung Karno, jadi wisatawan bisa berwisata religi dari makam Bung Karno sekaligus menikmati wisata kebun binatang.

17. Stadion Olah Raga Patria, Kawasan Olah Raga Otomotif, Kawasan Wisata Pemandian Sumber Udell, GOR Olah Raga Soekarno Hatta.

Lokasi stadion Olah Raga Kota Blitar cukup strategis yang berada di jalan Kelud Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjen Kidul. Stadion ini merupakan sarana Olah Raga bagi masyarakat Kota Blitar. Kawasan wisata Olah Raga Otomotif terletak di lingkungan jalan Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan (eks. TPA) luas sekitar 4 hektar. Wisata ini sebagai penunjang promosi wisata Kota Blitar. Kawasan wisata Sumber Udel terletak di jalan Brantas Kelurahan Bendo. Kawasan wisata Sumber Udel merupakan kawasan Wisata yang tergolong baru, dan menjadi potensi bagi Kota Blitar yang sangat bagus dengan tatanan yang indah dengan lingkungan yang asri.

Dipertegas dalam wawancara yang diperoleh peneliti dengan Kepala Dinas Kominparda bahwa :

“Jenis wisata Olah Raga yang ada di Kota Blitar yang pada saat ini banyak menarik wisatawan adalah wisata pemandian Water Park sumber Udel. Di mana tempat wisata ini menyediakan tempat untuk olah raga renang dan hiburan. Selain itu, Stadion Patria yang baru-baru ini dipergunakan sebagai ajang pertandingan Sepak Bola Divisi Utama. Hal ini juga selain menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Blitar juga akan menambah PAD Kota Blitar.” (wawancara, Rabu 9 Juni 2010, pkl 09.45 di Dinas Kominparda Kota Blitar)

Hal serupa dijelaskan oleh Bpk Ismoyo yang berprofesi sebagai penjual makanan yang menempati kios di stadion Patria Kota Blitar penduduk sekitar kawasan Stadion patria Kota Blitar bahwa :

“Dengan adanya pembangunan wisata olah raga yang ada di Kota Blitar misal Stadion ini, alhamdulillah saya merasa cukup senang mas, karena dengan adanya ini saya dapat berjualan dan menafkahi keluarga saya. Apalagi waktu kemarin ada pentas olah raga sepak bola nasional, saya bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan”(Wawancara, Rabu 9 Juni 2010, pkl 16.00 di lokasi kios stadion)

18. Taman Kebon Rojo dan Alon-Alon

Taman Kebon Rojo terletak di belakang Balai Kota tepatnya di jalan Diponegoro Kecamatan Sananwetan. Di mana di kawasan ini setiap akhir pekan selalu ramai karena sebagai taman bermain anak-anak serta ditambahi dengan lingkungan yang asri, banyak pohon-pohon besar, dengan udara yang sejuk. Selain itu taman ini juga sebagai taman wisata ilmiah karena banyak juga ditanami pohon-pohon langka.

Alon-Alon Kota Blitar mempunyai letak yang cukup strategis karena terletak ditengah kota. Tempat ini sering sebagai kawasan berkumpul para pecinta otomotif pada malam Minggu, sedangkan pada hari Minggu pagi digunakan sebagai tempat olah raga.

2. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan sektor pariwisata terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar

a. Perubahan Sosial

Perubahan yang terjadi pada masyarakat Kota Blitar yang mengalami proses pembangunan dari sektor pariwisata merupakan suatu gejala wajar jika dilihat dari arti pembangunan yang merupakan usaha rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dalam hal pembangunan Pariwisata Kota Blitar terjadi dampak sosial masyarakat yang bisa dilihat seperti :

1) Perubahan Persepsi

Dalam penelitian ini perubahan persepsi pada masyarakat Kota Blitar terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan masyarakat terhadap pembangunan obyek wisata. Dan perubahan pandangan tersebut dapat mengarah pada arah yang negatif atau positif.

Dari hasil penelitian dengan metode wawancara terhadap masyarakat sekitar Obyek wisata maka diperoleh data yang menyatakan bahwa terjadi perubahan persepsi yang mengarah pada arah positif maupun negatif. Masyarakat Kota Blitar yang mengalami perubahan kearah yang baik yaitu mereka yang senang dengan adanya pembangunan obyek Wisata yang merasa lebih baik.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Junaedi warga sekitar obyek wisata religi Makam Bung Karno, sebagai berikut :

“ya begini mas, saya lebih senang dengan adanya pemabangunan obyek pariwisata dan perbaikan yang dilakukan oleh pihak yang terkait, ya pokoknya saya senang mas”
(wawancara, Kamis 10 Juni 2010, pk1 08.30)

Hal yang senada juga di lontarkan oleh Pak Samsul, dimana beliau dulunya sebagai penjual asongan.

“ya saya merasa sangat senang mas, dengan adanya pembangunan obyek wisata ini saya bisa berjualan dengan lebih semangat, karenan dengan adanya pembangunan ini dapat menarik wisatawan banyak dan jualan saya jadi laku” (wawancara, Kamis 10 Juni 2010 09.00)

Selain itu persepsi masyarakat muncul juga disebabkan karena terjadi perbedaan bangunan, perbedaan sarana prasarana yang disediakan. Hal ini disampaikan oleh pak Slamet sebagai pedangang makanan kaki lima.

“saya dulu sebelum di bangun PIPP atau parkiranan khusus kendaraan wisatawan Makam Bung Karno saya berjualan di lapak kaki lima mas, tapi sekarang saya bisa menempati kios kecil yang disediakan oleh pengelola obyek wisata” (wawancara, Kamis 10 Juni 2010, pk1 10.00)

Dalam perubahan persepsi ini masyarakat yang dulunya bekerja pada pertanian sekarang dengan adanya pembangunan pariwisata dengan banyak dibangunnya obyek-obyek pariwisata, banyak penduduk sekitar obyek pariwisata bekerja pada non-pertanian. Hal ini dikarenakan mereka berpendapat atau berpersepsi bahwa dengan bekerja pada non pertanian akan mendapat penghasilan yang bisa merubah hidup mereka masing-masing.

Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan penduduk sekitar obyek wisata di Makam Bung Karno, Perpustakaan Makam Bung Karno, dan PIPP.

Seperti yang dikatakan ibu hasanah yang bertempat tinggal di dekat PIPP mengatakan bahwa :

“Dulunya saya berprosi sebagai buruh peteni mas, tapi dengan adanya pembangunan PIPP yang baru ini saya memilih meninggalkan pekerjaan lama saya dan saya pindah jadi penjual sovenir”
(wawancara, Kamis 10 Juni 2010, pk1 10.30)

Didukung juga dengan pernyataan bapak Sulistyono yang bertempat tinggal di daerah sentul mengatakan bahwa.

“saya pengen merubah hidup mas, yang dulunya saya bekerja sebagai petani sekarang saya tinggalkan mas, saya sekarang jadi juru parkir, lumayan mas penghasilannya” (wawancara, Kamis 10 Juni 2010, pkl 10.39)

Selain dari penduduk sekitar obyek wisata yang merasakan dampak sosial yang kebanyakan positif, Kepala Dinas Kominparda Kota Blitar juga menegaskan bahwa :

“Dalam pembangunan obyek pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Blitar banyak sedikitnya pasti menimbulkan dampak. Dampak tersebut bisa positif dan negatif, dari segi positif yaitu persepsi atau cara pandang masyarakat sekitar obyek pariwisata akan sedikit demi sedikit berubah, hal ini dikarenakan karena banyaknya wisatawan yang datang masyarakat berinteraksi sehingga mempengaruhi persepsi masyarakat itu sendiri. Sedangkan segi negatifnya adalah terjadi pada masyarakat yang kurang mengerti akan pembangunan sehingga mereka hanya memikirkan kenyamanan fasilitas tanpa berfikir biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan fasilitas yang layak dan pada akhirnya mereka merasa terbebani oleh biaya tersebut.” (wawancara, Rabu 9 Juni 2010, pkl 09.45 di Dinas Kominparda Kota Blitar)

2) Perubahan Interaksi Sosial

Perubahan interaksi sosial dalam penelitian ini adalah apabila terdapat perubahan interaksi sosial dalam masyarakat dalam menjalankan aktivitas berjalan, para penarik becak, dan penempatan parkir.

Dari hasil penelitian terhadap pola interaksi mereka, maka dapat diketahui bahwa terjadi perubahan interaksi sosial pada masyarakat. Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Sugianto sebagai penjual makanan, yang menyatakan bahwa:

“dulu mas, sebelum ada pembangunan parkiran PIPP yang sekarang digunakan tempat parkir, saya menjajakan barang jualan dengan berjalan, tetapi dengan adanya parkiran PIPP sehingga dibangun kios-kios dan saya menempatinya saya bisa menjajakan jualan tanpa keliling lagi, karena wisatawan sudah datang sendiri manakala mau kembali ke kendaraannya masing-masing.” (wawancara, Kamis 10 Juni 2010, pkl 10.40)

Pernyataan lain juga muncul dari mulut Bu suminah, seorang penjual bunga untuk nyekar beliau juga telah merasakan interaksi sosial yang lumayan kelihatan karena adanya pembangunan sektor pariwisata ini. Hal ini disampaikan sebagai berikut :

“saya dulu mas berjualan bunga buat nyekar itu mesti menawarkan rame-rame dengan teman-teman saya, tetapi dengan pembangunan ini dan obyek wisata Makam Bing Karno jadi bagus dan banyak wisatawan yang datang saya tidak lagi menawarkan rame-rame sama teman-teman saya dan hal ini dapat menguntungkan saya”
(wawancara, Rabu 10 Juni 2010, pkl 11.10)

Hak senada juga dikatakan oleh Herwanto yang pekerjaannya sebagai tukang parkir sepeda motor di kawasan Pemandian Sumber Udel Park.

“hal yang saya alami alhamdulillah membawa dampak yang baik mas, karena dinas yang mengelola (dinas Kominparda) obyek ini membagi tempat parkir. Seperti sepeda motor sendiri mobil ada tempatnya sendiri. Selain dapat berinteraksi dengan para wisatawan juga dapat menambah pendapatan.”
(wawancara, Kamis 10 Juni 2010, pkl 11.35)

Selain itu Menurut Kepala Dinas Kominparda Kota Blitar interaksi tidak hanya antara penduduk sekitar dengan para wisatawan melainkan pihak Dinas Kominparda Kota Blitar dengan penduduk sekitar, hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Kominparda Kota Blitar sebagai berikut :

“yang dilakukan pihak Dinas Kominparda dengan penduduk sekitar seperti simbiosis mutualisme yaitu saling menguntungkan di kedua belah pihak. Interaksi sosial yang dilakukan pihak Dinas Inkomparda Kota Blitar yaitu mengadakan pengobatan gratis, melaksanakan kerjabakti bersama dilingkungan obyek wisata. Hal ini akan menumbuhkan iteraksi sosial yang positif.”
(wawancara, Rabu 9 Juni 2010, pkl 09.45 di Dinas Kominparda Kota Blitar)

Dari wawancara yang saya lakukan dengan masyarakat sekitar obyek wisata dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembangunan pariwisata yang akan mengakibatkan banyaknya wisatawan akan mempengaruhi perubahan interaksi sosial masyarakat sekitar obyek wisata. Dalam hal ini perubahannya mengarah pada segi positif, dikarenakan tersedianya kois-kios, pembeli banyak, wisatawan banyak sehingga menunjang transaksi antra penjual dan pembeli.

b. Perubahan Ekonomi

a. Terbukanya Lapangan Pekerjaan

Dalam hal ini pembangunan pariwisata di kota di Kota Blitar senantiasa sangat berdampak terhadap perubahan tingkat perekonomian. Hal ini dikarenakan oleh adanya lapangan kerja baru yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Selain itu tingkat perekonomian masyarakat sekitar obyek wisata pada khususnya, dan masyarakat Kota Blitar pada umumnya bisa meningkat. Tidak hanya itu saja, dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Menurut data dari Dinas Inkomparda Kota Blitar dimana laoangan pekerjaan paling banyak pada sektor perdagangan dapat dijelaskan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 14
Jenis Usaha 2008

Jenis Usaha	2006 (buah)	2007 (buah)	2008 (buah)
Perancangan	18	19	14
Bahan Bangunan	30	28	21
Pertanian	6	6	24
Makanan/Minuman	23	35	31
Mebel	4	11	9
Tekstil,sepatu dan pakaian	7	25	11
Palenan	8	12	8
Perhiasan	1	2	4
TV, Radio, dan Tape	12	27	9
Lain-lain	70	69	77
Barang cetakan	-	6	27
Jumlah	179	240	235

Sumber: Dinas Kominparda Kota Blitar

Dalam tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jenis usaha atau pekerjaan yang paling banyak adalah pada penjualan makanan atau minuman, disini dari tahun 2006 sampai 2008 mengalami kenaikan, dengan jumlah pada tahun 2008 sekitar 31.

Pada pembangunan pariwisata pekerjaan jasa sangat banyak di temui. Seperti jasa penginapan dan hotel, seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini

Tabel 15
Perusahaan Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur menurut Jenis Per Kecamatan 2008

Kecamatan	Hotel			Penginapan		
	Jumlah (buah)	Kamar (buah)	Tempat Tidur (buah)	Jumlah (buah)	Kamar (buah)	Tempat Tidur (buah)
Sukorejo	23	39	52	1	10	10
Kepanjenkidul	10	397	654	1	20	20
Sananwetan	2	119	189	1	10	10

Sumber : BPS Kota Blitar

Tabel 16
Perusahaan Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur menurut Jenis Per Tahun

Kota Per Tahun		Hotel			Penginapan		
		Jumlah (buah)	Kamar (buah)	Tempat Tidur (buah)	Jumlah (buah)	Kamar (buah)	Tempat Tidur (buah)
Kota Blitar	2008	14	555	895	3	40	40
	2007	13	509	794	3	42	42
	2006	13	499	774	3	42	52
	2005	13	496	775	3	38	53

Sumber : BPS Kota Blitar

Dalam perkembangan pembangunan pariwisata dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 mengalami kenaikan. Di mana pada tahun 2008 jumlah Hotel 14, dengan 555 kamar, dan 895 tempat tidur.

Pada sektor pariwisata, pekerjaan yang paling banyak yaitu dari mulai pedagang dan jasa, jasa bisa meliputi keamanan, penginapan, hotel, penarik becak dll. Dan hal tersebut membawa dampak yang positif bagi masyarakat sekitar.

Seperti apa yang diungkapkan oleh Ibu Yayuk yang selama kurang lebih 5 tahun bekerja sebagai pedagang oleh-oleh khas Blitar yang berjualan di dekat obyek wisata Perpustakaan Makam Bung Karno menjelaskan seperti ini :

“Sebelum saya bekerja jualan seperti ini mas, saya adalah seorang ibu rumah tangga, penghasilan hanya diperoleh dari suami. Tetapi setelah ada pembangunan obyek wisata ini alhamdulillah dapat menambah penghasilan suami saya.”

(wawancara, Kamis 10 Juni 2010, pkl 11.55)

Tidak hanya itu saja, seperti yang dijelaskan oleh pak Slamet yang bekerja sebagai penyedia jasa sebagai tukang becak wisata.

“saya sangat senang mas, sebelum ada perpustakaan ini ya disini tidak begitu ramai seperti ini, tapi setelah dibangun yang dulunya sebagai pekerja lepas saya dapat bekerja sebagai penarik becak wisata.”

(wawancara, Kamis 10 Juni 2010, pkl 12.10)

Hal serupa juga dikatakan oleh Joko, di mana dia dulu sebagai pengangguran sekarang dapat bekerja sebagai jasa parkir. Joko menjelaskan bahwa :

“Ya begini ini mas, saya ambil peluang saja, rumah saya kan dekat dengan Water Park Sumber udel. Di situ kan banyak pengunjung, jadi dari pada saya menganggur saya memanfaatkan lahan depan rumah saya gunakan sebagai lahan parkir.”

(wawancara, Kamis 10 Juni 2010 pkl 13.00)

Hal senada juga dijelaskan oleh Andri yang bekerja sebagai petugas keamanan di kawasan wisata Perpustakaan Makam Bung Karno.

“Saya sangat bersyukur mas bisa dipekerjakan di sini, yang dulunya saya sebagai buruh lepas, saya sekarang dapat bekerja dengna mapan”

(wawancara, Kamis 10 Juni 2010 pkl 13.20)

Selain itu, Kepala Dinas Kominparda Kota Blitar menjelaskan bahwa :

“Dengan adanya pembangunan tersebut lapangna kerja sangat terbuka lebar. Seperti menjadi petugas keamanan, petugas kebersihan, portir (penarik tiket), pedagang, jasa penarik becak wisata. Akan tetapi bagi pekerjaan seperti petugas keamanan, portir, petugas kebersihan mayoritas penduduk sekitar dan perekrutannya tetap secara profesional dengan klasifikasi-klasifikasi tertentu.

(wawancara, Rabu 9 Juni 2010, pkl 09.45 di Dinas Kominparda Kota Blitar)

Dari wawancara yang saya lakukan tersebut, pembangunan membarikan peluang kerja yang sangat banyak. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan seperti adanya pekerjaan sebagai pedagang, jasa, sampai keamanan dan sebenarnya masih banyak lagi.

b. Meningkatkan pendapatan

Meningkatnya pendapatan pada masyarakat Kota Blitar akan adanya pembangunan sektor pariwisata sangat kelihatan. Hal ini dapat di ketahui dari tabel tingkat pendapatan Pendapatan regional per kapita Kota Blitar tahun 2002 – 2008 sebagai berikut :

Tabel 17
Pendapatan regional per kapita Kota Blitar tahun 2002 – 2008

Tahun	Pendapatan per kapita (Rp)	Perubahan (%)
2002	4.037.405	10,90
2003	4.473.584	10,80
2004	4.910.540	11,36
2005	5.811.584	18,35
2006	6.725.837	15,73
2007	7.532.173	11,99
2008	8.653.897	14,98

Sumber: BPS Kota Blitar

Bila dihitung berdasarkan harga berlaku, pada tahun 2008 PDRB per kapita masyarakat Kota Blitar sebesar Rp. 8.653.897,- per tahun. PDRB per kapita tahun 2008 ini naik sebesar 14,98 persen dari pendapatan per kapita tahun 2007.

Hal ini dikarenakan sektor pariwisata sangat bersinggungan dengan pedagang dan jasa. Banyak masyarakat sekitar obyek wisata mempunyai pekerjaan sebagai pedagang dan penjual jasa.

Seperti yang diungkapkan oleh Pak wiyoto seorang pemilik jasa penginapan.

“Dengan adanya pembangunan Perpustakaan dan Museum Makam Bing Karno kawasan ini menjadi ramai mas. Ya kira-kira kenaikan pendapatan sampai 50%. Ya alhamdulillah mas.yang dulunya penghasilan setiap minggu Rp 500.000 sekarang naik sampai Rp 750.000. Akan tetapi ya tidak langsung segitu mas, ya bertahap.”
(wawancara, Kamis 10 Juni 2010 pkl 13.40)

Sedangkan kenaikan yang cukup juga berarti dialami oleh para pedagang bunga yang digunakan untuk ziarah. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Yayuk.

“Dulu mas sebelum adanya pembangunan Perpustakaan dan Museum Bung Karno wisatawan relatif sedikit pedapatan saya berkisar antara Rp 10.000 sampai Rp 15.000 per hari, itupun kalau rame. Tapi sekarang ya saya bersyukur dengan adanya pembangunan yang baru ini banyak wisatawan yang datang sehingga pendapatan saya lumayan naik ya berkisar Rp 20.000 sampai RP 30.000.”
(wawancara, Kamis 10 Juni 2010 pkl 14.00)

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Yoyok yang dulunya bekerja sebagai tukang parkir sekarang bekerja sebagai petugas keamanan di waterpark Suber udel.

“Sebelum saya jadi petugas keamanan saya bekerja sebagai petugas parkir mas, ya sedikitlah penghasilan saya itu. Setelah saya mendengar ada pembangunan obyek wisata saya melamar jadi pegawai keamanan, alhamdulillah diterima. Secara tidak langsung penghasilan saya naik mas, sekarang penghasilan saya Rp900.000 per bulan.”
(wawancara, Kamis 10 Juni 2010 pkl 14.10)

Peningkatan pendapatan tidaklah langsung terjadi pada masyarakat sekitar obyek wisata, peningkatan berlangsung secara bertahap. Hal ini dikarenakan penyesuaian diri terhadap obyek wisata itu dan wisatawan yang mengunjungi. Pengunjung tidak langsung datang banyak, melainkan bertahap juga. Tetapi dengan berjalannya waktu masyarakat dapat mengatasi hal tersebut.

3. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pembangunan Pariwisata Di Kota Blitar.

a. Faktor Pendorong

1) Blitar disebut sebagai kota Proklamator.

- a. Terdapat Makam Presiden RI yang Pertama yang merupakan potensi pariwisata yang tidak bisa dimiliki oleh Kabupaten / Kota yang lain, keberadaan makam Presiden RI yang pertama ini mampu menjadi icon pariwisata Kota Blitar.

Hal ini senada dengan penjelasan Kepala Dinas Kominparada Kota Blitar. Beliau menjelaskan bahwa :

“ Kota Blitar sangat bangga dengan disebutkannya icon Kota Blitar yaitu Kota Proklamator, hal ini dikarenakan Presiden RI pertama dimakamkan di Kota Blitar, dan Ir Soekarno juga pernah tinggal di

kota ini”(wawancara, Senin 14 Juni 2010, pkl 10.10 di Dinas Kominparda Kota Blitar)

Hal senada juga di jelaskan oleh Bpk Sunarto yang menjadi warga Kota Blitar bahwa :

“Langsung saja ya mas, dengan adanya Makam Bung Karno yang ada di Kota Blitar ini saya merasa bangga, karena di Kota yang relatif kecil ini ada makam presiden RI yang pertama dan telah dijadikan icon Kota Blitar” (wawancara Senin 14 Juni 2010 pkl 15.20 di jalan Ir sukarno)

- b. Terdapat Istana Gebang dan Musium dan Perpustakaan Bung Karno, keberadaan wisata ini mampu menguatkan icon Kota Blitar sebagai obyek Daya tarik wisata yang bernuansa kebangsaan yang mampu menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Hanik staf Dinas Kominparda Kota Blitar, beliau menjelaskan bahwa :

“Dengan adanya Istana Gebang, Musium dan perpustakaan Bung Karno menurut saya dengan adanya tempat wisata tersebut dapat menarik wisatawan dan menegaskan kalua Kota Blitar adalah Kota Proklamator” (wawancara, Senin 14 Juni 2010, pkl 10.30 di Dinas Kominparda Kota Blitar)

Tidak hanya itu dengan adanya pembangunan perpustakaan Bung Karno telah memudahkan masyarakat Kota Blitar untuk mendapatkan informasi dengan membaca berbagai macam buku. Hal ini juga dibenarkan oleh Wulan yang masih sekolah di SMAN 1 Kota Blitar bahwa :

“Dengan adanya perpustakaan ini mas saya selaku sebagai pelajar merasa senang, karena saya dapat mencari bahan-bahan untuk tugas dari sekolah dengan mudah, karena banyak sekali koleksi bukunya.”(wawancara, 16 Juni 2010 pkl 10.00 di halaman SMAN Kota Blitar)

- 2) Adanya Political Will dari Pemerintah untuk mengembangkan destinasi pariwisata.

Dijelaskan oleh Kepala Kominparda Kota Blitar melalui wawancara bahwa :

“Dengan adanya Political will atau disebut dengan kesanggupan pemerintah dalam mengembangkan pembangunan pariwisata untuk tujuan pariwisata, hal ini akan menjadi faktor pendorong terhadap pariwisata Kota Blitar kearah yang lebih baik dan maju.” (wawancara, Senin 14 Juni 2010, pk1 10.10 di Dinas Kominparda Kota Blitar)

- 3) Terwujudnya Perda No 4 Tahun 2004 tentang retribusi memasuki kawasan wisata Bung Karno.

Hal ini senada dengan pendapat Kepala Dinas Kominparda Kota Blitar bahwa :

“Adanya Perda No 4 Tahun 2004 tentang retribusi memasuki kawasan wisata Bung Karno itu dapat sebagai faktor pendorong pariwisata dan juga menambah PAD Kota Blitar” (wawancara, Senin 14 Juni 2010, pk1 10.10 di Dinas Kominparda Kota Blitar)

b. Faktor Penghambat

- 1) Kesadaran masyarakat kurang.

- a. Masyarakat sekitar obyek wisata dalam berpartisipasi pembangunan kurang begitu maksimal.

Hal ini juga dipertegas oleh Kepala Dinas Kominparda Kota Blitar bahwa :

“Dalam menjalankan pembangunan sangat diperlukan partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, jika tidak ada itu maka mustahil pembangunan akan berjalan seperti apa yang kita inginkan. Hal ini sebagai salah satu faktor penghambat pembangunan.” (wawancara, Senin 14 Juni 2010, pk1 10.10 di Dinas Kominparda Kota Blitar)

Pernyataan dari kepala Dinas Kominparda Kota Blitar juga diperjelas oleh Bpk Saipul yang merupakan penduduk asli Blitar yang berdomisili di Sentul bahwa :

“kesadaran masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jalannya pembangunan, di mana dalam hal ini masyarakat sekitar yang berperan”. wawancara, Senin 14 Juni 2010, pk1 15.50 di kawasan Wisata Makam Bung Karno)

- b. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Menurut Bapak Joko selaku staf Dinas Kominparda Kota Blitar mengatakan bahwa :

“Sebagian masyarakat belum bisa menelaah arti pembangunan, sehingga dalam menjalankan pembangunan dan menjalankan program pariwisata kurang begitu maksimal, karena tingkat terkendala dengan kepercayaan masyarakat yang masih rendah.” (wawancara, Senin 14 Juni 2010, pkl 10.35 di Dinas Kominparda Kota Blitar)

- c. Karakteristik masyarakat/wisatawan yang datang pada bulan-bulan tertentu., terutama yang berkaitan dengan kepercayaan dan adat istiadat. Menurut penjelasan Kepala Dinas Kominparda Kota Blitar penghambat yang lain adalah :

“Faktor penghambat yang lain yaitu dengan banyaknya wisatawan yang datang dengan latar belakang yang berbeda-beda dan adat istiadat yang berbeda juga hal ini akan perlahan-lahan menghambat pembangunan pariwisata.” (wawancara, Senin 14 Juni 2010, pkl 10.10 di Dinas Kominparda Kota Blitar)

2) Tingkat pemasaran dan promosi kurang.

- a. Belum maksimalnya pemasaran dan promosi di wilayah regional Jawa Timur maupun seluruh Indonesia terlebih yang menjangkau luar negeri.
- b. Belum optimalnya sistem informasi pemasaran dan promosi.

Hal ini dipertegas dalam wawancara dengan staf Dinas Kominparda Bapak Rustam Kota Blitar bagian Promosi bahwa :

“ Dalam penanganan promosi pariwisata memang masih kurang mas, jadi pihak Dinas akan menambah porsi pemasaran dan promosi guna memperkenalkan pariwisata Kota Blitar ke publik” (wawancara, Senin 14 Juni 2010, pkl 10.10 di Dinas Kominparda Kota Blitar)

Bpk Wawan yang bertempat tinggal di kawasan wisata water park Sumberudel yang saya wawancarai juga menambahkan keterangan dari Kepala Dinas Kominparda Kota Blitar bahwa :

“Tingkat promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata masih kurang, jadi hal ini dapat menjadi kendala dalam memperkenalkan potensi pariwisata Kota Blitar” (wawancara, Senin 14 Juni 2010, pkl 16.10 di desa Sangut Kota Blitar)

- 3) Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah.
 - a. Koordinasi antar stakeholder masih lemah, tingginya egoistis antar sektoral menyulitkan koordinasi antar dinas, sehingga ada pencitraan bahwa pembangunan pariwisata hanya bertumpu pada unit kerja yang membagi saja, padahal pariwisata mempunyai proses produksi yang bersifat holistik dan multisektor. Seperti diakui oleh Kepala Dinas Kominparda Kota Blitar bahwa :

“Dalam menjalankan program dari pemerintah sebenarnya sudah dapat dilaksanakan dengan baik, namun yang jadi penghambat yaitu koordinasi antara stakeholder masih lemah.” (wawancara, Senin 14 Juni 2010, pkl 10.10 di Dinas Kominparda Kota Blitar)

C. Analisa Data fokus

1. Potensi Pariwisata Kota Blitar

Kota Blitar merupakan salah satu kota yang relatif kecil, di mana Kota Blitar hanya mempunyai tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Sananwetan, Kecamatan Kecamatan Sukorejo, dan Kecamatan Kepanjenkidul. Dengan hanya memiliki tiga kecamatan tersebut, Kota Blitar banyak memiliki potensi pariwisata. Mengenai arti dari potensi pariwisata yaitu merupakan segala yang dimiliki, yang dapat diolah atau dimanfaatkan sebagai obyek wisata yang dapat dinikmati keindahannya. Dalam potensi pariwisata ini dapat berupa taman rekreasi dan pemandian, wisata religi, wisata olah raga.

Dari data yang peneliti peroleh, Kota Blitar terkenal dengan sebutan Kota Proklamator. Disebut Kota Proklamator dikarenakan makam Presiden Pertama Indonesia yaitu Ir Soekarno dimakamkan di Kota Blitar. Dan hal ini merupakan juga sebagai *icon* Kota Blitar. Hal ini dapat dikatakan sebagai *icon* karena warga Kota Blitar sangat menghargai dan menghormati Bung Karno.

Menurut data yang ada di Dinas Inkomparda Kota Blitar dari buku pedoman RIPPDA (Risalah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kota Blitar, Di Kota Blitar potensi pariwisata yang dapat dinikmati ada beberapa jenis, antara lain Wisata Minat Khusus (Pilgrim) adalah jenis wisata yang dikaitkan dengan agama kepercayaan ataupun adat istiadat dalam masyarakat. Obyek yang dikunjungi adalah tempat-tempat suci atau orang-orang terkenal dan pemimpin yang diagungkan, jenis wisata ini antara lain : Makam Bung Karno,

Masjid Agung, Wihara, Klenteng, Peringatan Haul Bung Karno. Jika peringatan Haul Bung Karno tersebut selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Wisata Budaya. Wisata budaya adalah wisata yang dikaitkan dengan tata cara, adat istiadat, kebiasaan dan budaya suatu masyarakat Kota Blitar, antar lain : Museum dan perpustakaan Bung Karno, Istana Gebang, Monumen PETA, Kawasan bangunan bersejarah, Peringatan hari jadi Kota Blitar. Wisata Industri merupakan wisata yang dikaitkan dengan sentra industri, antara lain : Kerajinan bubut, Kerajinan onyx, Kerajinan ukir kayu dan gembol, Kerajinan monel, Kalung dan manik-manik, Sambel pecel Kawasan belanja souvenir, Wajik kletik. Wisata Pertanian Adalah jenis wisata yang berkaitan dengan obyek-obyek pertanian dalam arti luas, antara lain : Agro wisata BBI Rembang, Agro Wisata Blimbing di kelurahan Karang Sari, Pasar ikan hias di kelurahan Kepanjen Lor, Kebun binatang Mini di kelurahan Sentul. Wisata Olahraga Adalah jenis Wisata yang dikaitkan dengan kegiatan olah raga atau lokasi sarana olah raga, antara lain : Stadion Patria, Kawasan Olah Raga Otomotif, Sumber Udel Water Park, Taman Rekreasi Herlingga Jaya, GOR Soekarno Hatta. Wisata Cagar Alam Adalah jenis wisata yang dikaitkan dengan obyek-obyek cagar alam taman lindung dan sebagainya yang dilindungi Undang-Undang, antara lain : Kebon Rojo, Alon-Alon, Goa Jaran.

Potensi pariwisata yang sangat diunggulkan Kota Blitar adalah untuk menarik para wisatawan adalah Makam Bung Karno, Museum dan Perpustakaan Bung Karno, PIPP, dan Sumber Udel Water Park. Dengan adanya potensi pariwisata yang diunggulkan seperti diatas pihak Dinas Inkomparda Kota Blitar mempunyai strategi pengembangan guna mendukung pembangunan pariwisata Kota Blitar ke arah yang lebih bisa dikenal oleh masyarakat luas yaitu dengan jalan Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan yang ada di Kota Blitar, Untuk pengembangan dari segi informasi dengan cara peningkatan operasionalisasi Pusat Informasi Pariwisata dan perdagangan, pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi dalam hal pengembangan yang mengarah pada pembangunan pariwisata, Pengembangan tujuan wisata, Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata dengan menggandeng stakeholder yang berkompeten dalam pemasaran atau promosi pariwisata, Meningkatkan kegiatan bimbingan atau pelatihan terhadap pengelola pariwisata.

Dari strategi yang telah dilakukan Dinas Kominparda Kota Blitar tersebut selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Yoeti, (1997 : 33) dalam pembangunan pariwisata yang merupakan suatu kebijaksanaan yang sejalan dengan apa yang diinginkan dan dilakukan oleh pemerintah yaitu Berusaha memelihara kebudayaan serta tata lingkungan karena hal ini merupakan kekayaan Indonesia yang merupakan suatu daya tarik wisatawan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia; Perbaikan-perbaikan terutama diharapkan pada peningkatan dan rehabilitasi berdasarkan skala prioritas yang ditentukan, baik dari obyek-obyek wisata maupun sarana dan prasarana yang menunjang sektor pariwisata; Menyelenggarakan suatu pemasaran kepariwisataan yang terkoordinasi dan sistematis dan terarah secara terus-menerus; Mengadakan pembinaan, bimbingan serta pengadaan tenaga kerja yang terdidik dalam sektor pariwisata; Menyelenggarakan usaha bidang penelitian pengembangan sehingga dapat mewujudkan suatu mekanisme yang menampung, mengelola data-data kepariwisataan yang penting artinya bagi pengembangan selanjutnya; dan Mengadakan pembinaan dan pengaturan kelembagaan, baik sektor pariwisata maupun sektor pemerintah untuk menunjang pengembangan pariwisata nasional.

2. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan sektor pariwisata terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar

a. Perubahan Sosial

1) Perubahan Persepsi

Persepsi yang muncul pada masyarakat Kota Blitar dikarenakan hasil pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda dari setiap individu. Perubahan persepsi yang terjadi pada masyarakat Kota Blitar sebagai dampak pembangunan pariwisata terdiri dari dua jenis persepsi, yaitu persepsi tentang benda dan persepsi sosial. Persepsi yang mengarah pada jenis persepsi tentang benda, dikarenakan pembangunan obyek wisata mengandung unsur bentuk fisik yang jelas. Sehingga perubahan persepsi yang terjadi diperoleh dari perbandingan fisik. Perubahan ini dikarenakan bentuk fisik pembangunan obyek wisata yang jauh lebih baik

Sedangkan perubahan yang mengarah pada persepsi sosial adalah perubahan persepsi yang tidak hanya memandang pembangunan obyek wisata

secara fisik tetapi pembangunan obyek wisata juga mengandung unsur subyektif. Yang termasuk dalam persepsi ini adalah persepsi yang memandang bahwa dengan adanya obyek wisata diharapkan akan dapat memperbaiki kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat Kota Blitar. Mengingat belum banyak masyarakat yang dapat merasakan dampak dari pembangunan pariwisata.

Perubahan persepsi yang terjadi dapat mengarah pada perubahan persepsi yang positif tentang adanya pembangunan pariwisata. Di mana perubahan persepsi positif adalah adanya persepsi masyarakat yang merasa senang terhadap pembangunan obyek wisata dapat berfikir secara positif dan pola pikir dapat berkembang positif terhadap tujuan pembangunan pariwisata. Sedangkan perubahan persepsi negatif adalah adanya masyarakat yang merasa tidak siap dengan perubahan karena pembangunan pariwisata membuat masyarakat tidak dapat mengikuti sistem yang berlaku.

Perbedaan arah perubahan persepsi ini dikarenakan perbedaan karakteristik individu yang mempersepsikan serta pengetahuan dan tingkat pendidikan pada masyarakat Kota Blitar. Karena sebagian dari masyarakat yang mengalami perubahan negatif adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan terakhir Sekolah Dasar. Disamping pemahaman masyarakat yang kurang, hal ini juga dikarenakan proses sosialisasi yang kurang menyentuh terhadap pihak-pihak yang berkepentingan seperti Dinas Kominparda, pemerintah daerah secara mendalam serta penyampaian dengan bahasa yang kurang bisa dipahami. Sedangkan masyarakat yang mengalami perubahan positif adalah mereka yang memahami informasi yang diberikan dalam proses sosialisasi dan diantara mereka yang mengalami perubahan positif adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan terakhir SLTP dan SLTA. Maka dapat diketahui bahwa karakteristik individu dan tingkat pendidikan mempengaruhi pemberian persepsi seseorang.

Hasil penelitian ini selaras dengan pendapat Irwanto (1989,h.71) yang menyatakan bahwa dilihat dari segi individu persepsi dapat dibagi menjadi dua jenis, antara lain : persepsi positif yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang ditentukan ada manfaatnya dan

persepsi negatif yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang dipersepsikan. Pendapat lain yang mendukung hasil penelitian ini adalah Davidoff (Atkinson, 1990, h.233) yang menyatakan bahwa aspek yang mempengaruhi terbentuknya persepsi antara lain : pengalaman, lingkungan, kebudayaan, pola pikir.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan persepsi pada masyarakat Kota Blitar. Perubahan persepsi tersebut merupakan perubahan yang cenderung mengarah pada perubahan positif. Perubahan positif tersebut dikarenakan masyarakat dapat mengolah dan menafsirkan apa yang diterima, selain itu masyarakat yang mengalami perubahan persepsi positif adalah masyarakat yang menerima perubahan serta memahami akan tujuan pembangunan yang telah disampaikan dalam proses sosialisasi. Sedangkan sebagian kecil dari mereka juga terdapat masyarakat yang mengalami perubahan negatif, hal ini dimungkinkan karena kurangnya proses pemahaman terhadap informasi yang disampaikan oleh pemerintah dalam proses sosialisasi. Namun pada dasarnya positif atau negatifnya persepsi masyarakat sangat ditentukan oleh pengalaman, lingkungan, kebudayaan dan pola pikirnya selain faktor sosialisasi yang merupakan media untuk penyampaian informasi tentang Pembangunan pariwisata

2) Perubahan Interaksi

Perubahan interaksi sosial yang dialami oleh masyarakat Kota Blitar sekitar obyek wisata terjadi karena oleh adanya wisatawan yang datang dan melakukan interaksi dengan masyarakat dengan cara transaksi jual beli barang, saling komunikasi antar wisatawan dan masyarakat sekitar, pemanfaatan jasa, dan saling tukar informasi yang telah diberikan oleh Dinas yang terkait yaitu dinas Inkopar terhadap masyarakat sekitar. Menurut data yang peneliti unggah dari internet <http://www.geocities.com/laineberman.interaksi> Interaksi Sosial, bentuk interaksi yang ada yaitu Kerjasama, merupakan suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Persaingan, persaingan merupakan bentuk interaksi sosial yang

berfungsi menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang bersifat kompetitif. Pertentangan, merupakan proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Akomodasi, adalah suatu proses yang menuju pada usaha manusia untuk meredakan pertentangan dengan tujuan untuk mencapai kestabilan. (<http://www.geocities.com>). Perubahan interaksi sosial yang muncul setelah pembangunan pariwisata Kota Blitar juga terjadi pada bentuk interaksi sosial antara lain bentuk kerja sama. Dalam penelitian ini bentuk kerja sama ini interaksi sosial ini terdapat pada hubungan antara masyarakat yang memiliki hubungan timbal balik atau saling membutuhkan antara para penjual yang ada di sekitar obyek wisata dengan para wisatawan serta memiliki kepentingan yang sama.

Dalam penelitian ini hubungan kerjasama ditemukan pada hubungan antara pedagang dengan wisatawan, pedagang dengan pihak pengelola, Dinas yang terkait dengan masyarakat sekitar untuk mencapai tujuan bersama. Proses kerjasama dalam hubungan ini antara lain interaksi dalam pertukaran informasi serta hubungan yang saling menguntungkan. Bentuk interaksi ini mengarah pada perubahan positif karena dengan adanya pembangunan pariwisata yang terjadi meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama di antara mereka. Dimana sebelum diadakannya pembangunan pariwisata masyarakat berinteraksi hanya dengan sedikit wisatawan. Tetapi hal itu telah berubah seiring waktu, sehingga setelah adanya pembangunan pariwisata oleh pihak yang terkait hubungan yang saling menguntungkan seperti tukar-menukar informasi antara pedagang dengan wisatawan, pedagang dengan pihak pengelola, Dinas yang terkait dengan masyarakat sekitar.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa terjadi perubahan interaksi sosial yang mengarah pada perubahan positif. Karena dengan adanya pembangunan pariwisata dapat mempermudah dan memperluas proses interaksi sosial masyarakat sekitar obyek wisata Kota Blitar. Interaksi sosial yang dilakukan yaitu upaya kerjasama untuk meraih tujuan bersama dan kerja sama untuk memperoleh

informasi dari luar yang mendukung berkembangnya sektor pariwisata, memperluas jaringan informasi, dan dengan pola kerjasama yang dilakukan akan meningkatkan perdagangan yang dapat membantu perputaran ekonomi.

b. Perubahan Ekonomi

1) Terbukanya lapangan pekerjaan

Dalam pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kominparda Kota Blitar memberikan dampak yang sangat banyak (multi efek) bagi kehidupan masyarakat Kota Blitar. Pembangunan ini tidak lepas dari peran pemerintah, dimana menurut Kovner dalam Anonymous (2006) menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) peran pemerintah dalam pembangunan, yaitu sebagai (1) regulator, (2) pemberi biaya, dan (3) pelaksana kegiatan. Pertama, peran pemerintah sebagai regulator merupakan hal penting, dalam hal ini pengaturan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan tidak bisa begitu saja dibiarkan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Kedua, bukan hanya pemerintah yang bertindak sebagai penyedia biaya dalam pembangunan, tetapi masih ada pihak swasta yang juga memberikan peran yang sangat kuat dalam pembangunan. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah menjadikan peran swasta ini lebih muncul di permukaan. Meskipun demikian, swasta juga tidak akan pernah ada tanpa persetujuan dari pemerintah. Ketiga, pemerintah sebagai pelaksana kegiatan. Artinya pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan tentang adanya pelaksanaan suatu program perencanaan dalam pembangunan yang sedang dijalankan. Dalam pelaksanaannya pemerintah tidak akan berjalan tanpa ada kekuatan dari masyarakat dan adanya peran dari swasta.

Oleh karena itu pihak Dinas Kominparda melaksanakan pembangunan pariwisata Kota Blitar membawa dampak yang sangat banyak, antara lain terbukanya lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Seperti dijelaskan dalam tabel 13 (Jenis Usaha 2008) bahwa banyak pekerjaan atau terbukanya jenis usaha, dan paling banyak adalah jenis usaha pedagang makanan/minuman. Tidak hanya itu saja lapangan pekerjaan yang ada di sekitar obyek wisata antara lain pedagang, penjual jasa (penginapan dan Hotel), petugas keamanan, petugas kebersihan, penarik becak wisata. Pemerintah daerah melalui Dinas Inkoparda Kota Blitar dalam menyelenggarakan pembangunan yang membawa dampak

terbukannya lapangan kerja mengutamakan masyarakat kota blitar pada umumnya dan masyarakat sekitar pada khususnya. Akan tetapi menurut wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Kominparda Kota Blitar dalam merekrut pencari kerja semisal petugas keamanan, petugas kebersihan, dan petugas porter, pihak Dinas Inkomparda melakukan penyeleksian pegawai secara profesional dengan klasifikasi-klasifikasi tertentu guna mendapatkan pegawai yang berkualitas.

Selain itu, terbukannya lapangan pekerjaan tersebut dapat menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat sekitar obyek pariwisata pada khususnya dan masyarakat Kota Blitar pada umumnya. Hal ini diperkuat dengan pendapat Michael P Todaro, 1998 yaitu untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi dari tahap yang satu ketahapan yang lebih tinggi maka diperlukan adanya pendorong pertumbuhan ekonomi yang oleh Todaro disebutkan ada faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu: Akumulasi modal termasuk investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik, dan sumberdaya manusia; Pertambahan penduduk dalam arti peningkatan tenaga kerja baik secara kualitas maupun kuantitas; Kemajuan teknologi, yaitu hasil cara baru yang telah diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. (Michael P. Todaro, 1998:26)

2) Perubahan Tingkat Pendapatan

Dalam pembangunan sektor pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kominparda Kota Blitar mengarah terhadap paradigma pembangunan manusia yaitu berpusat pada manusia yakni perkembangan manusia, kesejahteraan, keadilan, dan berkelanjutan. Dikarenakan pembangunan pariwisata di Kota Blitar merupakan pembangunan yang sangat menguntungkan, dimana keuntungan tersebut dapat dirasakan oleh pemerintah daerah itu sendiri dan masyarakat sekitar obyek wisata pada khususnya dan masyarakat Kota Blitar pada umumnya. Hal ini dapat berupa peningkatan kesejahteraan di mana masyarakat sekitar dapat bekerja dan otomatis pendapatan akan naik sehingga kesejahteraan dapat diperoleh.

Dampak dari pembangunan pariwisata Kota Blitar antara lain naiknya tingkat pendapatan masyarakat. Dari pengolahan data dan wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan adanya perubahan pendapatan yang terjadi pada masyarakat di sekitar obyek wisata.

Peningkatan pendapatan yang terjadi bergantung pada besar kecilnya omset penjualan, karena semakin besar omset mereka semakin besar keuntungan dan sebaliknya. Peningkatan yang signifikan dirasakan oleh petugas keamanan, yang dulunya bekerja serabutan sekarang setelah bekerja sebagai petugas keamanan pendapatannya sekitar Rp 900.000,-/bulan, penjual jasa penginapan peningkatan pendapatannya naik sekitar 50% dengan kenaikan sekitar Rp 250.000,-/bulan . tidak hanya itu. Penjual bunga yang digunakan untuk ziarah pendapatannya juga ikut naik Rp 450.000,-/bulan..

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti menarik kesimpulan bahwa terjadi perubahan pendapatan pada masyarakat di Kota Blitar khususnya masyarakat sekitar obyek wisata di Kota Blitar setelah pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Perubahan tersebut mengarah pada perubahan yang positif karena terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Namun selayaknya penyelenggaraan pembangunan yang melalui suatu proses, begitu pula dengan peningkatan pendapatan masyarakat juga meningkat seiring proses kemajuan pembangunan pariwisata. Seperti yang dijelaskan oleh Sondang P. Siagian menyatakan bahwa ada lima tataran dalam penyelenggaraan pembangunan yang harus diketahui (Sondang 1984:29-30) : Pembangunan pada dirinya mengandung perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi yang kini ada, Pengertian pembangunan inheren dengan pertumbuhan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan disini ialah kemampuan suatu negara bangsa untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, Pembangunan ialah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Artinya keadaan yang lebih baik, yang didambakan suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan, Jika di terima pendapat bahwa pembangunan merupakan rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar, konotasinya ialah bahwa pembangunan itu didasarkan pada suatu rencana yang tersusun secara rapi dalam kurun waktu tertentu, Pembangunan bermuara pada titik akhir tertentu.

3. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pembangunan Pariwisata Di Kota Blitar.

a. Faktor Pendorong

Terdapatnya Makam Presiden RI yang Pertama yang merupakan potensi pariwisata yang tidak bisa dimiliki oleh Kabupaten / Kota yang lain, dengan ini keberadaan makam Presiden RI yang pertama ini mampu menjadi icon pariwisata Kota Blitar yang akan mudah diingat oleh wisatawan. Selain itu terdapat Istana Gebang dan Perpustakaan Bung Karno, obyek wisata ini mampu menguatkan icon Kota Blitar sebagai obyek Daya tarik wisata yang bernuansa kebangsaan yang mampu menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Hal ini sesuai dengan pendapat Direktorat Jendral Pariwisata (1989 : 9) jenis-jenis atau sumber pariwisata digolongkan menjadi tiga bagian yaitu : Sumber-sumber yang bersifat alamiah atau obyek wisata alam seperti iklim, pemandangan alam, lingkungan hidup, flora, fauna, kawah, danau, sungai, karang ikan dibawah laut, goa-goa, lembah, tebing, gunung, dan sebagainya; Sumber-sumber buatan manusia atau obyek wisata buatan manusia seperti sisa-sisa peradaban manusia di masa lampau, monument sejarah dan sebagainya; dan Sumber-sumber yang bersifat manusia atau obyek budaya seperti tari-tarian, sandiwara, drama, upacara-upacara, peristiwa penting dan sebagainya.

Sedangkan Kota Blitar mempunyai jenis pariwisata yaitu obyek buatan manusia yang mempunyai sejarah seperti makam Bung Karno dan Istana Gebang. Kelebihan ini merupakan suatu peluang yang harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah Kota Blitar melalui Dinas Inkopar sebagai naungan obyek wisata. Tidak hanya itu menurut buku pedoman RIPPDA (Risalah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kota Blitar Adanya *Political Will* atau kemauan dari Pemerintah untuk mengembangkan destinasi atau tujuan pariwisata dan terwujudnya Perda No 4 Tahun 2004 tentang retribusi memasuki kawasan wisata Bung Karno Karena dapat juga diartikan merupakan peluang berharga secara ekonomis. Karena dapat meningkatkan PAD Kota Blitar dari obyek wisata.

b. Faktor Penghambat

Di dalam melakukan suatu proses kegiatan, pasti kita jumpai beberapa kendala-kendala atau faktor yang menjadi penghambatnya. Dinas Kominparda Kota Blitar mengalami hal demikian di dalam menjalankan kegiatan/proses pembangunan sektor pariwisata. Diantaranya adalah tingkat kesadaran masyarakat yang kurang. Dari hasil penelitian yang penulis peroleh dari wawancara dengan Kepala Dinas Kominparda Kota Blitar bahwa pihak Dinas Kominparda Kota Blitar sendiri dalam melakukan pembangunan pariwisata terkendala dengan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan masih kurang, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah juga masih kurang. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Bukan hanya tingkat pendidikan saja yang menyebabkan tingkat partisipasi dalam pembangunan dan kurang percayannya masyarakat terhadap program pemerintah, karakter dan kebiasaan masyarakat sekitar yang belum berubah.

Dalam pembangunan dan pengembangan Pariwisata menurut Wahab (1989 : 158) pelaksanaan kegiatan promosi merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya kegiatan promosi kepariwisataan akan terdapat rasa ingin tahu para calon wisatawan yang akan melakukan kunjungan pada suatu obyek wisata. Dan menurut Wahab (1989 : 158) ada tiga tujuan yang harus dicakup publisitas dan promosi, yaitu : Memperkenalkan produk wisata seluas mungkin, menyusun produk itu agar sedapat mungkin menarik, menyampaikan pesan yang menarik tanpa harus berbohong. Media promosi yang digunakan untuk kegiatan promosi pariwisata adalah : *advertaising, publikasi, sales support, public relation*. Dengan demikian maka promosi merupakan cara yang terbaik untuk menarik minat wisatawan mengunjungi obyek wisata di daerah tujuan wisata. Namun dalam hal promosi pariwisata Di Kota Blitar masih kurang maksimal, sehingga untuk memperkenalkan obyek wisata yang ada di Kota Blitar sedikit sulit.

Pemerintah mendirikan lembaga pemerintahan yang mengurus soal pariwisata dengan maksud agar pariwisata yang ada di Indonesia dapat berkembang dan maju. Akan tetapi di Kota Blitar tingkat koordinasi antar stakeholder masih lemah, hal ini dikarenakan tingginya tingkat egoistis antar

sektoral menyulitkan koordinasi antar stakeholder, sehingga ada pencitraan bahwa pembangunan pariwisata hanya bertumpu pada unit kerja yang membagi saja, padahal pariwisata mempunyai proses produksi yang bersifat holistik dan multisektor. Tidak hanya itu lembaga masyarakat yang ada kurang begitu optimal dalam membantu dalam proses pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Potensi pariwisata Kota Blitar

Potensi pariwisata dapat diartikan sebagai semua kemampuan atau daya tarik yang dimiliki yang di dalamnya dapat diolah atau dimanfaatkan sebagai obyek wisata yang dapat dinikmati keindahannya. Dari pengolahan atau pemanfaatan dalam pengembangan potensi pariwisata harus memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagai tempat terdapatnya obyek wisata. Pemanfaatan potensi ini harus dilakukan dengan niat dan kemauan dari pihak penyelenggara pembangunan, karena pemanfaatan yang salah akan menjadikan potensi itu tidak berguna dan merugikan pihak lain. Potensi wisata ini dapat berupa obyek wisata pantai, taman rekreasi dan pemandian, wisata air terjun serta wisata alam (gunung). Dalam hal ini Kota Blitar yang merupakan kota yang relatif kecil yang menyimpan banyak sekali mempunyai potensi pariwisata yang mampu membawa daya tarik bagi wisatawan antara lain sebagai berikut :

7. Wisata Minat Khusus (Pilgrim)
8. Wisata Budaya
9. Wisata Industri
10. Wisata Pertanian
11. Wisata Olahraga
12. Wisata Cagar Alam

2. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan sektor pariwisata terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar

a. Perubahan Sosial

1) Perubahan Persepsi

Dalam perubahan persepsi pada masyarakat Kota Blitar terjadi perbedaan pandangan masyarakat terhadap pembangunan obyek wisata. Dan perubahan pandangan tersebut dapat mengarah pada arah yang negatif atau positif. Masyarakat Kota Blitar yang mengalami perubahan positif yaitu mereka yang senang dengan adanya pembangunan obyek Wisata yang merasa lebih baik. Hal

ini dikerenakan dengan adanya pembangunan pariwisata yang lebih baik akan mengakibatkan banyak wisatawan yang datang. Dan dengan adanya pembangunan pariwisata akan mengakibatkan perbedaan bangunan, perbedaan sarana prasarana yang disediakan yang mengarah kearah yang lebih baik.

2) Perubahan Interaksi Sosial

Perubahan interaksi sosial adalah hubungan-hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dan individu, individu dan kelompok dalam bentuk kerjasama, persaingan. Selain itu, interaksi sosial juga merupakan hubungan antara individu lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya. Pola kerjasama adalah usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini masyarakat Kota Blitar menggunakan pola kerjasama, karena dengan pola kerjasama dapat membawa masyarakat kearah yang lebih baik. Tidak hanya itu saja, masyarakat kota Blitar mengalami perubahan interaksi sosial karena adanya pembangunan pariwisata yang mengarah kearah yang lebih baik. Pihak Dinas Inkomparda juga turut andil seperti perbaikan bangunan, tindakan sosial dengan mengadakan pengobatan gratis, kerja bakti bersama dll.

b. Perubahan Ekonomi

1) Terbukanya Lapangan Pekerjaan

Dalam hal ini pembangunan pariwisata di kota di Kota Blitar senantiasa sangat berdampak terhadap perubahan tingkat perekonomian. Dengan adanya hal tersebut tingkat lapangan pekerjaan juga akan terbuka dengan sendirinya. Sehingga masyarakat Kota Blitar pada umumnya dan masyarakat kota Blitar pada khususnya dapat bekerja di daerah mereka sendiri. Hal ini terjadi karena pemabangunan yang terjadi yang mengarah ke arah yang positif. Pekerjaan yang tersedia antara lain sebagai pedagang, penjual jasa, petugas keamanan, petugas kebersihan, petugas parkir, dll.

2) Meningkatkan pendapatan

Dengan adanya pembangunan pariwisata yang telah berdampak pada terbukannya lapangan pekerjaan, ini akan mengakibatkan juga pada peningkatan pendapatan masyarakat Kota Blitar pada umumnya dan masyarakat sekitar obyek wisata pada khususnya. Meningkatnya pendapatan pada masyarakat Kota Blitar

pada umunya dan masyarakat sekitar obyek wisata pada khususnya akan adanya pembangunan sektor pariwisata dapat dirasakan. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata sangat bersinggungan dengan pedagang dan penjual jasa.

3. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pembangunan Pariwisata Di Kota Blitar.

c. Faktor Pendorong

- 4) Blitar disebut sebagai kota Proklamator.
- 5) Adanya *Political Will* dari Pemerintah untuk mengembangkan destinasi pariwisata.
- 6) Terwujudnya Perda No 4 Tahun 2004 tentang retribusi memasuki kawasan wisata Bung Karno

d. Faktor Penghambat

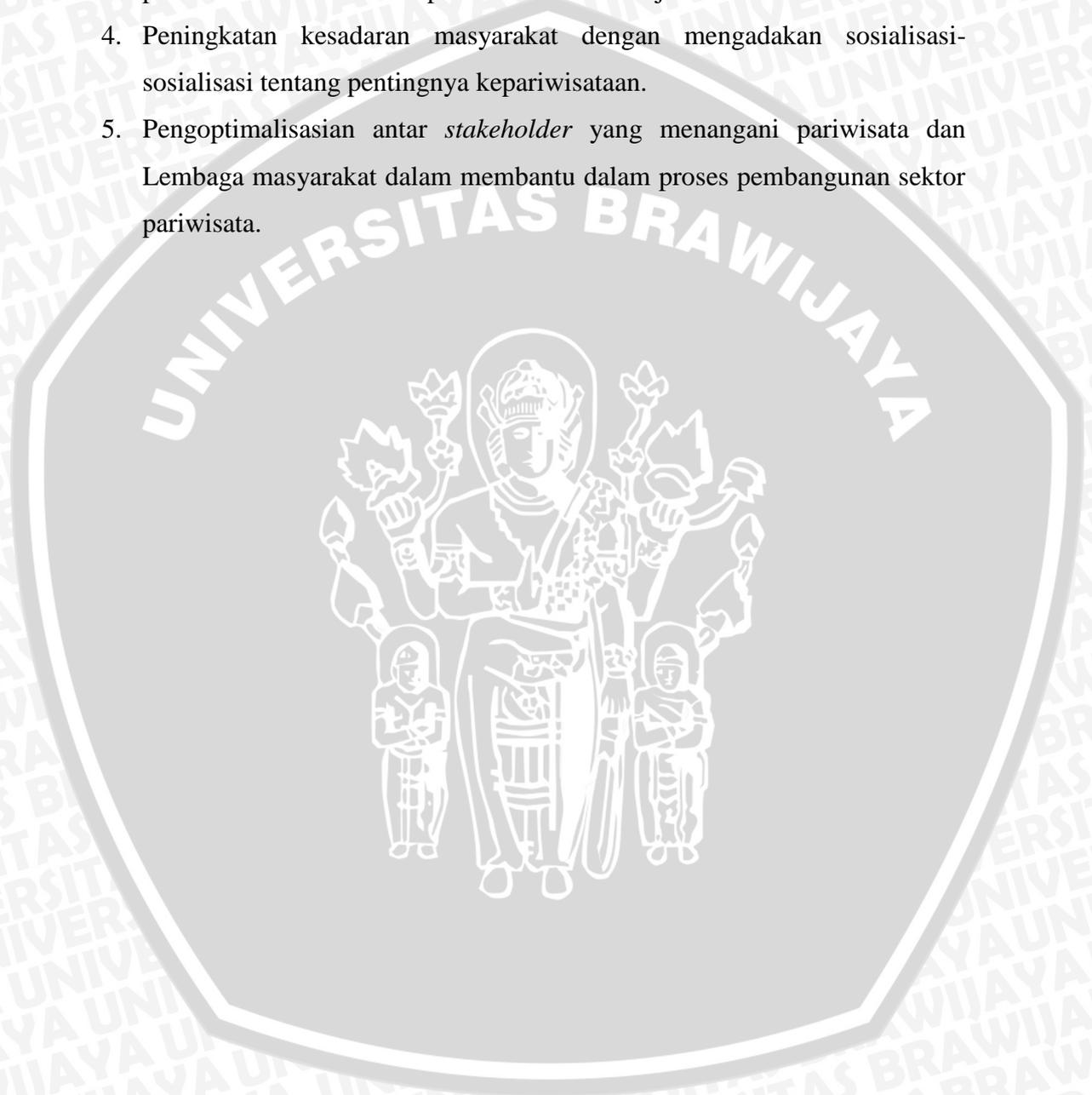
- a. Kesadaran masyarakat kurang.
- b. Tingkat pemasaran dan promosi kurang.
- c. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah.

B. SARAN

Sebagai akhir dari seluruh kajian, peneliti merasa perlu memberikan saran serta masukkan dalam meningkatkan pembangunan sektor pariwisata Kota Blitar sehingga dapat berdampak yang lebih positif terhadap masyarakat. Saran dan masukan tersebut antara lain adalah dengan adanya potensi pariwisata yang banyak dan dengan adanya potensi pariwisata yang digunakan sebagai *icon* dan sebagai unggulan pariwisata Kota Blitar, sehingga membawa dampak sosial ekonomi yang mengarah ke arah yang positif dan lebih baik, pemerintah daerah melalui Dinas Inkomparda Kota Blitar hendaknya melaksanakan dan meningkatkan strategi yang berguna untuk meningkatkan pembangunan pariwisata dengan cara :

1. Menciptakan perencanaan pengembangan dan pembangunan infrastruktur untuk menjamin aksesibilitas di setiap obyek wisata sehingga dapat menarik wisatawan dan dengan terwujudnya pembangunan pariwisata tersebut akan dapat menciptakan lapangan kerja sehingga secara otomatis akan menaikkan tingkat ekonomi masyarakat sekitar.

2. Dinas Kominparda Kota Blitar lebih memperhatikan dan meningkatkan promosi wisata, sehingga pariwisata Kota Blitar dapat dikenal.
3. Perencanaan pembangunan pariwisata di Kota Blitar membutuhkan banyak pihak dan perlu kerja sama antar *stakeholder*. Dengan demikian pemerintah Kota Blitar dapat memfasilitasi kerjasama tersebut.
4. Peningkatan kesadaran masyarakat dengan mengadakan sosialisasi-sosialisasi tentang pentingnya kepariwisataan.
5. Pengoptimalisasian antar *stakeholder* yang menangani pariwisata dan Lembaga masyarakat dalam membantu dalam proses pembangunan sektor pariwisata.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, 1992. *Manajemen penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Atkinson. terjemahan Widjaja Kusuma. 1991. *Pengantar Psikologi*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bryant, Coralie dan White, Loise G. 2005. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIY. 1995. *Dampak Pembangunan Ekonomi (Pasar) Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat*. Departemen P&K. Yogyakarta.
- Direktorat Jendral Pariwisata, 1989 : *Panduan Sadar Wisata Untuk Masyarakat Umum*. Jakarta.
- Ellis, Frank. 2003. *Peasant Economic; Petani Gurem: Rumah Tangga Usaha Tani dan Pembangunan Pertanian*. (terjemahan). Bayu Media dan UMM Press. Malang.
- Follet, Mary, P. 1997. *Manajemen Pariwisata*. Jakarta : PT. Purnama sejahtera.
- Hasibuan, M.S.P. 1987. *Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Pedesaan*, Yogyakarta : PT Piara Wacana.
- Henry, 1995, *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Politik*, (Alih Bahasa : Lontoh, Luciana), Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Irwanto. 1994. *Psikologi Umum*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- J. Spillance, J. James, , 1999 : *Ekonomi Pariwisata*, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1994. Edisi Kedua. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka.
- Keban, Y.T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Keban, Yeremias. 2008. *Administrasi Publik : Konsep, Teori. Dan Isu*. Jogjakarta : Gavamedia
- Kodhyat. 1996. *Sejarah pariwisata dan perkembangannya di Indonesia*. Jakarta : grasindo.
- Kristiadi, J.B. 2008. "Administrasi Pembangunan dalam Administrasi Pemerintahan". Jurnal diakses melalui <http://www.gudangpaper.multiply.com/journal/item/> (15 Maret 2009)
- Maleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT. Remaja Rosdakarya.
- Marpaung, Happy, 1994 ; *Pengetahuan Kepariwisata*, Alfabeta, Bandung.
- Martin, Albrow, 1989, *Birokrasi*, Tiara Wacana, Yogyakarta..
- Milles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisa Data kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Musanef. 1995. *Pariwisata dan Pengembangannya*. Jakarta : Gunung Agung.
- Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nigro, A. Felix and G. Liyd Nigro, 1984. *Administrasi modern*, New York: Harper International Edition
- Pendit, NS. 1994. *Ilmu Pariwisata*. Jakarta : Bina aksara.
- Poerwodarminto, WJS. 1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Siagian, Sondang, P. 1983. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung.

- , 1984, *Teori Pengembangan Organisasi*, Jakarta : Bumi Aksara.
- , 1996, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.
- , 2005. "*Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi dan Strateginya*". Jakarta: Bumi Aksara.
- Prayogo, MT. 1989. *Pengantar Pariwisata Indonesia*. Direktorat Jendral Pariwisata Jakarta
- Soekanto, Suryono.2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- Soeryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang :IM Press
- Soetrisno, Loekman, 1995 *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*, Yogyakarta : Philosophy Press
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1995. *Teori Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana..
- Tjokroamidjoyo, B. 1991. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung.
- Thoha, Miftah, 2005, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Todaro, Michael P. 1998. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Wahab, Salah. 1988. *Pemasaran Pariwisata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Yoeti, A, O. 1983. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Aksara.
- , 1996. *Pemasaran pariwisata*. Bandung : Aksara.
- , 1997. *Perencanaan dan Pengembangan pariwisata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- , 1990. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990. Tentang Kepariwisataaan. Jakarta. Setneg Republik Indonesia.
- Yuliati, Yayuk dan Poernomo, Mangku. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Risaalah Kerto Pustaka Utama. Malang.

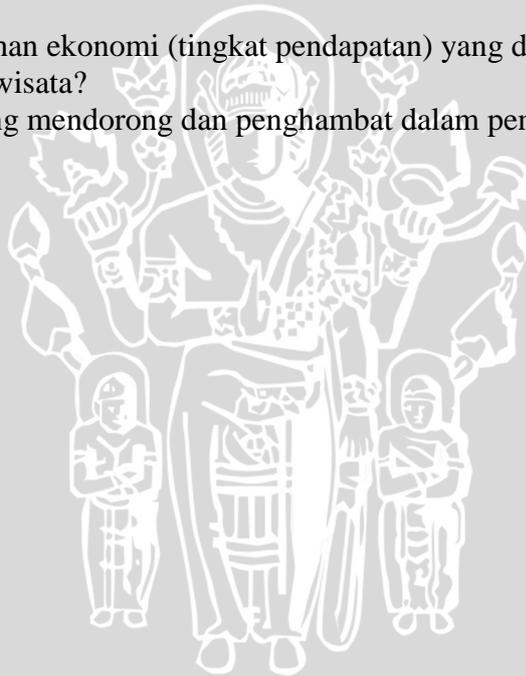
<http://rumah.belajar.psikologi.com> "Persepsi Sosial" (25 januari 2009:14.20)

<http://www.geocities.com/laineberman.interaksi> "Interaksi Sosial" (25 Januari 2009:14.15)

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Ardityan Juli Nugroho
NIM : 0610313023
Kosentrasi : Administrasi Pembangunan
Judul Skripsi : Dampak Pembangunan Sektor Pariwisata Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar (Studi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar)

1. Apa saja potensi pariwisata Kota Blitar?
2. Potensi apa yang menjadi andalan Kota Blitar?
3. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya pembangunan pariwisata?
4. Bagaimana dengan dampak yang ditimbulkan terhadap persepsi masyarakat?
5. Bagaimana peran Dinas Kominparda Kota Blitar dalam mendukung interaksi sosial?
6. Apa yang dirasakan masyarakat dengan adanya pembangunan pariwisata?
7. Bagaimana dampak perubahan ekonomi dengan terbuknya lapangan pekerjaan?
8. Bagaimana perubahan ekonomi (tingkat pendapatan) yang ditimbulkan akibat pembangunan pariwisata?
9. Apa saja faktor yang mendorong dan penghambat dalam pembangunan pariwisata?



CURRICULUM VITAE

Nama : Ardityan Juli Nugroho

Nomor Induk Mahasiswa: 0610313023

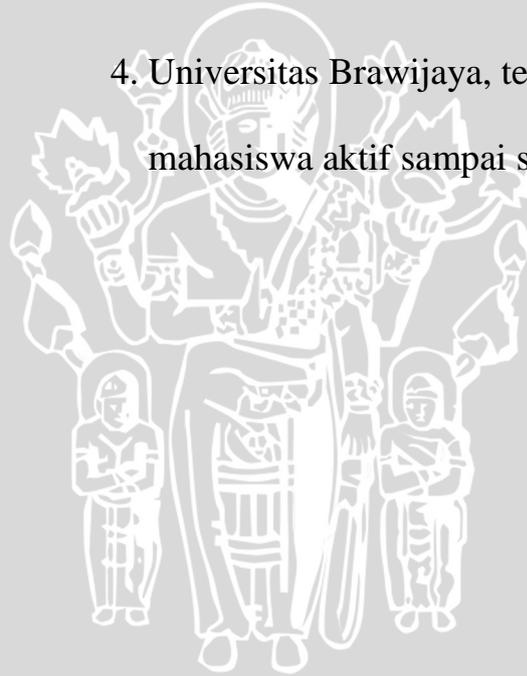
Tempat/tanggal lahir : Blitar, 27 Juli 1987

Pendidikan : 1. SDN Kalipang 03-tamat Tahun 2000

2. SMPN 3 Blitar-tamat Tahun 2003

3. SMAN 3 Blitar-tamat Tahun 2006

4. Universitas Brawijaya, tercatat sebagai mahasiswa aktif sampai sekarang



KOTA BLITAR



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH
Jl. Ir. Soekarno No. 11 Telp. (0342) 801 815
BLITAR

SURAT KETERANGAN

Nomor: 070 / 666 / 422.107 / 2010

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **Drs. KASMIADI**
N I P : 19561222 198608 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar
Alamat : Jl. Ir. Soekarno No. 11 Kota Blitar

menerangkan bahwa,

N a m a : **ARDITYAN JULI N**
N I M : 0610313023
Pekerjaan : Mahasiswa

adalah benar - benar Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ilmu Administrasi yang melakukan Penelitian/Survey/Research mengenai " Dampak Pembangunan Sektor Pariwisata terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar "(Study Kasus Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar) terhitung mulai tanggal 03 Mei s/d 03 Juli 2010.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Blitar, 26 Juli 2010

PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH
Drs. **KASMIADI**
Pembina Utama Muda
NIP. 19561222 198608 1 002